



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.



Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2019 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat pada tahun selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

H. NUR AHMAD SYAIFUDDIN, SH.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo	2
	1. Kondisi Geografis	2
	2. Kondisi Demografis	9
	3. Kondisi Pemerintahan	16
	4. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	22
	5. Kondisi Sarana dan Prasarana	26
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	29
	A. RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021	29
	1. Visi dan Misi	31
	2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	37
	B. Cascading Kinerja	55
	C. Crosscutting	58
	D. Peta Proses Bisnis	63
	E. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019	65
	F. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	65
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	68
	A. Capaian dan Pengukuran Kinerja	68
	B. Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja Per Misi, Tujuan dan Sasaran	70



- Misi 1	70
- Misi 2	94
- Misi 3	106
- Misi 4	115
- Misi 5	127
C. Akuntabilitas Keuangan	149
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	156
BAB IV PENUTUP DAN KESIMPULAN	157
BAB V PRESTASI DAN PENGHARGAAN	159
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA	
LAMPIRAN 2 PENGUKURAN KINERJA	
LAMPIRAN 3 ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	
LAMPIRAN 4 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	
LAMPIRAN 5 EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	
LAMPIRAN 6 PERNYATAAN TELAH DIREVIU	
LAMPIRAN 7 FORMULIR CHECK LIST REVIEW	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Desa dan Kelurahan per Kecamatan	3
Tabel 1.2	Letak, Tinggi dan Luas wilayah menurut kecamatan tahun 2019	5
Tabel 1.3	Luas wilayah menurut kecamatan berdasarkan lapisan batuan tahun 2019	6
Tabel 1.4	Luas wilayah menurut kecamatan berdasarkan lapisan batuan tahun 2019	6
Tabel 1.5	Luas wilayah menurut kecamatan berdasarkan kondisi air tahun 2019	7
Tabel 1.6	Jumlah curah hujan (mm) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2019	8
Tabel 1.7	Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Per Kecamatan Tahun 2019	10
Tabel 1.8	Penduduk per kecamatan menurut jenis kelamin tahun 2019	11
Tabel 1.9	Penduduk menurut umur dan jenis kelamin tahun 2019	12
Tabel 1.10	Penduduk per kecamatan menurut pendidikan tahun 2019	14
Tabel 1.11	Penduduk menurut mata pencaharian tahun 2019	15
Tabel II.1	Kerangka visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 – 2021	36
Tabel II.2	Konsistensi hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran	39
Tabel II.3	Visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi RJPMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 – 2021	48
Tabel II.4	Tema dan program prioritas pembangunan tahun 2019	51



Tabel II.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo	55
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2018	66
Tabel III.1	Skala Pengukuran	69
Tabel III.A.1	Opini BPK atas laporan keuangan	78
Tabel III.A.2	Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo	84
Tabel III.A.3	Indeks Pelayanan Publik	87
Tabel III.B.1	Perbandingan PDRB dan PDRB Perkapita (ADHB)	99
Tabel III.B.2	Trend Status Kemajuan dan kemandirian Desa Update IDM	105
Tabel III.C.1	Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo	109

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1.1	Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo	4
Grafik 1.2	Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo	9
Grafik 1.3	Komposisi Penduduk Menurut usia tahun 2019	12
Grafik 1.4	Komposisi penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019	13
Grafik III.A.1	Indeks Good Governance Kabupaten Sidoarjo	72
Grafik III.A.2	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo	74
Grafik III.A.3	Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo	80
Grafik III.A.4	Perkembangan Hasil EKPPD Kabupaten Sidoarjo	83
Grafik III.A.5	Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo	92
Grafik III.B.1	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo	95
Grafik III.B.2	Disparitas (Indeks GINI)	96
Grafik III.B.3	PDRB perkapita Kabupaten Sidoarjo	99
Grafik III.B.4	Pengangguran terbuka	100
Grafik III.B.5	Tingkat kemiskinan	102
Grafik III.B.6	Realisasi capaian kinerja persentase desa maju	105
Grafik III.C.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo	108 117
Grafik III.C.2	Angka Harapan Lama Sekolah	110
Grafik III.C.3	Rata – Rata Lama Sekolah	112
Grafik III.C.4	Angka harapan hidup Kabupaten Sidoarjo dan Propinsi Jawa Timur tahun 2015 – 2017	113
Grafik III.D.1	Indeks kebahagiaan Kabupaten Sidoarjo	117
Grafik III.D.2	Indeks rasa aman di Kabupaten Sidoarjo	119
Grafik III.D.3	Indeks resiko bencana di Kabupaten Sidoarjo	124
Grafik III.D.4	Indeks pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo	125



Grafik III.E.1	Indeks infrastruktur Kabupaten Sidoarjo	128
Grafik III.E.2	kondisi jalan kabupaten sidoarjo (dalam km)	132
Grafik III.E.3	Lokasi genangan	134



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Tahun 2019 merupakan tahun keempat (ke – 4) dari periode perencanaan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021. Secara umum tujuan dan sasaran melalui indikator-indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021 dapat tercapai dengan baik, dari 5 tujuan yang mencakup 8 indikator dan 9 sasaran yang mencakup 21 indikator rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **106,01%** atau bermakna **SANGAT BERHASIL**.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021, untuk mewujudkan Visi lima tahun kedepan, telah ditetapkan 5 Misi, 5 Tujuan, 8 Indikator Kinerja Tujuan, 9 Sasaran dan 21 Indikator Kinerja Sasaran. Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran untuk tahun keempat (2019) periode perencanaan RPJMD Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

- Misi I terdapat 1 tujuan, 2 indikator kinerja tujuan, 2 sasaran dan 6 indikator kinerja sasaran :
 - Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 2 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :



No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Indeks Good Governance	Sangat Berhasil
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Berhasil

- Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dan 6 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Opini Atas Audit BPK	Berhasil
2.	Nilai SAKIP Kabupaten	Berhasil
3.	Status Kinerja EKPPD	Berhasil
4.	Tingkat Maturitas SPIP	Berhasil
5.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Berhasil
6.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sangat Berhasil

- Misi II terdapat 1 tujuan, 2 indikator kinerja tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja sasaran :

- Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 2 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Sangat Berhasil
2.	Indeks GINI	Sangat Berhasil

- Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dan 4 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Pendapatan Perkapita	Sangat Berhasil
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Sangat Berhasil
3.	Tingkat Kemiskinan	Sangat Berhasil
4.	Persentase Desa Maju	Sangat Berhasil



- Misi III terdapat 1 tujuan, 1 indikator kinerja tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja sasaran :

- Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 1 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Sangat Berhasil

- Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dan 3 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Sangat Berhasil
2.	Rata – Rata Lama Sekolah (RTLs)	Berhasil
3.	Angka Harapan Hidup	Sangat Berhasil

- Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 indikator kinerja tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator kinerja sasaran :

- Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 1 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Indeks Kebahagiaan	Sangat Berhasil

- Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 1 sasaran dan 3 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Indeks Rasa Aman	Sangat Berhasil
2.	Indeks Resiko Bencana	Cukup
3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Berhasil

- Misi V terdapat 1 tujuan, 2 indikator kinerja tujuan, 2 sasaran dan 5 indikator kinerja sasaran :

- Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 2 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Indeks Infrastruktur	Berhasil
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sangat Berhasil



- Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dan 5 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Persentase Jalan Kondisi Mantap	Sangat Berhasil
2.	Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan banjir	Cukup
3.	Indeks Kualitas Air	Berhasil
4.	Indeks Kualitas Udara	Berhasil
5.	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Sangat Berhasil

Berkenaan dengan ketercapaian indikator tujuan dan sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Hasil analisis pencapaian indikator tujuan terhadap 5 (lima) tujuan dengan 8 (delapan) indikator kinerja, diketahui bahwa 6 indikator tujuan atau 75% Sangat Berhasil, dan 2 indikator tujuan atau 25% Berhasil. Rata - rata realisasi capaian kinerja tujuan mencapai 105,01% atau bermakna Sangat Berhasil.
- Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 9 (sembilan) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja, diketahui bahwa 10 indikator sasaran atau 47,62% Sangat Berhasil, 9 indikator sasaran atau 42,86% Berhasil, dan 2 indikator sasaran atau 9,52% Cukup. Rata - rata realisasi capaian kinerja sasaran mencapai 105,40% atau bermakna Sangat Berhasil.

Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 termasuk kategori SANGAT BERHASIL. Capaian kinerja tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018.



BAB I PENDAHULUAN

A.	LATAR BELAKANG
----	----------------

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa azas - azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati / Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan Pemerintah Kabupaten / Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai





perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

B.	GAMBARAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO
-----------	---

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya Kabupaten di Jawa Timur yang terletak diantara dua sungai besar yaitu sungai Porong (47 Km) dan sungai Surabaya (32,5 Km), sehingga terkenal dengan sebutan kota Delta. Secara geografis letak Kabupaten Sidoarjo adalah antara 112°5' – 112°9' Bujur Timur dan 7°3' – 7°5' Lintang Selatan, dengan batas wilayah :

1. Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
2. Sebelah Timur : Selat Madura
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto.

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 Kecamatan, 322 Desa dan 31 Kelurahan. Sementara itu desa-desa di Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi desa pedesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urban area*).





Tabel I.1

Desa dan Kelurahan per Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Sidoarjo	10	14
2.	Buduran	15	-
3.	Candi	24	-
4.	Porong	13	6
5.	Krembung	19	-
6.	Tulangan	22	-
7.	Tanggulangin	19	-
8.	Jabon	15	-
9.	Krian	19	3
10.	Balongbendo	20	-
11.	Wonoayu	23	-
12.	Tarik	20	-
13.	Prambon	20	-
14.	Taman	16	8
15.	Waru	17	-
16.	Gedangan	15	-
17.	Sedati	16	-
18.	Sukodono	19	-
	JUMLAH	322	31

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo



Grafik I.1

Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara Bulan Mei sampai Bulan September dan di Bulan Oktober sampai Bulan April adalah musim hujan. Suhu udara berkisar antara 20 s.d 35 derajat Celsius.

Luas wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah 71.424,30 Hektar dan berdasarkan karakteristik topografinya terbagi atas tiga kelas, yaitu :

- 0 s.d 3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan yang berair asin / payau berada di belahan timur meliputi 29,99% dari luas wilayah;
- 3 s.d 10 meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan protokol yang berair tawar meliputi 40,81% dari luas wilayah; dan
- 10 s.d 25 meter terletak di daerah bagian barat meliputi 29,20% dari luas wilayah.

Kondisi air ada dua jenis rasa air di Kabupaten Sidoarjo yaitu air asin dan air tawar, ada 8 kecamatan yang sebagian wilayahnya merupakan jenis air asin dan 10 kecamatan murni air tawar. Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten



Sidoarjo. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis penggunaan lahan yaitu permukiman, lahan sawah dan perikanan, pertambangan, industri (gudang, zona industri dan kawasan industri), fasilitas umum, perdagangan dan jasa, serta kawasan khusus militer.

Tabel I.2
Letak, Tinggi, dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Tinggi Rata – Rata (m dpl)	luas Wilayah (Km2)
1	Sidoarjo	4	62.560
2	Buduran	4	41.030
3	Candi	4	40.670
4	Porong	4	29.820
5	Krembung	5	29.550
6	Tulangan	7	31.210
7	Tanggulangin	4	32.290
8	Jabon	2	81.000
9	Krian	12	32.500
10	Balongbendo	20	31.400
11	Wonoayu	4	33.920
12	Tarik	16	36.060
13	Prambon	10	34.230
14	Taman	9	31.540
15	Waru	5	30.320
16	Gedangan	4	24.060
17	Sedati	4	79.430
18	Sukodono	7	32.680
Jumlah			714.240

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2019

Wilayah Kabupaten Sidoarjo juga memiliki kandungan gas bumi yang dibentuk oleh batuan *alluvium* seluas 686,89 Ha tersebar disemua kecamatan, batuan *plistosen fasien sedimen* terdapat di 6 kecamatan, tanah *alluvial* kelabu merata di 18 kecamatan, *assosiasi alluvial* kelabu dan cokelat kekuningan terdapat di 4 kecamatan, yaitu : Krembung, Balongbendo, Tarik, dan Prambon.



Tabel I.3
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Lapisan Batuan
Tahun 2019

No.	Kecamatan	Plistosen Fasien Sedimen (Ha)	Alluvium (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Sidoarjo	42,00	6.214,00	6.256,00
2	Buduran	1.469,00	2.633,50	4.102,50
3	Candi	-	40,67	4.066,75
4	Porong	-	29,82	2.982,25
5	Krembung	-	29,55	2.955,00
6	Tulangan	-	31,21	3.120,50
7	Tanggulangin	-	32,29	3.229,00
8	Jabon	-	81,00	8.099,75
9	Krian	-	32,50	3.250,00
10	Balongsendo	-	31,40	3.140,00
11	Wonoayu	-	33,92	3.392,00
12	Tarik	-	36,06	3.606,00
13	Prambon	-	34,23	3.422,50
14	Taman	448,00	2.705,50	3.153,50
15	Waru	384,00	2.648,00	3.032,00
16	Gedangan	38,00	2.367,75	2.405,75
17	Sedati	355,00	7.588,00	7.943,00
18	Sukodono	-	32,68	3.267,75
Jumlah		2.736,00	24.602,07	71.424,25

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2019

Tabel I.4
Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Lapisan Batuan
Tahun 2019

No.	Kecamatan	Alluvial Kelabu (Ha)	As alluvial klb, coklat kuning (Ha)	Alluvial Hidromort (Ha)	Kelabu Tua (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Sidoarjo	2.966,11	-	3.289,89	-	6.256,00
2	Buduran	1.480,02	-	1.853,22	769,26	4.102,50
3	Candi	1.552,88	-	2.513,87	-	4.066,75
4	Porong	2.083,07	-	899,18	-	2.982,25
5	Krembung	2.500,95	454,05	-	-	2.955,00
6	Tulangan	3.120,50	-	-	-	3.120,50
7	Tanggulangin	1.564,77	-	1.664,23	-	3.229,00



No.	Kecamatan	Alluvial Kelabu (Ha)	As alluvial klb, coklat kuning (Ha)	Alluvial Hidromort (Ha)	Kelabu Tua (Ha)	Jumlah (Ha)
8	Jabon	2.580,20	-	5.519,55	-	8.099,75
9	Krian	3.250,20	-	-	-	3.250,00
10	Balongsendo	3.250,00	2.795,55	-	-	3.140,00
11	Wonoayu	3.392,00	-	-	-	3.392,00
12	Tarik	2.618,93	987,07	-	-	3.606,00
13	Prambon	2.688,94	733,56	-	-	3.422,50
14	Taman	3.153,50	-	-	-	3.153,50
15	Waru	2.020,67	-	1.011,33	-	3.032,00
16	Gedangan	2.304,31	-	-	101,44	2.405,75
17	Sedati	3.333,04	-	4.609,96	-	7.943,00
18	Sukodono	3.267,75	-	-	-	3.267,75
Jumlah		47.017,64	4.970,23	21.361,23	870,70	71.424,25

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2019

Kondisi air tanah di Kabupaten Sidoarjo antara 0 – 5 meter di bawah permukaan tanah. Daerah banjir terbagi menjadi tiga, banjir karena hujan tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan, banjir periodik di sebagian 5 (lima) kecamatan, dan banjir karena air pasang berada di sebagian 4 (empat) kecamatan.

Tabel I.5

Luas Wilayah Menurut Kecamatan Berdasarkan Kondisi Air Tahun 2019

No	Kecamatan	Daerah Air Asin	Daerah Banjir			Kedalaman Air Tanah 0 – 5 M
			Sesudah Hujan	Periodik	Air Pasang	
1	Sidoarjo	4.063,62	308,14	-	-	6.256,00
2	Buduran	1.822,50	17,50	-	701,75	4.102,50
3	Candi	667,25	491,30	-	-	4.066,75
4	Porong	-	14,26	75,50	-	2.982,25
5	Krebung	-	17,00	12,00	-	2.955,00
6	Tulangan	-	48,00	-	-	3.120,50
7	Tanggulangin	640,75	21,25	-	-	3.229,00
8	Jabon	4.080,75	216,05	27,00	456,00	8.099,75
9	Krian	-	265,75	-	-	3.250,00
10	Balongsendo	-	30,00	-	-	3.140,00
11	Wonoayu	-	71,50	-	-	3.392,00
12	Tarik	-	8,75	-	-	3.606,00





No	Kecamatan	Daerah Air Asin	Daerah Banjir			Kedalaman Air Tanah 0 – 5 M
			Sesudah Hujan	Periodik	Air Pasang	
13	Prambon	-	64,25	-	-	3.422,50
14	Taman	-	-	108,00	-	3.153,50
15	Waru	740,50	-	-	740,50	3.032,00
16	Gedangan	195,75	-	-	-	2.405,75
17	Sedati	4.101,57	-	387,90	120,30	7.943,00
18	Sukodono	-	-	-	-	3.267,75
Total		16.312,67	1.573,75	610,40	2.018,55	71.424,25

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2019

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Sidoarjo beriklim tropis dan mengenal 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Rata-rata curah hujan tertinggi pada bulan Februari dan terendah di bulan Agustus.

Tabel I.6

Jumlah Curah Hujan (mm) di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

No	Lokasi Penakar Hujan	B U L A N											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Kemlaten	226.0	442.0	152.0	229.0	-	16.0	-	-	-	-	91.8	374.0
2	Ponokawan	196.0	909.0	313.0	189.0	-	23.0	-	-	-	-	231.0	222.0
3	Bakalan	261.0	470.0	268.0	109.0	-	18.0	-	-	-	-	182.0	197.0
4	Krian	173.0	377.0	325.0	175.0	-	20.0	-	-	-	-	216.0	198.0
5	Ketawang	280.0	450.0	318.0	135.0	-	27.0	-	-	-	-	242.5	223.5
6	Ketintang	250.0	483.0	252.0	234.0	-	24.0	-	-	-	-	130.2	234.0
7	Watutulis	238.0	398.0	228.0	178.0	-	20.0	-	-	-	-	290.0	243.0
8	Pertapan Maduretno	242.0	436.0	361.0	111.8	-	27.0	-	-	-	-	236.0	279.0
9	Cepiples	159.0	361.0	191.0	136.0	-	18.0	-	-	-	-	25.0	220.0
10	Luwung	176.0	438.0	228.0	183.0	-	20.0	-	-	-	-	42.0	241.0
11	Gedangrowo	111.1	322.0	144.0	166.0	-	15.0	-	-	-	-	98.0	121.0
12	Prambon	136.0	438.0	169.0	138.0	-	19.0	-	-	-	-	143.0	181.0
13	Botokan	292.0	529.0	410.0	174.0	-	32.0	-	-	-	-	191.0	214.0
14	Durungbedug	253.0	583.0	196.0	217.0	-	31.0	-	-	-	-	174.0	157.0
15	Bono	301.0	432.0	497.0	124.0	-	53.0	-	-	-	-	126.0	187.0
16	Sruni	359.0	578.0	523.0	147.0	-	35.0	-	-	-	-	240.0	278.0
17	Sedati	346.0	336.0	457.0	257.0	-	49.0	-	-	-	-	76.0	207.0
18	Bankar Kemantren	227.0	548.0	453.0	191.0	-	27.0	-	-	-	-	203.0	337.0
19	Ketegan	406.0	473.0	539.0	292.0	-	60.0	-	-	-	-	74.0	379.0
20	Sumput	66.0	295.0	91.0	47.0	-	4.0	-	-	-	-	62.0	135.0
21	Klagen	256.0	269.0	76.0	88.0	-	5.0	-	-	-	-	287.0	229.0
22	Karangnongko	267.0	543.0	248.0	111.0	-	22.0	-	-	-	-	145.0	163.0
23	Sidoarjo	-	490.0	247.0	235.0	-	36.0	-	-	-	-	119.0	209.0
24	Kludan	201.0	441.0	344.0	167.0	-	15.0	-	-	-	-	67.0	254.0



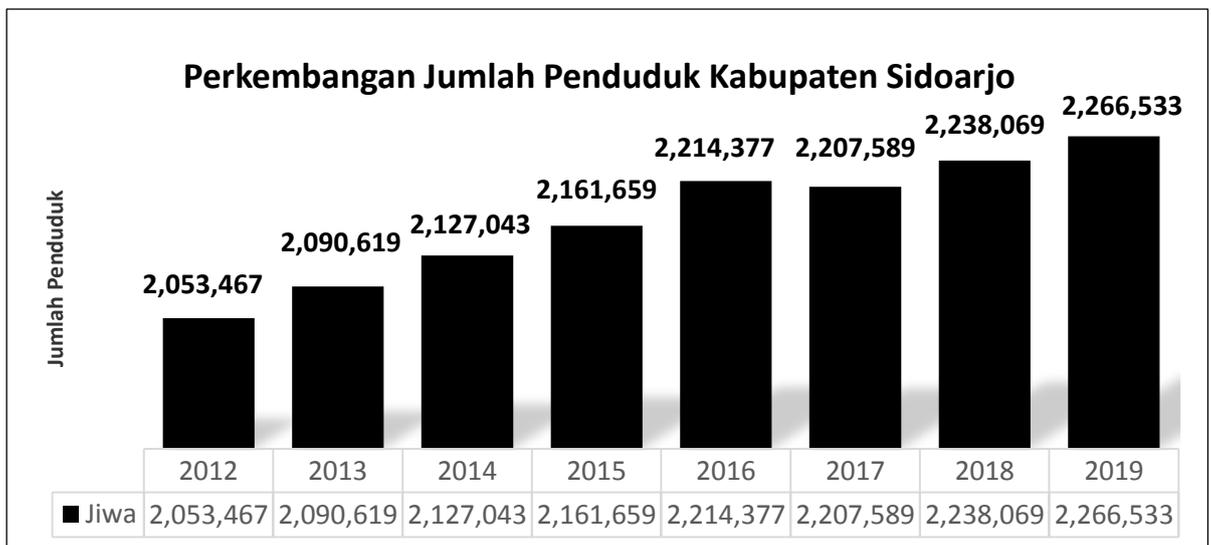
No	Lokasi Penakar Hujan	B U L A N											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
25	Putat	284.0	518.0	334.0	138.0	-	-	-	-	-	-	44.0	211.0
26	Kedung Cangkring	152.0	371.0	248.0	37.0	-	-	-	-	-	-	48.0	80.0
27	Porong	189.0	423.0	259.0	65.0	-	14.0	-	-	-	-	68.0	125.0
28	Krebung / Biting	129.0	391.0	80.0	122.0	-	4.0	-	-	-	-	49.0	98.0
29	Bedugbulus	140.0	399.0	113.0	168.0	-	5.0	-	-	-	-	136.0	154.0
30	Lengkong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata-Rata		217.8	453.2	278.1	155.6	0.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.4	210.6

Sumber : Sidoarjo Dalam Angka 2019

2. Kondisi Demografis

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Berdasarkan laporan perkembangan penduduk bulan Desember tahun 2019, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 2.266.533 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut :

Grafik I.2



Sumber data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan, kecamatan Waru memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 240.674 jiwa, sedangkan kecamatan Jabon memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 61.092 jiwa. Jumlah penduduk per Kecamatan dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.7
Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepala Keluarga (KK)
Per Kecamatan Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KEPALA KELUARGA
1	TARIK	72,206	23,374
2	PRAMBON	85,157	27,730
3	KREMBUNG	75,731	24,517
4	PORONG	85,700	27,603
5	JABON	61,092	19,496
6	TANGGULANGIN	106,685	32,679
7	CANDI	168,779	52,102
8	SIDOARJO	228,713	71,307
9	TULANGAN	107,683	35,121
10	WONOAYU	90,794	28,772
11	KRIAN	140,183	44,139
12	BALONGBENDO	80,222	25,818
13	TAMAN	235,238	74,811
14	SUKODONO	132,644	41,010
15	BUDURAN	108,457	33,667
16	GEDANGAN	134,787	41,553
17	SEDATI	111,788	35,765
18	WARU	240,674	79,518
	TOTAL	2,266,533	718,982

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk per Kecamatan menurut jenis kelamin berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel I.8
Penduduk Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

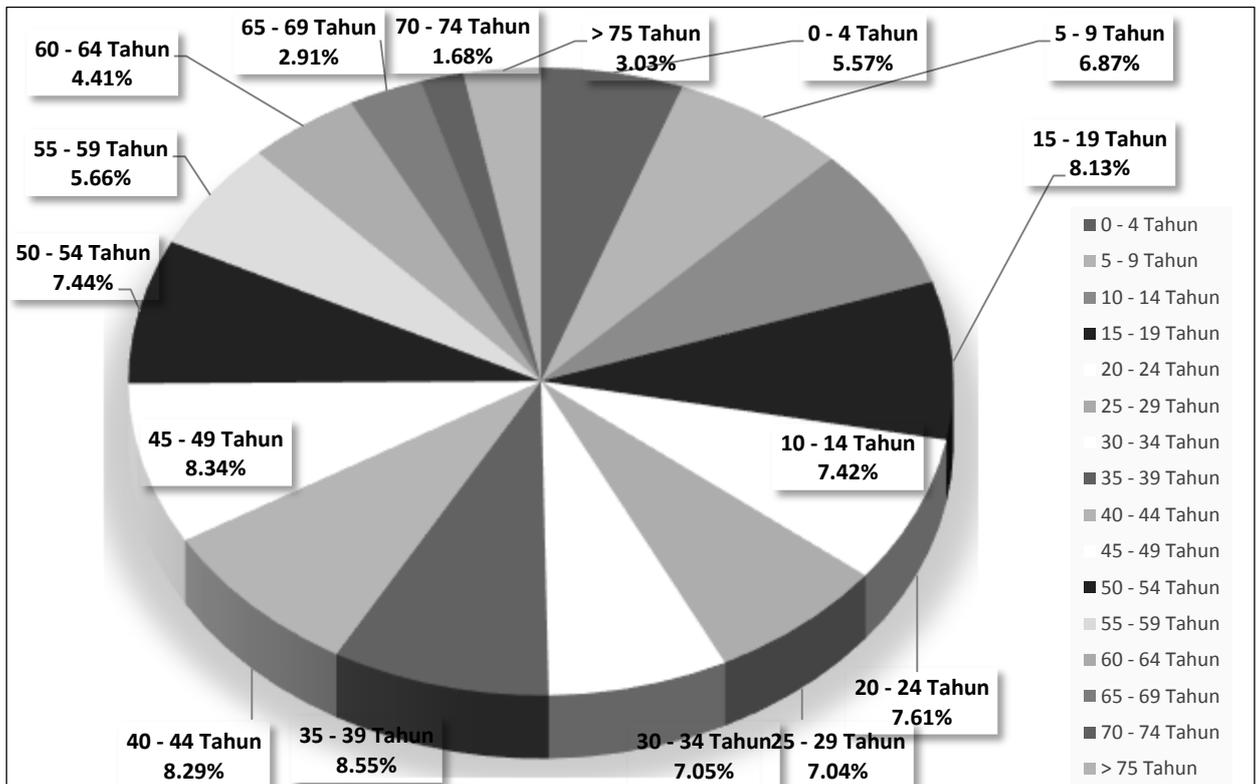
NO	KECAMATAN	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	TARIK	36,356	35,850	72,206
2	PRAMBON	43,075	42,082	85,157
3	KREMBUNG	37,986	37,745	75,731
4	PORONG	43,160	42,540	85,700
5	JABON	30,677	30,415	61,092
6	TANGGULANGIN	53,840	52,845	106,685
7	CANDI	84,923	83,856	168,779
8	SIDOARJO	114,090	114,623	228,713
9	TULANGAN	54,137	53,546	107,683
10	WONOAYU	45,728	45,066	90,794
11	KRIAN	71,152	69,031	140,183
12	BALONGBENDO	40,613	39,609	80,222
13	TAMAN	119,287	115,951	235,238
14	SUKODONO	67,520	65,124	132,644
15	BUDURAN	54,810	53,647	108,457
16	GEDANGAN	68,239	66,548	134,787
17	SEDATI	56,723	55,065	111,788
18	WARU	120,339	120,335	240,674
	TOTAL	1,142,655	1,123,878	2,266,533

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan berdasarkan struktur usia penduduk Kabupaten Sidoarjo membentuk Piramida jenis piramida muda (expansive), dimana sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi daerah karena tingkat produktifitas suatu wilayah akan jauh lebih tinggi karena banyaknya usia muda dan sedikitnya

usia tua. Penduduk di Kabupaten Sidoarjo terbanyak berada di golongan usia produktif, yaitu antara 35 tahun sampai dengan 39 tahun.

Grafik I.3
Komposisi Penduduk Menurut Usia Tahun 2019



Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel I.9
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

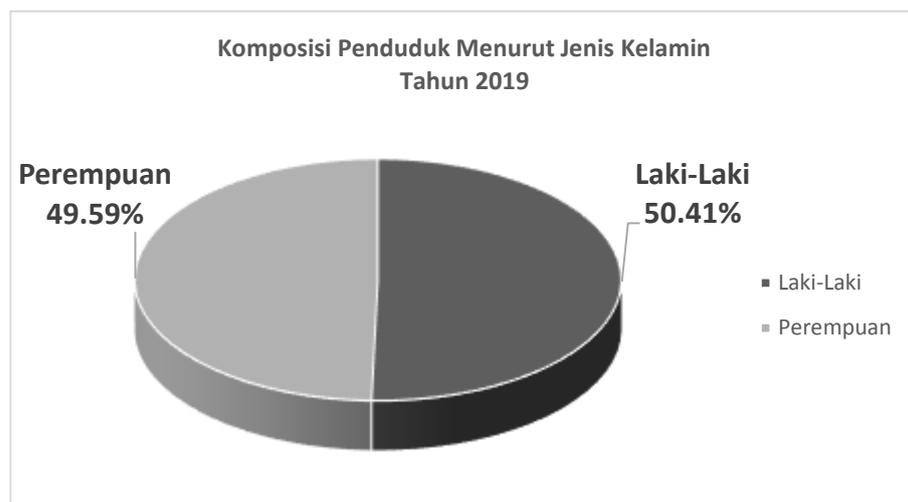
NO	STRUKTUR UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	0 - 4	65,444	60,816	126,260
2.	5 - 9	80,481	75,333	155,814
3.	10 - 14	87,141	81,109	168,250
4.	15 - 19	94,996	89,251	184,247
5.	20 - 24	88,610	83,920	172,530
6.	25 - 29	81,199	78,370	159,569
7.	30 - 34	81,087	78,724	159,811
8.	35 - 39	96,279	97,585	193,864
9.	40 - 44	92,671	95,259	187,930

10.	45 - 49	93,579	95,375	188,954
11.	50 - 54	84,257	84,327	168,584
12.	55 - 59	63,544	64,670	128,214
13.	60 - 64	51,724	48,136	99,860
14.	65 - 69	34,799	31,174	65,973
15.	70 - 74	17,171	20,892	38,063
16.	>75	29,673	38,937	68,610
TOTAL		1,142,655	1,123,878	2,266,533

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan apabila dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, terbanyak adalah penduduk laki-laki yaitu 1.142.655 jiwa atau 50,41%, sedangkan penduduk perempuan yaitu 1.123.878 jiwa atau 49,59%. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui tabel dan grafik berikut :

Grafik I.4



Sumber : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sebagian besar penduduk Kabupaten Sidoarjo memiliki kualifikasi pendidikan Lulusan SMA Sederajat, yaitu 42,04% dari jumlah penduduk. Meski demikian, masih ada 25,20% penduduk Kabupaten Sidoarjo yang masih berpendidikan rendah atau Lulusan SD Sederajat.

Komposisi penduduk menurut pendidikan tersajikan dalam tabel berikut :

Tabel I.10
Penduduk Per Kecamatan Menurut Pendidikan Tahun 2019

NO	KECAMATAN	LULUSAN SD	LULUSAN SMP	LULUSAN SMA	LULUSAN S1	LULUSAN S2	TOTAL
1	TARIK	17,797	14,141	18,244	2,127	74	52,383
2	PRAMBON	20,314	15,119	23,916	3,136	95	62,580
3	KREMBUNG	15,765	13,937	21,610	2,708	88	54,108
4	PORONG	19,415	14,845	22,181	3,432	138	60,011
5	JABON	16,120	11,020	14,919	1,774	53	43,886
6	TANGGULANGIN	21,162	18,226	31,356	6,302	232	77,278
7	CANDI	29,185	23,152	49,458	13,882	679	116,356
8	SIDOARJO	32,681	27,668	68,485	29,476	1,690	160,000
9	TULANGAN	20,397	18,261	32,865	4,930	157	76,610
10	WONOAYU	22,696	14,347	22,917	3,659	141	63,760
11	KRIAN	28,331	22,584	39,142	7,309	239	97,605
12	BALONGBENDO	17,743	14,805	20,871	2,869	95	56,383
13	TAMAN	36,516	32,826	77,677	19,996	1,149	168,164
14	SUKODONO	21,940	18,850	41,821	10,761	483	93,855
15	BUDURAN	15,011	15,643	34,770	10,397	608	76,429
16	GEDANGAN	19,737	18,533	42,078	11,909	601	92,858
17	SEDATI	18,711	14,973	35,599	9,396	988	79,667
18	WARU	30,556	30,894	76,211	31,723	2,153	171,537
	TOTAL	404,077	339,824	674,120	175,786	9,663	1,603,470

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan untuk komposisi penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel I.11

Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2019

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	694,673	45.	USTADZ/MUBALIGH	126
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	120,377	46.	JURU MASAK	35
3	PELAJAR/MAHASISWA	365,540	47.	PROMOTOR ACARA	0
4	PENSIUNAN	18,854	48.	ANGGOTA DPR RI	5
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	32,526	49.	ANGGOTA DPD RI	2
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	18,389	50.	ANGGOTA BPK	2
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	5,918	51.	PRESIDEN	0
8	PERDAGANGAN	25,238	52.	WAKIL PRESIDEN	0
9	PETANI/PEKEBUN	48,801	53.	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	2
10	PETERNAK	50	54.	ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN	0
11	NELAYAN/PERIKANAN	907	55.	DUTA BESAR	1
12	INDUSTRI	178	56.	GUBERNUR	0
13	KONSTRUKSI	198	57.	WAKIL GUBERNUR	0
14	TRANSPORTASI	208	58.	BUPATI	1
15	KARYAWAN SWASTA	795,957	59.	WAKIL BUPATI	1
16	KARYAWAN BUMN	6,242	60.	WALIKOTA	0
17	KARYAWAN BUMD	572	61.	WAKIL WALIKOTA	1
18	KARYAWAN HONORER	686	62.	ANGGOTA DPRD PROP.	1
19	BURUH HARIAN LEPAS	3,054	63.	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	20
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	2,095	64.	DOSEN	3,145
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	234	65.	GURU	22,064
22	BURUH PETERNAKAN	21	66.	PILOT	38
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	518	67.	PENGACARA	131
24	TUKANG CUKUR	23	68.	NOTARIS	93
25	TUKANG LISTRIK	72	69.	ARSITEK	42
26	TUKANG BATU	1,076	70.	AKUNTAN	21
27	TUKANG KAYU	227	71.	KONSULTAN	76
28	TUKANG SOL SEPATU	28	72.	DOKTER	1,647
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	102	73.	BIDAN	1,317
30	TUKANG JAHIT	457	74.	PERAWAT	2,345
31	TUKANG GIGI	5	75.	APOTEKER	183
32	PENATA RIAS	49	76.	PSIKIATER/PSIKOLOG	16
33	PENATA BUSANA	8	77.	PENYIAR TELEVISI	1





34	PENATA RAMBUT	41	78.	PENYIAR RADIO	7
35	MEKANIK	253	79.	PELAUT	2460
36	SENIMAN	68	80.	PENELITI	9
37	TABIB	19	81.	SOPIR	3,699
38	PARAJI	3	82.	PIALANG	6
39	PERANCANG BUSANA	9	83.	PARANORMAL	12
40	PENTERJEMAH	5	84.	PEDAGANG	14,989
41	IMAM MASJID	6	85.	PERANGKAT DESA	2,459
42	PENDETA	206	86.	KEPALA DESA	252
43	PASTOR	5	87.	BIARAWAN/BIARAWATI	17
44	WARTAWAN	169	88.	WIRASWASTA	69,036
			89.	PEKERJAAN LAINNYA	404
				JUMLAH	2,266,533

Sumber Data : SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mata pencaharian terbesar adalah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai karyawan swasta, sebesar 35,12%. Posisi kedua adalah penduduk yang bekerja sebagai wiraswasta, yaitu sebesar 3,05%, sedangkan posisi ketiga petani/pekebun sebesar 2,15%, yang berkecukupan pada bisnis perdagangan sebesar 1,11%, dan pedagang sebesar 0,66%. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian ini tidak lepas dari struktur ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang bertumpu pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

3. Kondisi Pemerintahan

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 sebagai berikut :



- Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Sekretariat Daerah melaksanakan unsur penunjang sekretariat daerah.

Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 1. Bagian Pemerintahan
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
 3. Bagian Hukum
 - b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 2. Bagian Pembangunan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - c. Asisten Administrasi Umum
 1. Bagian Organisasi
 2. Bagian Umum
 3. Bagian Protokol dan Rumah Tangga
- Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD melaksanakan unsur penunjang sekretariat DPRD;
 - Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat melaksanakan unsur penunjang pengawasan.
 - Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;



- 3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan jalan, sub urusan sumber daya air, dan sub urusan drainase;
- 4) Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang pertanahan, pada sub urusan air limbah, sub urusan air minum, sub urusan persampahan, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung, sub urusan penataan bangunan dan lingkungannya, sub urusan jasa konstruksi, serta sub urusan penataan ruang;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 6) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- 7) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- 8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;





- 10) Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;
- 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 13) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- 14) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- 15) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- 17) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata;
- 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- 19) Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;





- 20) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- Badan Daerah terdiri dari :
 - 1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan;
 - 3) Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe B, melaksanakan sebagian fungsi penunjang bidang keuangan dalam pelayanan pajak daerah;
 - 4) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - Kecamatan, yang terdiri dari 18 kecamatan dan melaksanakan unsur penunjang kewilayahan, antara lain :
 - 1) Kecamatan Sidoarjo dengan Tipe A;
 - 2) Kecamatan Candi dengan Tipe A;
 - 3) Kecamatan Buduran dengan Tipe A;
 - 4) Kecamatan Gedangan dengan Tipe A;
 - 5) Kecamatan Sedati dengan Tipe A;
 - 6) Kecamatan Waru dengan Tipe A;
 - 7) Kecamatan Taman dengan Tipe A;
 - 8) Kecamatan Krian dengan Tipe A;
 - 9) Kecamatan Wonoayu dengan Tipe A;
 - 10) Kecamatan Sukodono dengan Tipe A;
 - 11) Kecamatan Balongbendo dengan Tipe A;
 - 12) Kecamatan Tarik dengan Tipe A;
 - 13) Kecamatan Tulangan dengan Tipe A;
 - 14) Kecamatan Prambon dengan Tipe A;



- 15) Kecamatan Krembung dengan Tipe A;
- 16) Kecamatan Tanggulangin dengan Tipe A;
- 17) Kecamatan Jabon dengan Tipe A;
- 18) Kecamatan Porong dengan Tipe A.

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya. Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah kabupaten. Satuan Pendidikan Daerah kabupaten dimaksud berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Selain itu juga terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Rumah Sakit Daerah Kabupaten bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola Minis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan bencana yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya kelembagaan baru yang melaksanakan sub urusan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mengenai bencana dengan Peraturan Daerah tersendiri, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Staf Ahli. Staf Ahli tersebut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Staf ahli dimaksud antara lain :

- 1) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik
- 2) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan
- 3) Staf Ahli Bupati Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan SDM

4. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Salah satu instrumen penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Tahun 2019 sebanyak 11.294 orang yang terdiri dari, sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	JABATAN STRUKTURAL YANG HARUS ADA	JABATAN STRUKTURAL YANG ADA	NON STRUKTURAL (STAF)	JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH PEGAWAI
					JUMLAH	NAMA JABATAN	
1	SEKRETARIAT DAERAH	41	40	128	4	PRANATA KOMPUTER	172
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	18	15	46	3	ASSESSOR SDM APARATUR	69
					3	PRANATA KOMPUTER	
					1	ARSIPARIS	
					1	ANALIS KEPEGAWAIAN	
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14	11	22	1	PRANATA KOMPUTER	34
4	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	16	13	59	1	PRANATA KOMPUTER	73
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	14	12	64	1	PRANATA KOMPUTER	77
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	17	15	42	0		57
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21	18	24	1	PRANATA KOMPUTER	51
					2	PENELITI	
					5	PERENCANA	
					1	STATISTISI	



8	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	17	13	50	1	PRANATA KOMPUTER	64
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	21	16	31	3	PRANATA KOMPUTER	51
					1	ARSIPARIS	
10	DINAS KESEHATAN	49	47	290	1	ADMINISTRATOR KESEHATAN	1.461
					7	APOTEKER	
					53	ASISTEN APOTEKER	
					416	BIDAN	
					36	DOKTER GIGI	
					125	DOKTER UMUM	
					37	NUTRISIONIS	
					318	PERAWAT	
					42	PERAWAT GIGI	
					7	PRANATA KOMPUTER	
					53	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	
					1	REFRAKSIONIS	
					25	SANITARIAN	
					3	TEKNISI ELEKTROMEDIS	
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20	17	32	3	PRANATA KOMPUTER	55
					3	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	
12	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	15	12	21	1	PRANATA KOMPUTER	34
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	23	22	280	1	PRANATA KOMPUTER	305
					2	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	
14	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	27	20	67	3	MEDIK VETERINER	144
					2	PARAMEDIK VETERINER	
					51	PENYULUH PERTANIAN	
					1	PRANATA KOMPUTER	
15	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	21	18	134	1	ARSIPARIS	157
					2	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	
					1	TEKNIK PENGAIRAN	
					1	PRANATA KOMPUTER	





16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	17	17	31	1	ARSIPARIS	50
					1	PRANATA KOMPUTER	
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	27	25	550	67	GURU AGAMA ISLAM	6.269
					43	GURU PENJASKES	
					3.148	GURU KELAS	
					1.847	GURU MATA PELAJARAN	
					507	KEPALA SEKOLAH	
					21	PENGAWAS DIKMENUM	
					41	PENGAWAS TK/SD	
					7	PENILIK DIKMAS	
					2	PRANATA KOMPUTER	
					9	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	
					1	FISIOTERAPIS	
1	PSIKOLOGI KLINIS						
18	DINAS PERHUBUNGAN	23	18	58	16	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	93
					1	PRANATA KOMPUTER	
19	DINAS PERIKANAN	15	14	27	1	PRANATA KOMPUTER	42
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	21	18	158	1	PRANATA KOMPUTER	188
					3	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
					8	PENERA	
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	14	13	17	4	ARSIPARIS	38
					4	PUSTAKAWAN	
22	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	23	19	40	2	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	61
23	DINAS SOSIAL	16	13	20	1	PRANATA KOMPUTER	34
24	DINAS TENAGA KERJA	15	13	17	6	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	38
					2	PENGANTAR KERJA	
25	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20	16	23	1	PRANATA KOMPUTER	40





26	INSPEKTORAT	9	8	19	32	AUDITOR	62
					2	AUDITOR KEPEGAWAIAN	
					1	ARSIPARIS	
27	KECAMATAN BALONGBENDO	10	9	19	1	PRANATA KOMPUTER	29
28	KECAMATAN BUDURAN	10	9	18	1	PRANATA KOMPUTER	28
29	KECAMATAN CANDI	10	7	23	1	PRANATA KOMPUTER	31
30	KECAMATAN GEDANGAN	10	6	19	1	PRANATA KOMPUTER	26
31	KECAMATAN JABON	10	8	14	1	PRANATA KOMPUTER	23
32	KECAMATAN KREMBUNG	10	9	22	1	PRANATA KOMPUTER	32
33	KECAMATAN KRIAN	25	17	24	0		41
34	KECAMATAN PORONG	35	12	29	1	PRANATA KOMPUTER	42
35	KECAMATAN PRAMBON	10	8	22	1	PRANATA KOMPUTER	31
36	KECAMATAN SEDATI	10	9	20	1	PRANATA KOMPUTER	30
37	KECAMATAN SIDOARJO	80	44	73	1	PRANATA KOMPUTER	118
38	KECAMATAN SUKODONO	10	8	20	1	PRANATA KOMPUTER	29
39	KECAMATAN TAMAN	50	28	37	1	PRANATA KOMPUTER	66
40	KECAMATAN TANGGULANGIN	10	8	21	1	PRANATA KOMPUTER	30
41	KECAMATAN TARIK	10	7	19	1	PRANATA KOMPUTER	27
42	KECAMATAN TULANGAN	10	5	29	1	PRANATA KOMPUTER	35
43	KECAMATAN WARU	10	8	20	1	PRANATA KOMPUTER	29
44	KECAMATAN WONOAYU	10	9	23	1	PRANATA KOMPUTER	33
45	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	29	29	181	5	ADMINISTRATOR KESEHATAN	692
					6	APOTEKER	
					32	ASISTEN APOTEKER	
					19	BIDAN	
					4	DOKTER GIGI	
					4	DOKTER PENDIDIK KLINIS	
					60	DOKTER SPESIALIS	
					9	DOKTER UMUM	





					8	FISIOTERAPIS	
					17	NUTRISIONIS	
					263	PERAWAT	
					2	PERAWAT GIGI	
					7	PEREKAM MEDIS	
					1	PRANATA KOMPUTER	
					24	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	
					11	RADIOGRAFER	
					1	REFRAKSIONIS	
					2	SANITARIAN	
					7	TEKNISI ELEKTROMEDIS	
46	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14	12	94	1	ARSIPARIS	108
					1	PRANATA KOMPUTER	
47	SEKRETARIAT DPRD	15	15	41	1	ARSIPARIS	58
					1	PRANATA KOMPUTER	
48	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	5	2	0	0		2
49	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	16	15	22	1	PRANATA KOMPUTER	38
	JUMLAH						11.294

Sumber Data : BKD Kab. Sidoarjo

5. Kondisi Sarana dan Prasarana

Selain itu instrumen penunjang lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Kondisi sarana dan prasarana untuk setiap perangkat daerah adalah sebagai berikut :

NO	OPD	BARANG (UNIT)			NILAI (Rp)		
		BAIK	RUSAK BERAT (Aset Lainnya)	JUMLAH	BAIK	RUSAK BERAT (Aset Lainnya)	JUMLAH
1	Sekretariat Daerah	5,012	1,079	6,091	120,522,267,225.56	5,793,812,713.49	126,316,079,939.05
2	Sekretariat DPRD	4,020	227	4,247	49,289,385,256.00	922,739,810.00	50,212,125,066.00
3	Inspektorat	677	199	876	21,026,668,159.26	614,979,015.00	21,641,647,174.26
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	203,368	43,349	246,717	2,083,766,094,442.56	114,294,353,886.64	2,198,060,448,329.20





5	Dinas Kesehatan	26,844	11,827	38,671	379,516,062,232.51	32,381,428,150.20	411,897,490,382.71
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3,864	1,217	5,081	11,103,955,787,720.40	272,032,186,665.51	11,375,987,974,385.90
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	2,056	169	2,225	1,010,830,321,840.76	5,414,202,190.00	1,016,244,524,030.76
8	Satuan Polisi Pamong Praja	1,013	46	1,059	25,670,569,216.80	423,395,270.00	26,093,964,486.80
9	Dinas Sosial	1,237	127	1,364	27,815,216,489.91	1,403,185,729.67	29,218,402,219.58
10	Dinas Tenaga Kerja	535	228	763	7,367,463,477.00	1,479,245,393.10	8,846,708,870.10
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Keluarga Berencana	1,347	704	2,051	19,500,490,948.00	3,103,368,451.00	22,603,859,399.00
12	Dinas Pangan dan Pertanian	2,226	3	2,229	79,110,954,510.94	1,378,216,449.89	80,489,170,960.83
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	6,344	1,117	7,461	663,816,811,786.53	16,501,426,880.34	680,318,238,666.87
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	936	147	1,083	20,664,284,843.72	2,220,417,419.28	22,884,702,263.00
15	Dinas Perhubungan	4,828	1,285	6,113	106,964,824,562.20	6,168,359,070.10	113,133,183,632.30
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1,114	157	1,271	33,134,774,543.34	1,105,875,270.00	34,240,649,813.34
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	490	81	571	14,220,452,824.16	344,245,382.00	14,564,698,206.16
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,616	181	1,797	151,403,824,779.98	934,186,261.00	152,338,011,040.98
19	Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata	920	1,029	1,949	224,964,261,297.32	21,663,668,563.00	246,627,929,860.32
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	32,049	7,540	39,589	27,484,748,857.44	1,138,078,490.56	28,622,827,348.00
21	Dinas Perikanan	1,597	78	1,675	212,226,334,001.31	3,471,952,724.00	215,698,286,725.31
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2,656	666	3,322	472,318,995,896.85	4,919,471,065.44	477,238,466,962.29
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,384	253	1,637	10,950,423,754.00	2,042,258,353.00	12,992,682,107.00
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,616	217	1,833	172,623,406,918.45	5,685,721,526.00	178,309,128,444.45
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	2,007	325	2,332	30,516,670,542.22	1,860,853,280.00	32,377,523,822.22
26	Badan Kepegawaian Daerah	1,604	433	2,037	34,355,448,316.00	2,192,347,990.00	36,547,796,306.00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,245	31	1,276	12,513,350,255.27	212,842,800.00	12,726,193,055.27
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,038	377	1,415	41,337,699,378.37	7,042,628,313.45	48,380,327,691.82
29	Rumah Sakit Umum Daerah	25,997	8,740	34,737	935,588,210,787.02	35,698,654,043.31	971,286,864,830.33
30	Kecamatan Sidoarjo	3,008	214	3,222	140,671,483,057.84	461,412,800.00	141,132,895,857.84
31	Kecamatan Candi	660	151	811	9,489,313,782.71	436,313,436.84	9,925,627,219.55





32	Kecamatan Buduran	694	99	793	5,818,018,767.00	256,609,446.84	6,074,628,213.84
33	Kecamatan Gedangan	366	122	488	7,005,902,021.00	266,662,543.84	7,272,564,564.84
34	Kecamatan Sedati	501	314	815	5,546,227,233.00	534,907,004.84	6,081,134,237.84
35	Kecamatan Waru	735	158	893	10,805,525,561.75	244,636,286.80	11,050,161,848.55
36	Kecamatan Taman	2,268	226	2,494	113,650,611,958.00	1,705,767,336.84	115,356,379,294.84
37	Kecamatan Krian	1,273	51	1,324	61,210,033,491.00	685,005,550.84	61,895,039,041.84
38	Kecamatan Wonoayu	732	161	893	6,374,757,403.00	342,022,486.84	6,716,779,889.84
39	Kecamatan Sukodono	802	43	845	8,573,541,428.84	139,343,765.00	8,712,885,193.84
40	Kecamatan Balongbendo	479	156	635	8,509,143,773.00	288,161,786.84	8,797,305,559.84
41	Kecamatan Tarik	743	282	1,025	7,888,095,928.84	194,688,298.00	8,082,784,226.84
42	Kecamatan Tulangan	505	11	516	7,795,091,672.00	88,588,000.00	7,883,679,672.00
43	Kecamatan Prambon	940	43	983	8,063,649,897.54	221,331,036.84	8,284,980,934.38
44	Kecamatan Krembung	636	18	654	7,786,431,258.84	47,964,000.00	7,834,395,258.84
45	Kecamatan Tanggulangin	917	33	950	7,808,291,668.04	403,465,450.00	8,211,757,118.04
46	Kecamatan Jabon	261	65	326	7,630,497,622.00	124,239,986.84	7,754,737,608.84
47	Kecamatan Porong	791	169	960	28,767,544,972.37	1,983,410,300.00	30,750,955,272.37
48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	424	65	489	3,636,108,795.00	348,923,000.00	3,985,031,795.00
	TOTAL	356,375	84,213	440,588	18,550,486,075,155.60	561,217,553,673.18	19,111,703,628,828.80

Sumber Data : BPKAD Kab. Sidoarjo



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A.	RPJMD KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 - 2021
----	---

RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Berpijak pada permasalahan pembangunan, serta berbagai dinamika yang terjadi baik di tingkat internal maupun eksternal, maka RPJMD Kabupaten Sidoarjo berawal dari isu strategis sebagai berikut :

1. Lemahnya kapasitas kelembagaan dalam tata kelola pemerintahan;
2. Lemahnya inovasi untuk menunjang pelayanan publik pada penyelenggaraan pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa;
3. Kualitas dan pemerataan pendidikan rendah;
4. Belum optimalnya layanan dan Akses Kesehatan;
5. Rendahnya aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat miskin;
6. Perselisihan perusahaan dan tenaga kerja meningkat;
7. Komitmen Terhadap Reformasi Birokrasi;
8. Letak Kabupaten yang Strategis dengan ibukota provinsi dan wilayah Gerbangkertasusila;
9. Iklim investasi yang Kondusif;
10. Pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam seiring dengan pesatnya sektor industri dan perdagangan



11. Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan
12. Pencegahan konflik berbau SARA, dan Politik
13. Sarana dan prasarana kegiatan Kepemudaan yang masih minim
14. Degradasi Kebudayaan Lokal
15. Jumlah PMKS yang meningkat
16. Belum berkembangnya sektor industri kreatif dalam mendorong sektor pariwisata
17. Potensi Unggulan pada Sektor Industri pengolahan, ekonomi kreatif dan perikanan
18. Peningkatan pada penerimaan Retribusi dan pajak daerah
19. Afirmasi pusat terhadap infrastruktur
20. Arah dan Komitmen Pemerintah dalam Mewujudkan Industri Ramah Lingkungan
21. Belum produktifnya usaha ekonomi dan Kemandirian Pemerintahan Desa
22. Penanggulangan Banjir
23. Optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama dengan Swasta
24. Penanggulangan kemiskinan
25. LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)
26. Interchanges Tol dengan kawasan wilaah barat sidoarjo
27. Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT)
28. RTRW
29. Program 100-0-100
30. Frontage Road (FR)
31. Pelayanan Persampahan
32. Pengembangan kawasan geowisata
33. Pengembangan kawasan aerocity / aerotropolis
34. Smart City
35. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
36. Limbah domestik
37. Kemacetan



38. Permukiman
39. Pencemaran industri
40. Lemahnya UMKM
41. Pasar tradisional

1	VISI DAN MISI
---	----------------------

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya saing, dengan mempertimbangkan potensi daerah, tantangan maupun ancaman di masa mendatang maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama – sama dengan masyarakat telah menetapkan visi, misi, dan strategi dalam mencapai harapan yang ingin diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021.

a. Visi

Memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah serta kendala yang dihadapi pada periode pemerintahan Tahun 2010 - 2015, serta prakiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2016 – 2021. Selain itu juga mengacu pada visi 20 tahun dalam RPJPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2006 – 2025, maka rumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo periode tahun 2016 – 2021, yaitu :

**” KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, SEJAHTERA, MANDIRI
DAN BERKELANJUTAN”.**

Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokok - pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana berikut:

- ***Inovatif*** ; Melakukan proses pembangunan dengan menerapkan berbagai inovasi di bidang pembangunan fisik dan non fisik untuk

mendukung akselerasi pembangunan menuju Kabupaten Sidoarjo yang Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

- **Sejahtera** ; Makmur, aman, nyaman dan sentosa serta terlepas dari segala macam gangguan (tenteram), baik material maupun spiritual pada dimensi ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM. Unsur visi ini menegaskan bahwa Pasangan Kepala Daerah terpilih (KDH) untuk senantiasa mendedikasikan diri pada perjuangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo sampai tahun 2021 pada segala aspek kehidupan. Aspek kehidupan seperti, kesehatan, pendidikan, ekonomi, keadilan sosial budaya, stabilitas keamanan, ketertiban, kedamaian dan peradaban akan mencapai puncak sehingga masyarakat akan semakin beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, demokratis dan berbudaya tinggi yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
- **Mandiri** ; Cita-cita dan semangat kerja bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo harus mampu mewujudkan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara layak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan.
- **Berkelanjutan** ; Proses pembangunan yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (Brundtland Report, PBB 1987). Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development) merupakan komitmen global dimana proses pembangunan tidak semata-mata mengeksploitasi alam secara maksimal demi mengejar kebutuhan masa kini saja, tetapi juga internalisasi konsep dan pola pembangunan yang memperdulikan kelestarian lingkungan dan sosial serta dampak yang lain bagi generasi masa depan. Unsur visi ini sangat strategis dan senada dengan komitmen global tentang *climate change*.

b. Misi

Sebagai penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021, maka rumusan visi tersebut perlu dioperasionalkan ke dalam beberapa Misi. Setiap misi dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya. Setiap unsur visi dijabarkan ke dalam tiap misi, sebagai berikut :

MISI	UNSUR VISI	PENJABARAN
Misi 1	Mandiri	Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan
Misi 2	Mandiri	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat
Misi 3	Sejahtera	Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan Pendidikan dan kesehatan
Misi 4	Sejahtera	Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul Karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban
Misi 5	Berkelanjutan	Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait 5 misi utama Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Misi 1: Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.

Salah satu tolok ukur terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah Indeks Good Governance dan Indeks Reformasi Birokrasi. Misi I Kabupaten Sidoarjo difokuskan untuk pencapaian tujuan diatas, dengan menetapkan 2 sasaran yakni Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi; .

Misi 2: Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk mencapai Misi II ditetapkan 1 Tujuan dan 2 Sasaran dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing. Untuk mencapai hal tersebut dapat dicapai melalui 2 sasaran yaitu Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat; Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

Misi 3: Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

Misi III Kabupaten Sidoarjo terfokus terhadap pelayanan dasar khususnya pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator utama sebagai tolok ukur keberhasilan Misi III. Berdasarkan 3 indeks pembentuk IPM, Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan secara representatif menggambarkan pencapaian IPM pada Misi III. Selain itu sasaran diarahkan terhadap pendidikan yang berkualitas, merata, dan berdaya saing dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Misi 4: Meningkatnya Tatahidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlak Karimah, Berlandaskan Keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban.

Perspektif Misi IV lebih diarahkan terhadap peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat, yang menggunakan tolok ukur capaian dengan menggunakan Indeks Kebahagiaan, Indeks Rasa Aman, Indeks Resiko Bencana, dan Indeks Pembangunan Gender. Misi IV dapat dicapai dengan meningkatkan harmonisasi dan keamanan sosial.

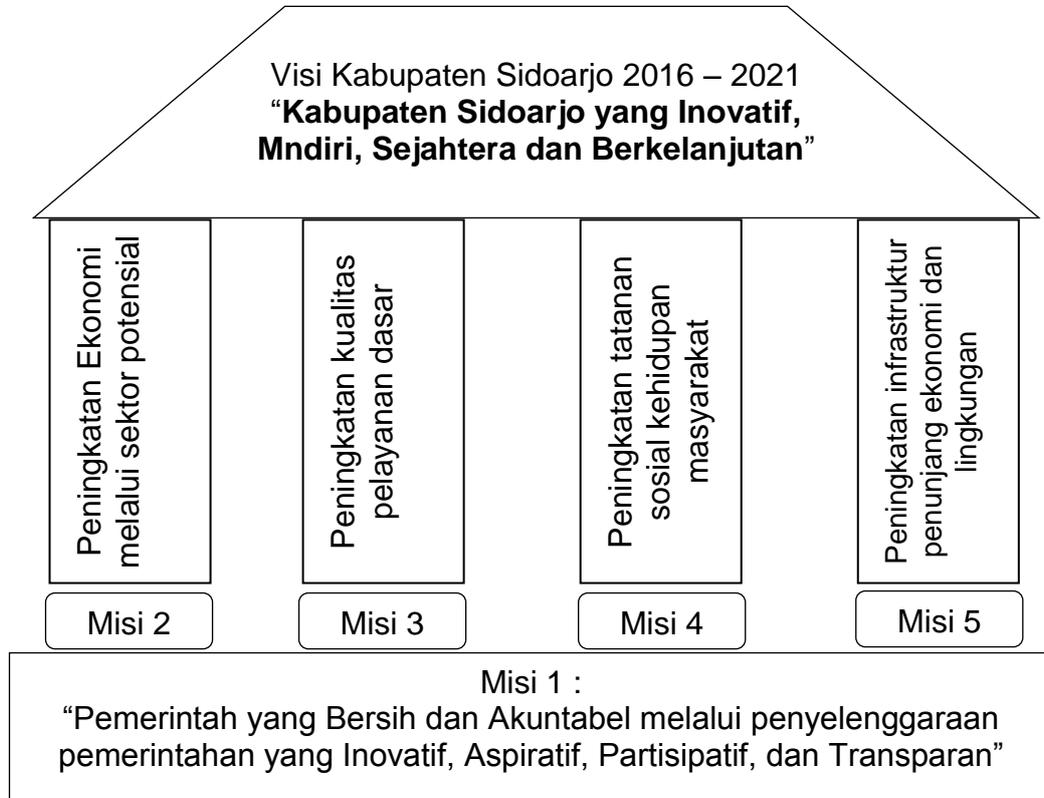
Misi 5: Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Misi terakhir adalah terfokus terhadap peningkatan infrastruktur sebagai penunjang ekonomi, namun tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan

Menindaklanjuti terhadap 5 Misi Kabupaten Sidoarjo yang mendukung tercapainya Visi Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 - 2021, maka disusunlah konsep kerangka yang merupakan kerangka arsitektur kinerja dalam pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 – 2021. Kerangka kinerja yang juga sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar misi dalam pencapaian visi, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel II.1

Kerangka Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021



Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

Pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, juga dipaparkan 10 (sepuluh) Program Prioritas Bupati yang antara lain, sebagai berikut :

1. Pendidikan Dasar 9 Tahun gratis dan berkualitas
2. Percepatan pembangunan infrastruktur, seperti gedung pemerintahan satu atap, frontage road, penanganan banjir, dan lain sebagainya
3. Pembangunan RSUD wilayah barat
4. Pembangunan Eco Industry
5. Penguatan kemandirian desa
6. Sidoarjo “Smart City”
7. Pengelolaan lingkungan yang sehat dan terintegratif
8. Modernisasi pasar tradisional
9. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kesehatan

10. Beasiswa pelajar berprestasi dan pasca sarjana bagi pendidik

2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan 5 misi yang telah diuraikan di depan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021, sebagai berikut :

a) Tujuan

1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan.

Indikator kinerja :

- a. Indeks Good Governance
- b. Indeks Reformasi Birokrasi

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing

Indikator kinerja :

- a. Pertumbuhan Ekonomi
- b. Indeks GINI

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Indikator Kinerja : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

4. Mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang berbudaya, rukun, aman, tertib, nyaman dan berkeadilan

Indikator : Indeks Kebahagiaan

5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup

Indikator :

- a. Indeks Infrastruktur
- b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

b) Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan.
Indikator kinerja :
 - a. Opini Atas Audit BPK
 - b. Nilai SAKIP Kabupaten
 - c. Status Kinerja EKPPD
 - d. Tingkat Maturitas SPIP
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Indikator kinerja :
 - a. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
 - b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat
Indikator kinerja : PDRB Perkapita
4. Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat
Indikator kinerja :
 - a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
 - b. Tingkat Kemiskinan
 - c. Persentase Desa Maju
5. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
Indikator kinerja :
 - a. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
 - b. Rata – Rata Lama Sekolah (RTLs)
6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Indikator kinerja : Angka Harapan Hidup
7. Meningkatnya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum yang berkeadilan
Indikator kinerja :
 - a. Indeks Rasa Aman
 - b. Indeks Resiko Bencana
 - c. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah
Indikator kinerja :
 - a. Persentase Jalan Kondisi Mantap
 - b. Persentase Penurunan Luas Area Rawan Genangan Banjir
9. Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup
Indikator kinerja :
 - a. Indeks Kualitas Air
 - b. Indeks Kualitas Udara
 - c. Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi

Berikut keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran beserta indikator keberhasilannya dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, sebagaimana tabel :

Tabel II.2**Konsistensi Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.	T.1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan	1. Indeks Good Governance	S1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Opini atas audit BPK 2. Nilai SAKIP Kabupaten 3. Nilai Kinerja EKPPD 4. Tingkat Maturitas SPIP
			2. Indeks Reformasi Birokrasi	S.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) 2. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
2	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan,	T.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	1. Pertumbuhan Ekonomi	S.3 Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	PDRB Perkapita
			2. Indeks GINI	S.4 Meningkatnya Pemerataan	1. Tingkat Pengangguran Terbuka

	pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat			Distribusi Pendapatan Masyarakat	2. Tingkat Kemiskinan 3. Persentase Desa Maju
3	Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	T.3 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	S.5 Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 2. Rata-Rata Lama Sekolah (RTLS)
				S.6 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup
4	Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlakul Karimah, Berlandaskan Keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban.	T.4 Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan	Indeks Kebahagiaan	S. 7 Meningkatkan Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan	1. Indeks Rasa Aman
					2. Indeks Resiko Bencana
					3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
5	Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.	T.5 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian Lingkungan Hidup	1. Indeks Infrastruktur	S.8 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	1. Persentase Jalan Kondisi Mantap
			2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		S.9 Meningkatkan kelestarian Lingkungan Hidup
					1. Indeks Kualitas Air
					2. Indeks Kualitas Udara
					3. Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi

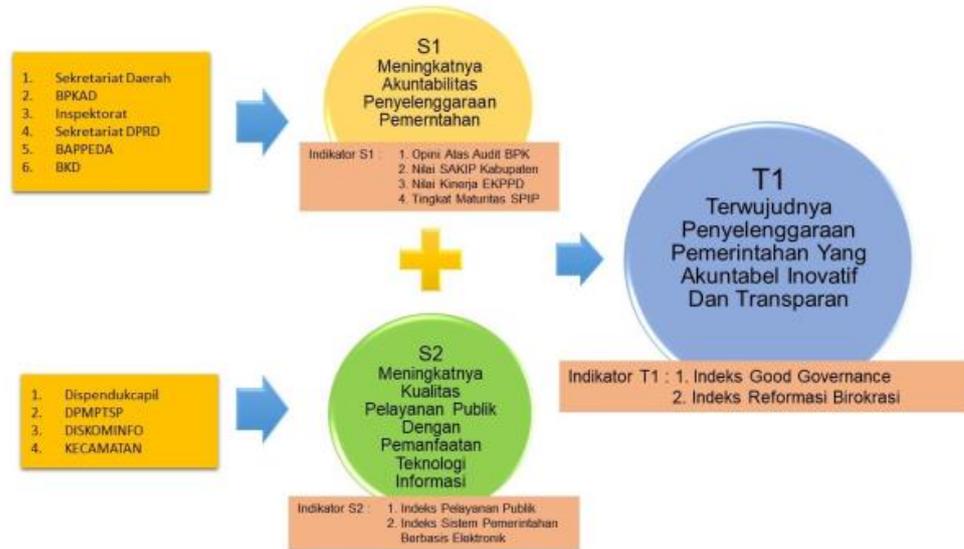
Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

b. Keselarasan Kinerja

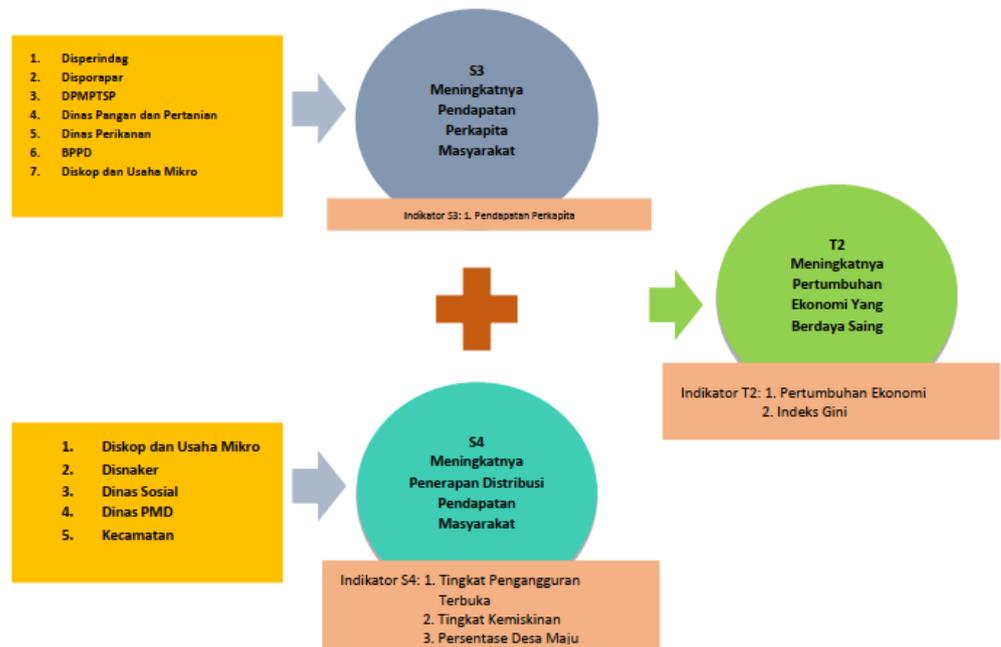
Untuk mewujudkan keselarasan kinerja RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021 dengan kinerja Renstra OPD Tahun 2016 – 2021, maka disusun matriks keselarasan kinerja untuk menjamin bahwa

terdapat keterkaitan pencapaian kinerja OPD dengan kinerja Kepala Daerah.

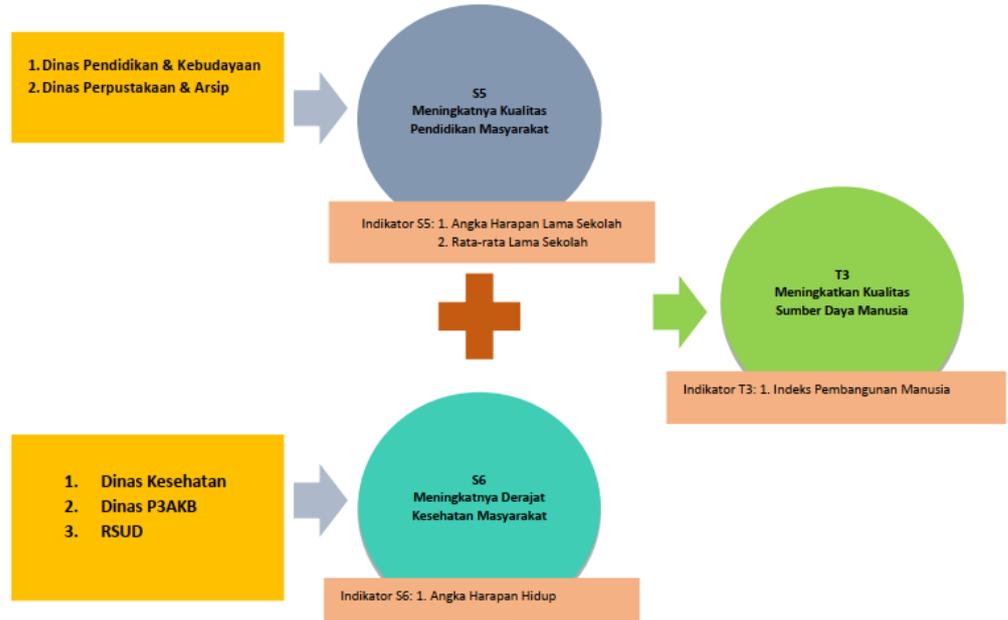
• Keselarasan Kinerja MISI – 1



• Keselarasan Kinerja MISI – 2



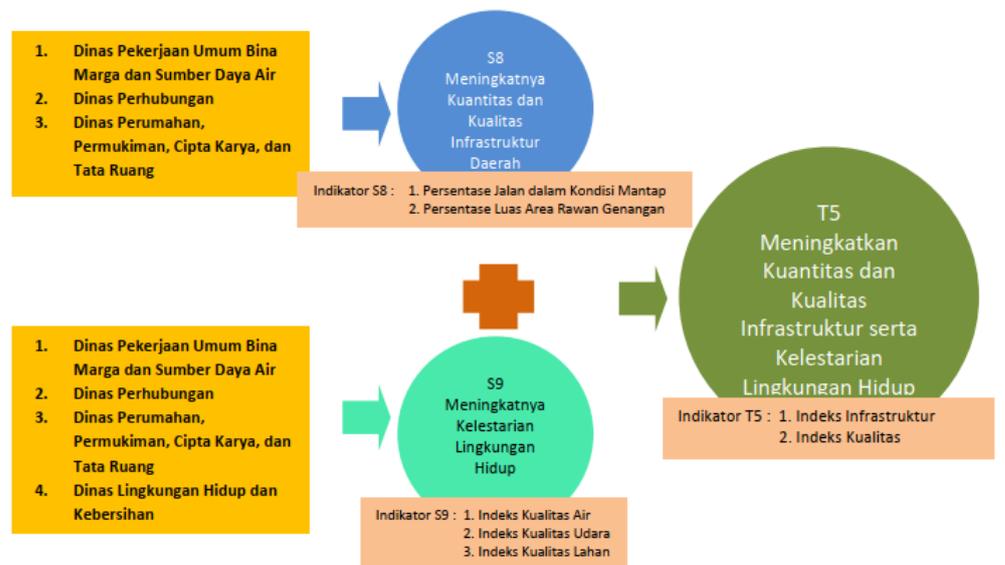
• Keselarasan Kinerja MISI – 3



• Keselarasan Kinerja MISI – 4



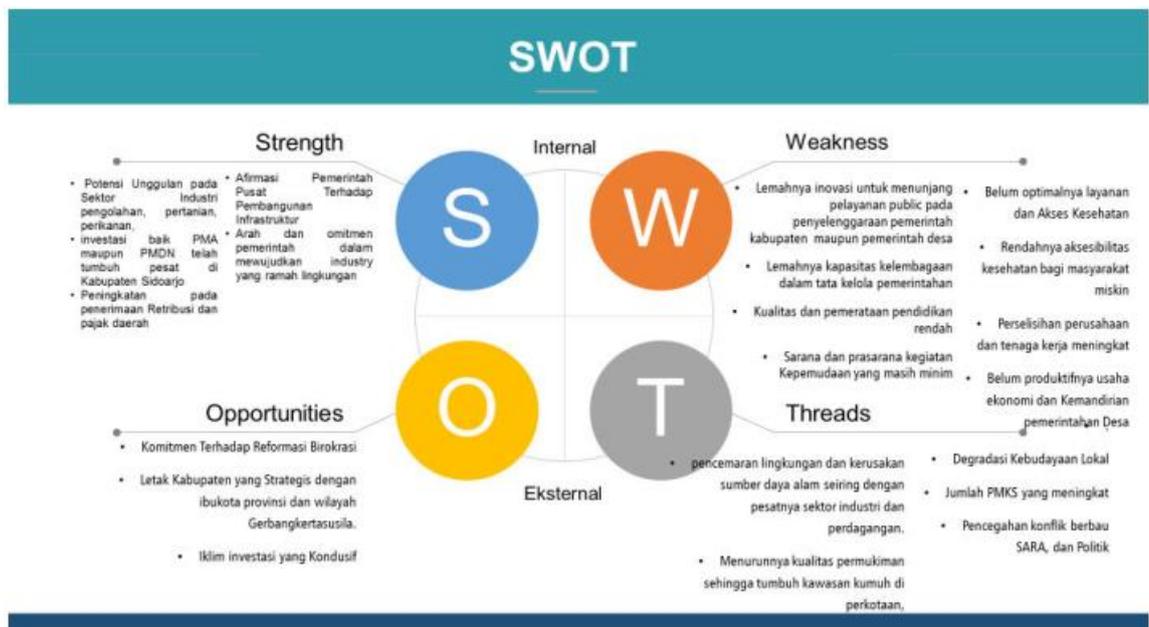
• Keselarasan Kinerja MISI – 5



c. Strategi Pembangunan Daerah

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent* adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu.

Berikut analisa SWOT dari isu – isu strategis pembangunan Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana gambar berikut :



Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut :



Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dirumuskan dalam strategi, sebagai berikut :

- Strategi S-O ; yang ditetapkan adalah Penguatan Ekonomi yang berdaya saing melalui pengembangan sektor potensial daerah, pendapatan daerah, dan investasi yang berbasis *eco Industri*.

Dimaksudkan pada strategi ini yaitu Industri olahan, UMKM, Pertanian dan Perikanan kelautan merupakan sektor sektor potensial Kabupaten Sidoarjo yang perlu didorong oleh pemerintah. Sebab, sektor-sektor potensial tersebut menjadi kekuatan dari pertumbuhan ekonomi kabupaten Sidoarjo. agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya akibat perubahan kondisi ekonomi makro, namun juga terbangun dari kapasitas ekonomi masyarakat (sektor riil) khususnya pada sektor, industri olahan, UMKM, pertanian, Perikanan dan kelautan. Pajak daerah dan restribusi merupakan salah satu penyumbang terbesar dari pendapatan asli daerah, hal ini tentunya perhatian dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Kabupaten Sidoarjo. investasi baik PMA maupun PMDN telah tumbuh

pesat di Kabupaten Sidoarjo, tentunya perlunya menciptakan lingkungan iklim investasi kondusif

- Strategi S-T ; yang ditetapkan adalah Harmonisasi pembangunan infrastruktur fisik penunjang ekonomi dan lingkungan hidup dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektivitas antar wilayah dan infrastruktur strategis penunjang perekonomian, serta pembangunan yang patuh akan rencana tata ruang. Sesuai dengan Konsep *Sustainable Development*, maka pembangunan lingkungan hidup menjadi salah satu unsur yang perlu perhatian guna untuk generasi mendatang dan menjaga dari dampak perubahan iklim

- Strategi W-O ; yang ditetapkan adalah Mengembangkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah melalui Smart Government.

Pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam mendorong Inovasi swasta dan masyarakat (kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dsb). Secara internal, nilai inovasi ditanamkan dalam setiap aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah melalui reformasi birokrasi untuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini mengingat Reformasi Birokrasi merupakan prasyarat utama tatakelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel. Reformasi birokrasi merupakan pintu masuk seluruh elemen pemerintah dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan pendekatan pembangunan yang inovatif secara substansial. Bisnis proses pemerintahan merupakan penerjemahan dari tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi, serta mempertanggungjawabkan hasil-hasil (outcome) pembangunan daerah. Agresifitas strategi ini terletak pada Perangkat Daerah memberikan sentuhan inovasi pada setiap aktivitas pembangunan. Smart governance prinsip dasar yaitu mengkolaborasikan dan mengikutsertakan seluruh lapisan

masyarakat, mengembangkan operasional, meningkatkan manajemen organisasi, membuat system database yang dapat diakses secara umum, mengolah informasi yang up to date, menggunakan teknologi yang mutakhir, adanya koordinasi stakeholder

- Strategi W-T (1) ; yang ditetapkan adalah Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.

Membangun generasi yang profesional menjadi prioritas utama dalam Kabupaten Sidoarjo mengingat daya saing dan kompetensi semakin meningkat. Kualitas pendidikan yang baik selaras dengan akses seluruh lapisan masyarakat dapat menjangkau serta pemerataan pendidikan pada wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya yang bertujuan untuk mencegah, merawat dan mengobati, pemulihan kesehatan terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, upaya tersebut didorong dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keterjangkauan seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Masyarakat secara merata.

- Strategi W-T (2) ; yang ditetapkan adalah Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan bereorientasi terhadap penguatan nilai wawasan kebangsaan.

pada strategi ini mencipatkan adanya social sustainabilty, prinsip utamanya yaitu equity, individu mempunyai akses berpartisipasi secara penuh. kedua, *social inclusion and interaction*, adanya hak untuk kesempatan berpartisipasi baik meliputi partisipasi dalam pembangunan maupun dalam berpolitik. Ketiga, security jaminan untuk lingkungan yang aman dan mendukung. Terakhir yaitu adaptability kelenturan terhadap komunitas. Strategi ini juga menciptakan adanya penguatan pada demokrasi Pancasila.

Berdasarkan analisis diatas, strategi pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah melalui Smart Government.
2. Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui pengembangan sektor potensial daerah, pendapatan daerah, dan investasi yang berbasis *Eco Industry*.
3. Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan bereorientasi terhadap penguatan nilai wawasan kebangsaan.
5. Harmonisasi pembangunan infrastruktur fisik penunjang ekonomi dan lingkungan hidup dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan

Strategi tersebut disusun dalam rangka pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah. Setiap strategi harus mampu di orientasikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang dituju, dan mendukung pencapaian misi yang telah ada. Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Berikut ini adalah peruntukan dan fungsi strategi pembangunan terhadap sasaran pembangunan yang ingin dicapai :

Tabel II.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 – 2021

Visi : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan		
Misi I "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan"		
Tujuan	Sasaran	Strategi
T.1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan	S1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Strategi: Mengembangkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah melalui Smart Government
	S.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	
Misi II "Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat"		
T.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	S.3 Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	Strategi: Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui pengembangan sektor potensial daerah, pendapatan daerah, dan investasi yang berbasis Eco Industry.
	S.4 Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	
Misi III "Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan"		
T.3 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	S.5 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Strategi: Mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan
	S.6 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	

Misi IV "Meningkatnya Tataan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban"		
T.4 Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan	S. 7 Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan	Strategi: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif dan bereorientasi terhadap penguatan nilai wawasan kebangsaan
Misi V "Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan"		
T.5 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian Lingkungan Hidup	S.8 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Strategi: Harmonisasi pembangunan infrastruktur fisik penunjang ekonomi dan lingkungan hidup dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan
	S.9 Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

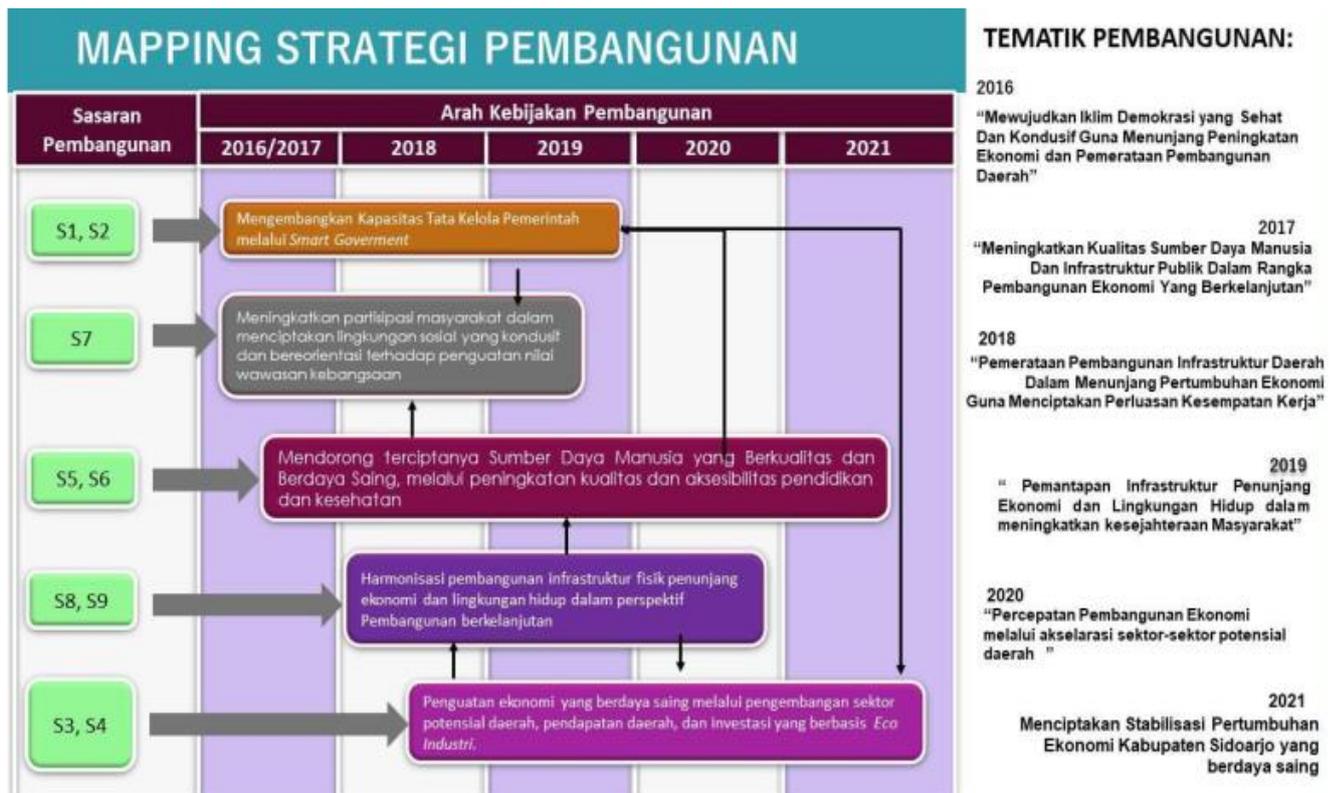
d. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan serta prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan.

Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka arah kebijakan tahunan dituangkan dalam tema pembangunan yang ditetapkan sebagai berikut :

Tahun	Tema dan Prioritas Pembangunan
Tahun 2016	Mewujudkan Iklim Demokrasi yang Sehat Dan Kondusif Guna Menunjang Peningkatan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Daerah
Tahun 2017	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Publik Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan
Tahun 2018	Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Daerah Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Guna Menciptakan Perluasan Kesempatan Kerja
Tahun 2019	Pemantapan Infrastruktur Penunjang Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat
Tahun 2020	Percepatan Pembangunan Ekonomi melalui akselerasi sektor-sektor potensial daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah
Tahun 2021	Menciptakan Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo yang berdaya saing

Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Berikut tematik pembangunan tahunan selama 5 tahun perencanaan (tahun 2016–2021) sebagaimana gambar :



Merujuk pada strategi pelaksanaan arah kebijakan diatas, maka arah kebijakan tahunan yang dituangkan tema pembangunan dan prioritas pembangunan di tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel II.4

Tema dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2019

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS
Tema Pembangunan Tahun 2019 :	
"Pemantapan Infrastruktur Penunjang Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat"	
Prioritas Pembangunan Tahun 2019 :	
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata kelola pemerintahan daerah yang baik	1. Program pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal 2. Program peningkatan mutu dan relevansi layanan pendidikan 3. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
2. Meningkatkan inovasi, kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah	



3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	4. Program pendidikan sekolah dasar 5. Program pendidikan sekolah menengah pertama
4. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, demokratis, berbudaya dan agamis	6. Program perluasan dan aksesibilitas Pendidikan 7. Program Penyediaan Dana BOSREG 8. Program pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca
5. Optimalisasi pembangunan system infrastruktur daerah yang terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	9. Program pelayanan kesehatan masyarakat 10. Program pengembangan sumber daya kesehatan 11. Program upaya kesehatan masyarakat 12. Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM 13. Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta Pendapatan Pasar rakyat 14. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan pedagang informal 15. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 16. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Garam 17. Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan 18. Program Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 19. Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Hasil Hewan 20. Program Peningkatan Ketahanan pangan daerah 21. Program Pengembangan Objek, promosi, dan usaha pariwisata 22. Program Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 23. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi





	<ol style="list-style-type: none">24. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi25. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan26. Program peningkatan keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat27. Program Penetapan Pajak Daerah28. Program Pengendalian Pajak Daerah29. Program pengelolaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera30. Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak31. Program peningkatan pelayanan pada badan layanan umum daerah32. Program Pengelolaan, Fasilitasi dan Implementasi Teknologi Informatika33. Program Peningkatan Kualitas Layanan Data Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)34. Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan35. Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan irigasi, pematusan dan pengendalian Banjir36. Program pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman37. Program penataan bangunan38. Program peningkatan pelayanan angkutan39. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan40. Program Pemberdayan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya41. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial42. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial43. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja44. Program peningkatan kesempatan kerja dan penyelenggaraan transmigrasi45. Program pengembangan dan perlindungan ketenagakerjaan
--	--



	<ol style="list-style-type: none">46. Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat47. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan48. Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan49. Program Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan hubungan antar Lembaga50. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan51. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penerangan jalan dan lingkungan52. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH53. Program Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah54. Program Perencanaan Pembangunan Daerah55. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan56. Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN57. Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran58. Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan
--	--

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

e. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) Nomor 09 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sehingga pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode tahun 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan.

Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana disajikan dalam table berikut :

Tabel II.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sidoarjo

No.	Indikator Kinerja Utama
1.	Indeks Good Governance
2.	Indeks Reformasi Birokasi
3.	Pertumbuhan Ekonomi
4.	Indeks GINI
5.	Tingkat Kemiskinan
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
7.	Indeks Infrastruktur
8.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
9.	Indeks Kebahagiaan
10.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

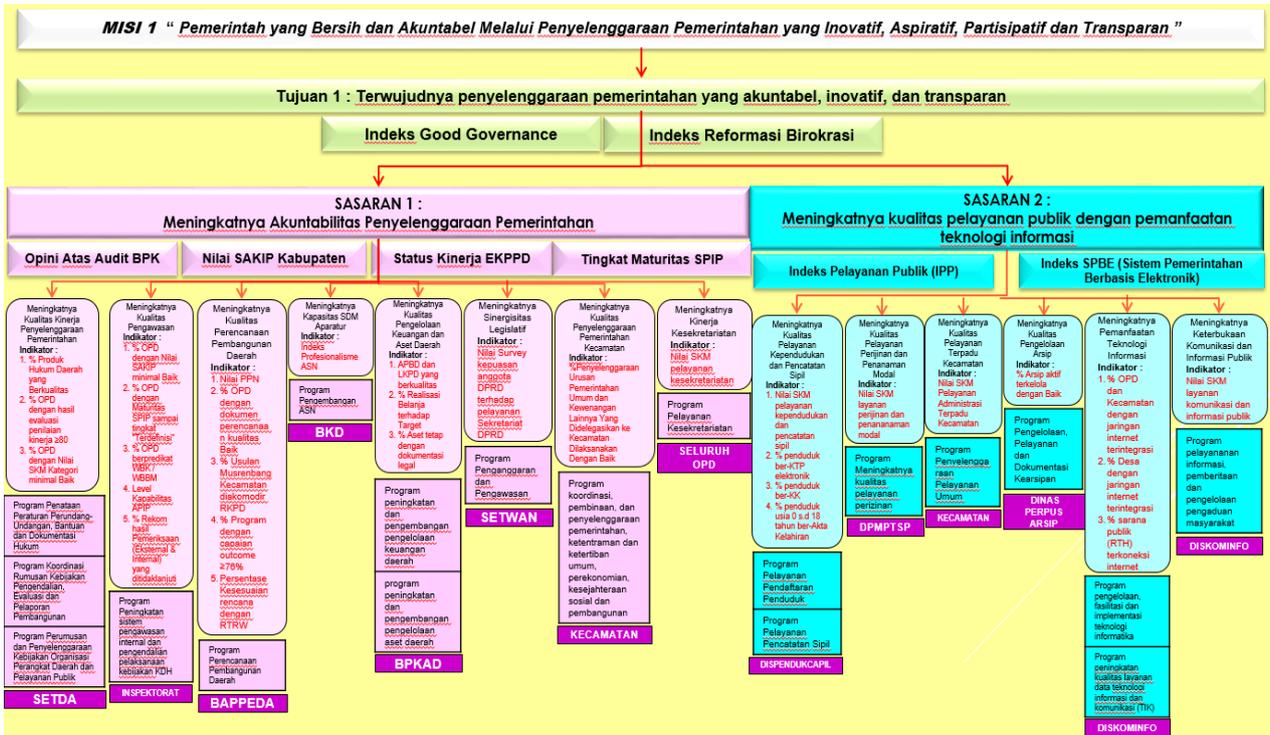
Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

B.	CASCADING KINERJA
-----------	--------------------------

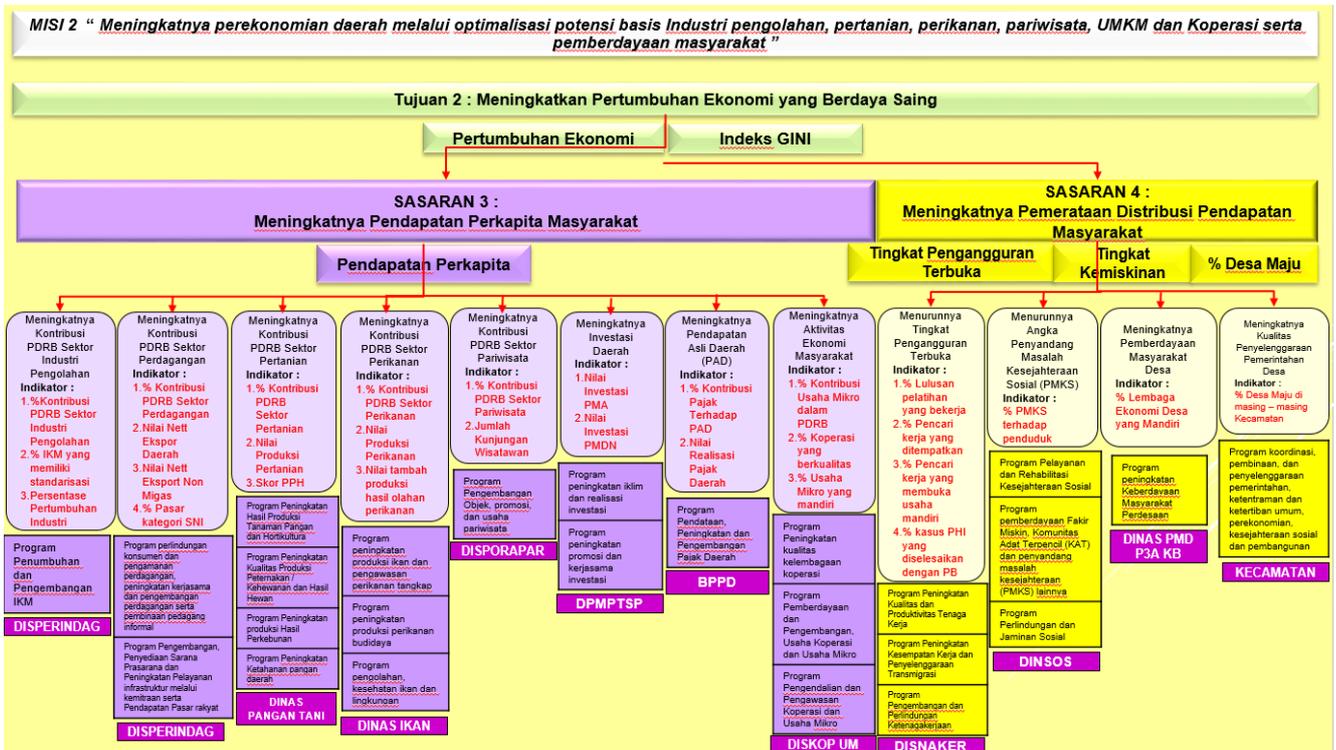
Dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pembangunan daerah, maka Kabupaten Sidoarjo menyusun Cascading Kinerja Daerah. Cascading tersebut tersusun dalam matriks keselarasan kinerja pembangunan daerah yang merupakan kinerja berjenjang dalam mencapai kinerja utama dengan memperhatikan aspek *kausalitas* / hubungan sebab akibat dan *alignment* / keselarasan. Dengan adanya cascading kinerja ini akan terwujud kinerja yang memadai dan sistematis dalam pencapaiannya.



Matriks Keselarasan Kinerja Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam tiap Misi Kabupaten Sidoarjo, adalah sebagai berikut :
Cascading Kinerja Misi 1 :

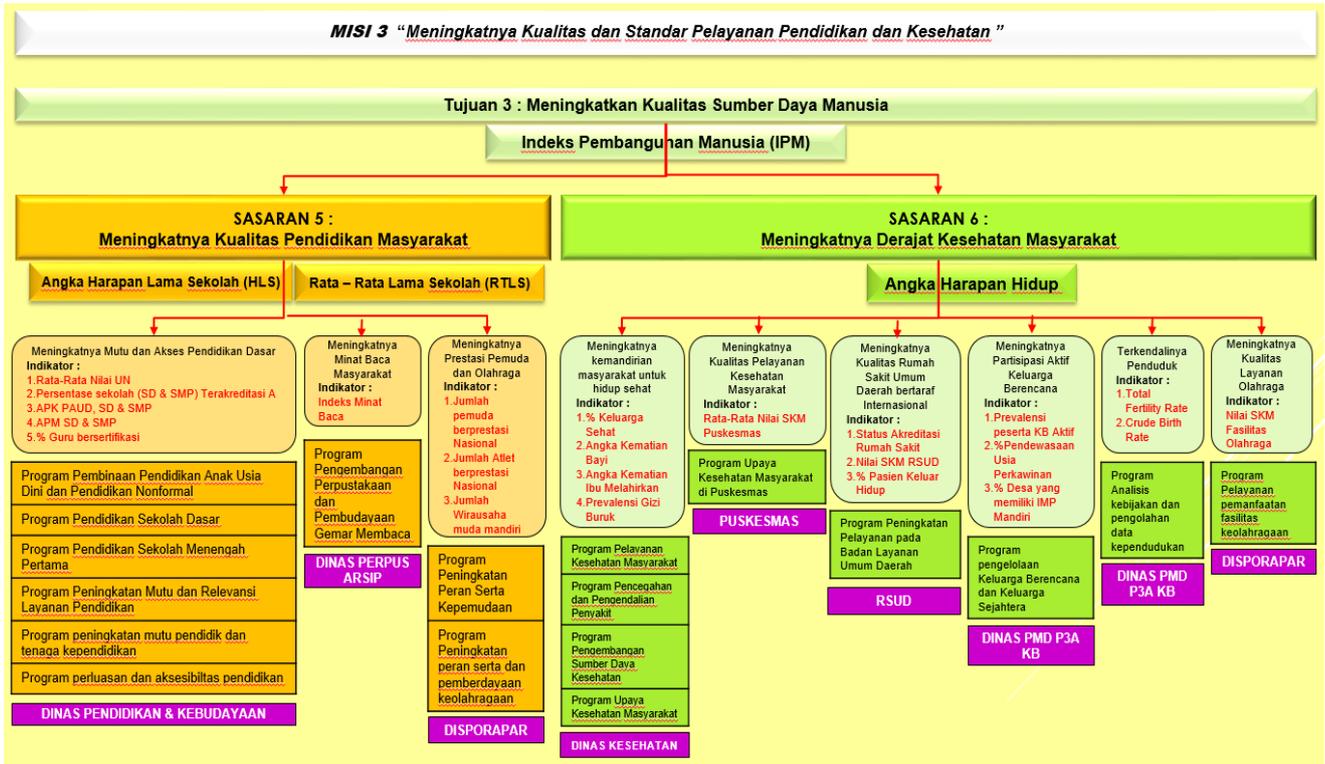


Cascading Kinerja Misi 2 :

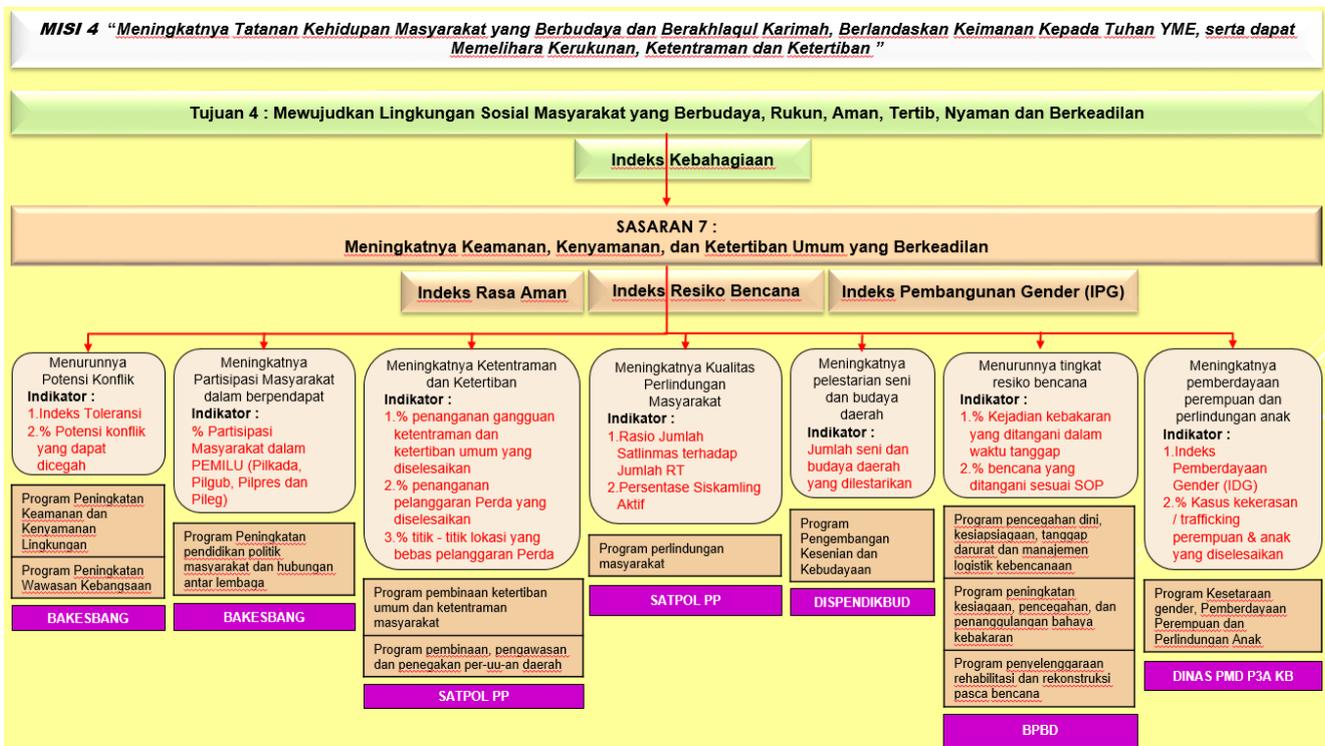




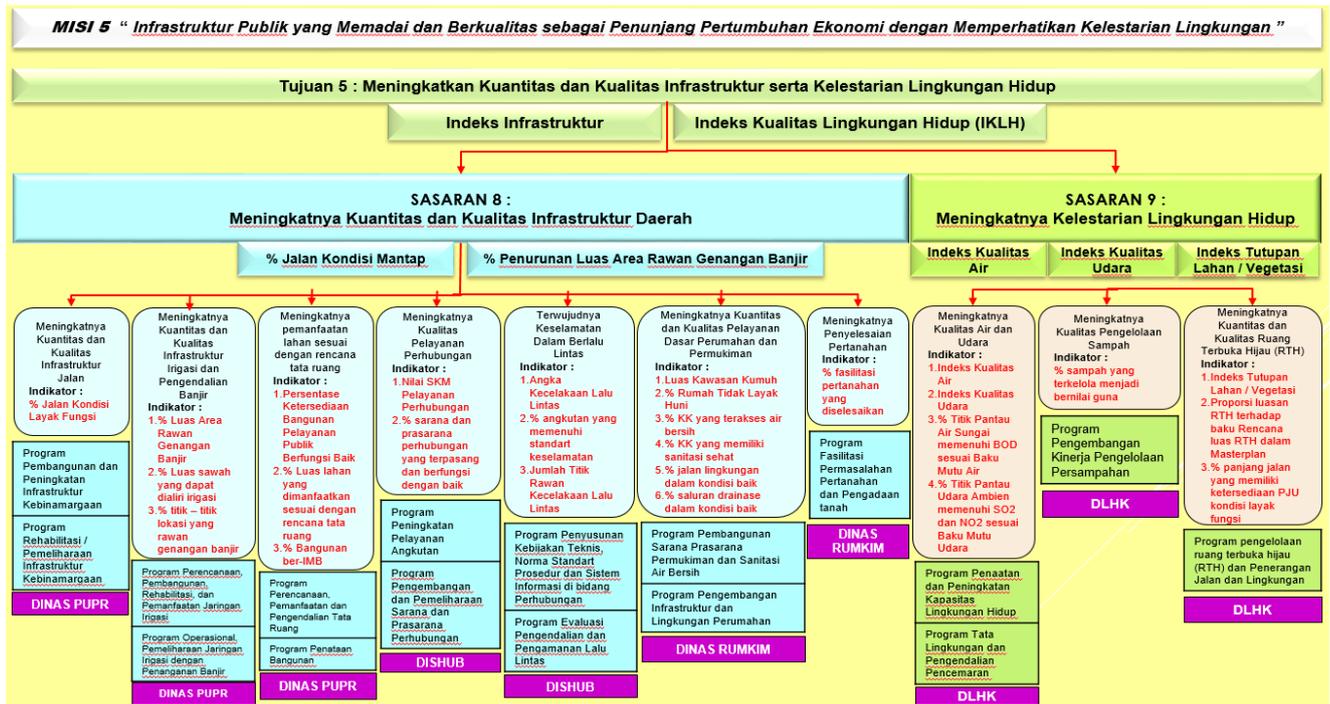
Cascading Kinerja Misi 3 :



Cascading Kinerja Misi 4 :



Cascading Kinerja Misi 5 :

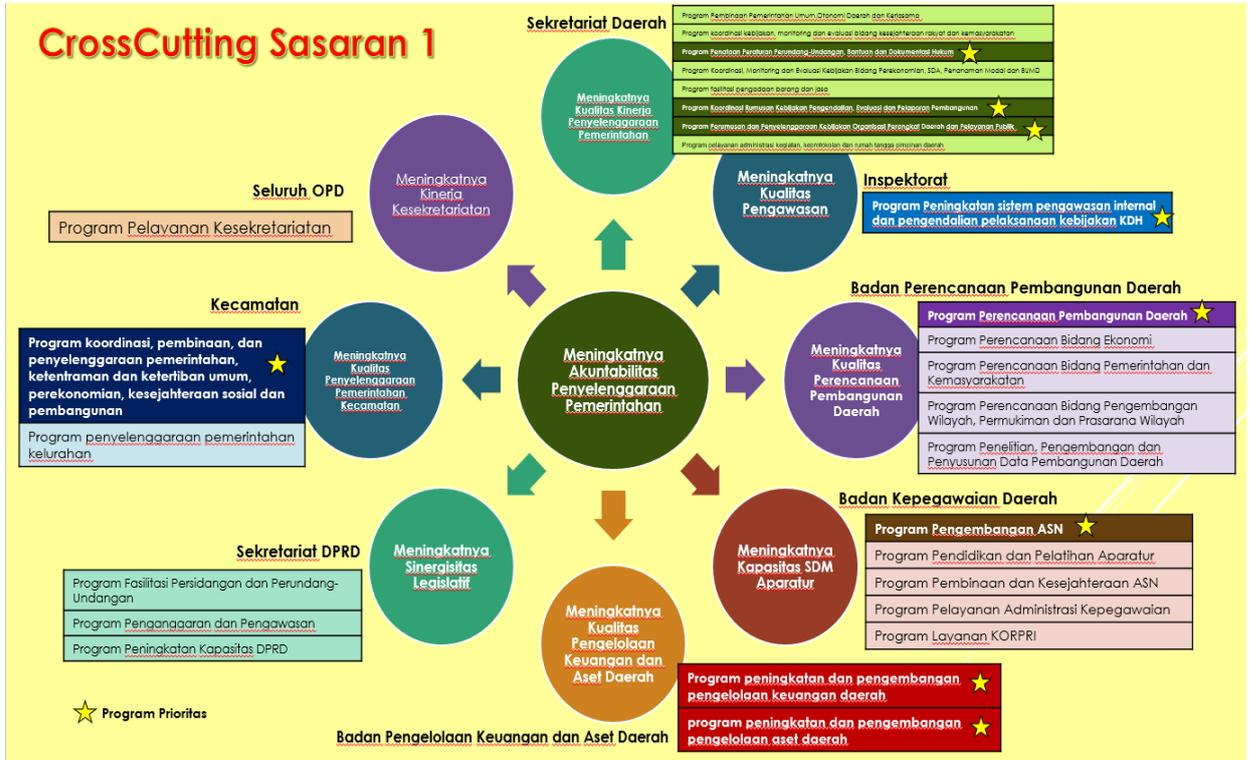


C. CROSSCUTTING

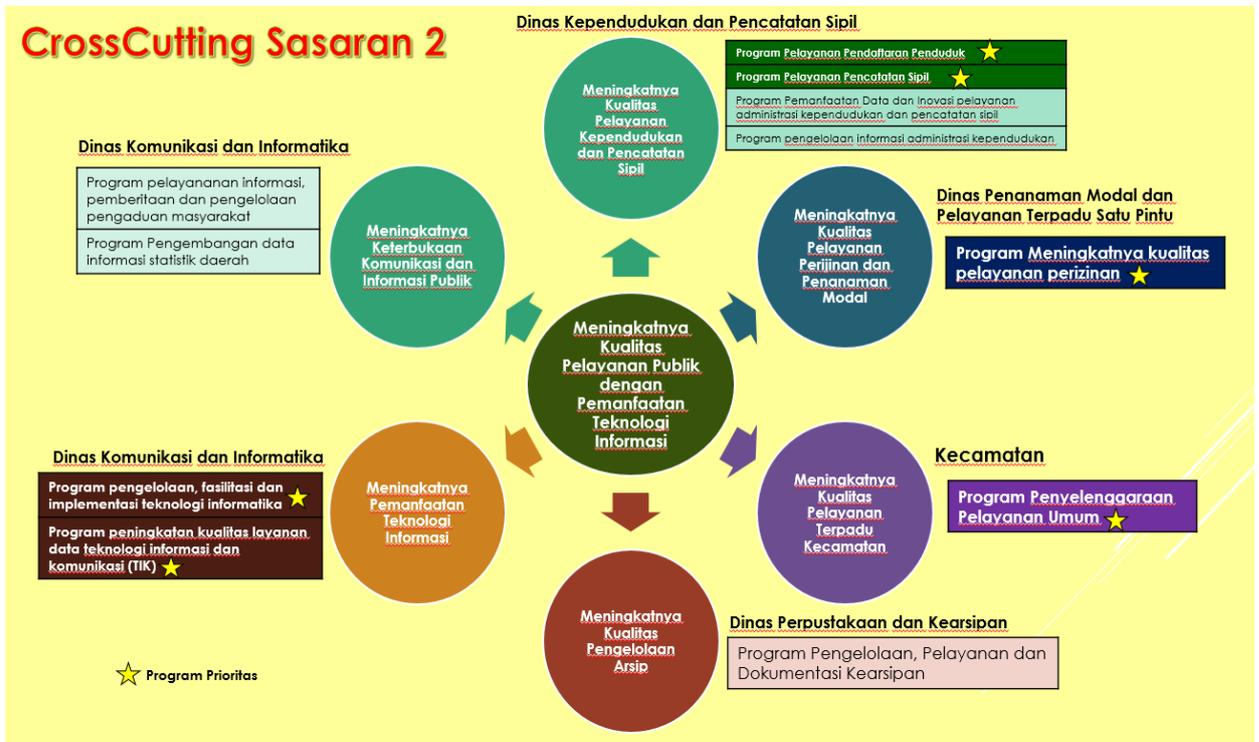
Sebagai wujud integritas kinerja lintas sektor dari strategi pencapaian kinerja disusun pula CrossCutting Kinerja Daerah. Dengan adanya crosscutting maka dapat ditentukan mana – mana saja program pembangunan daerah yang menjadi prioritas dalam setiap sasarnya, serta cara yang tepat dan efektif dalam mewujudkan kinerja yang akan dicapai dengan menerapkan lintas instansi dan lintas fungsi. Melalui CrossCutting pula dapat digambarkan pola hubungan kinerja antar OPD dan apa kaitan OPD dengan kinerja yang tertuang dalam RPJMD. CrossCutting tersebut untuk tiap sasaran digambarkan sebagai berikut :



CrossCutting Sasaran 1 :

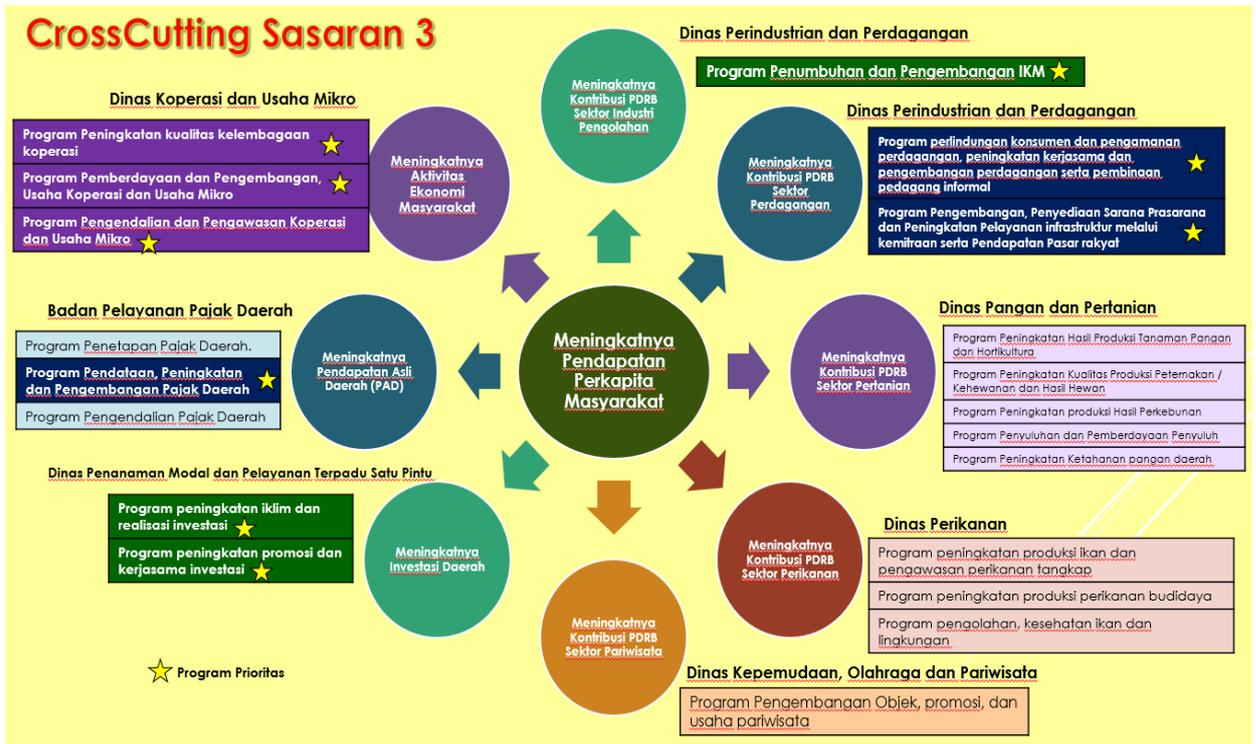


CrossCutting Sasaran 2:

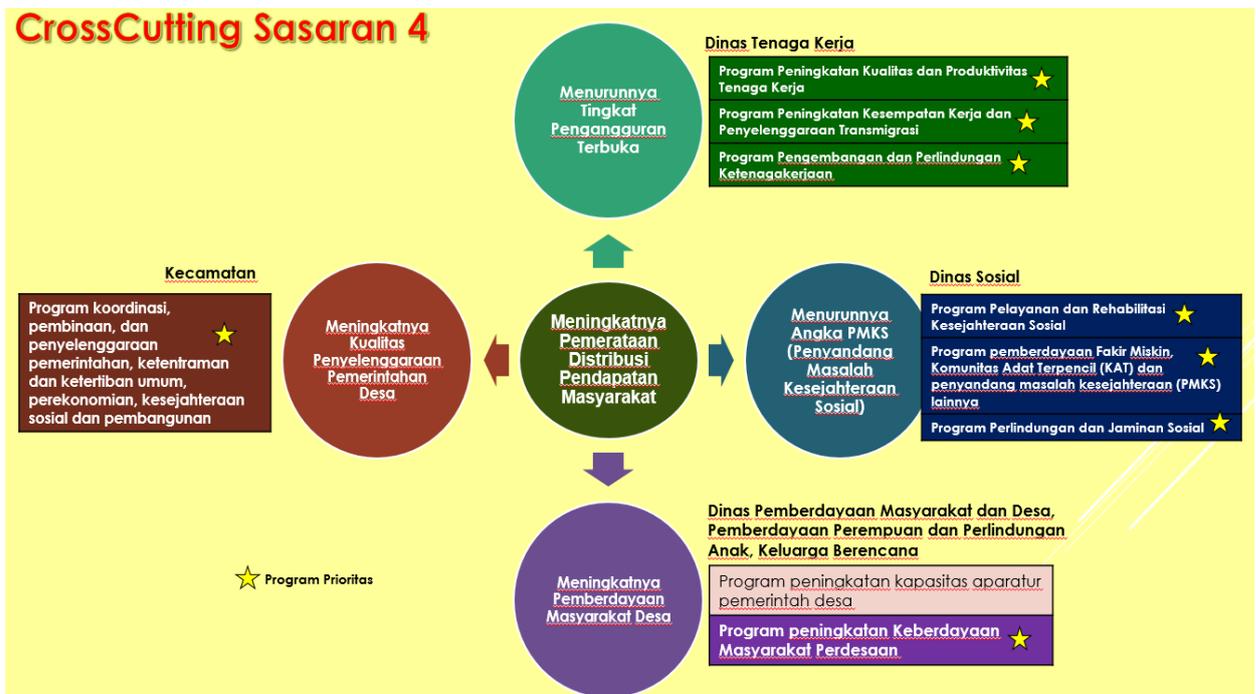




CrossCutting Sasaran 3 :

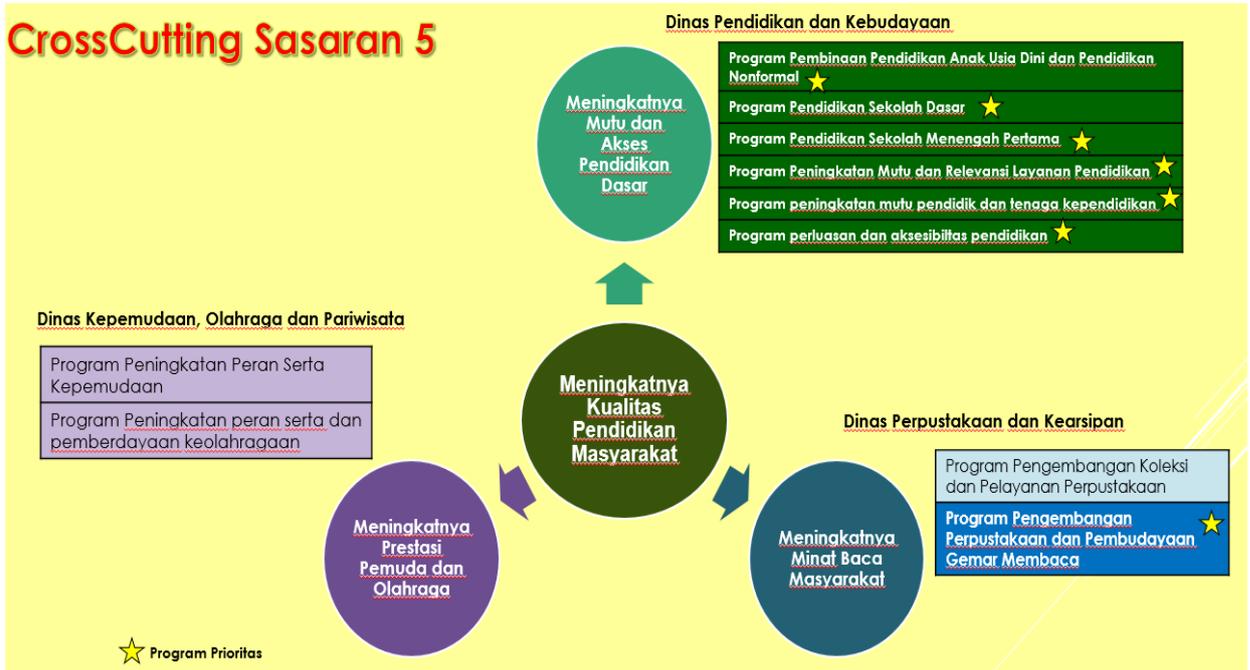


CrossCutting Sasaran 4 :



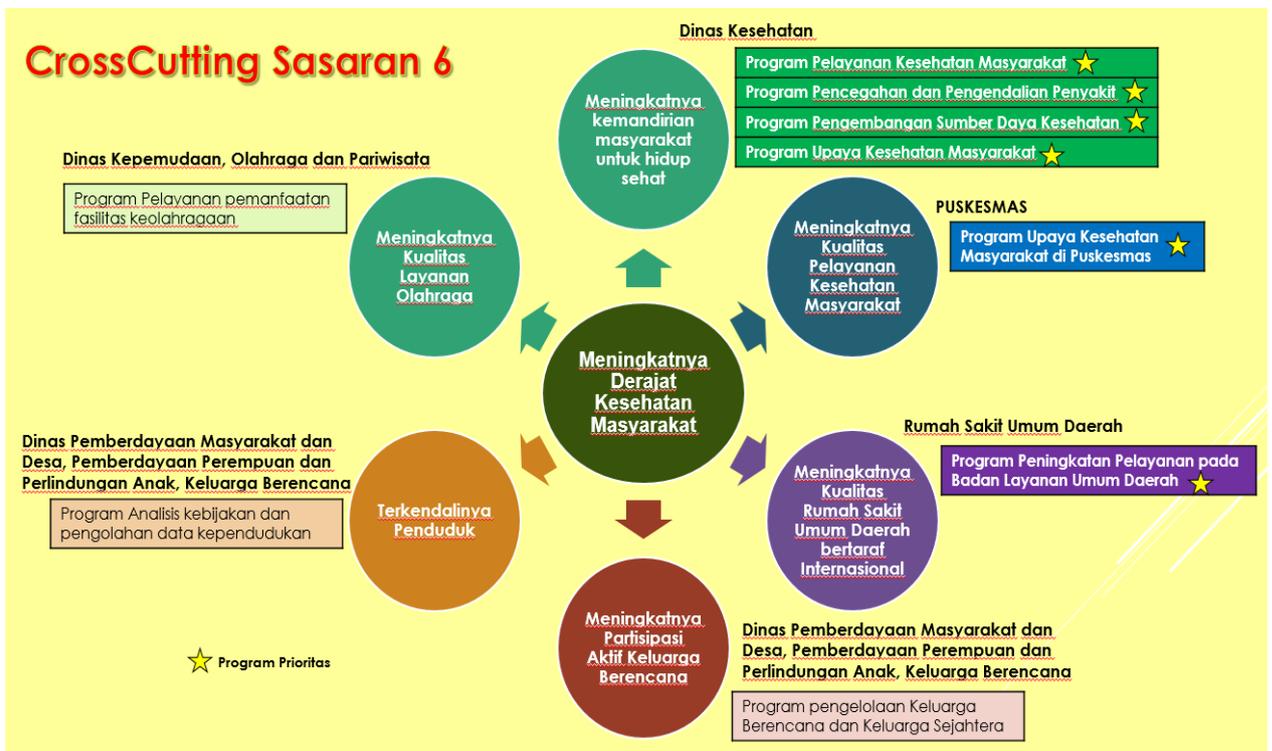
CrossCutting Sasaran 5 :

CrossCutting Sasaran 5

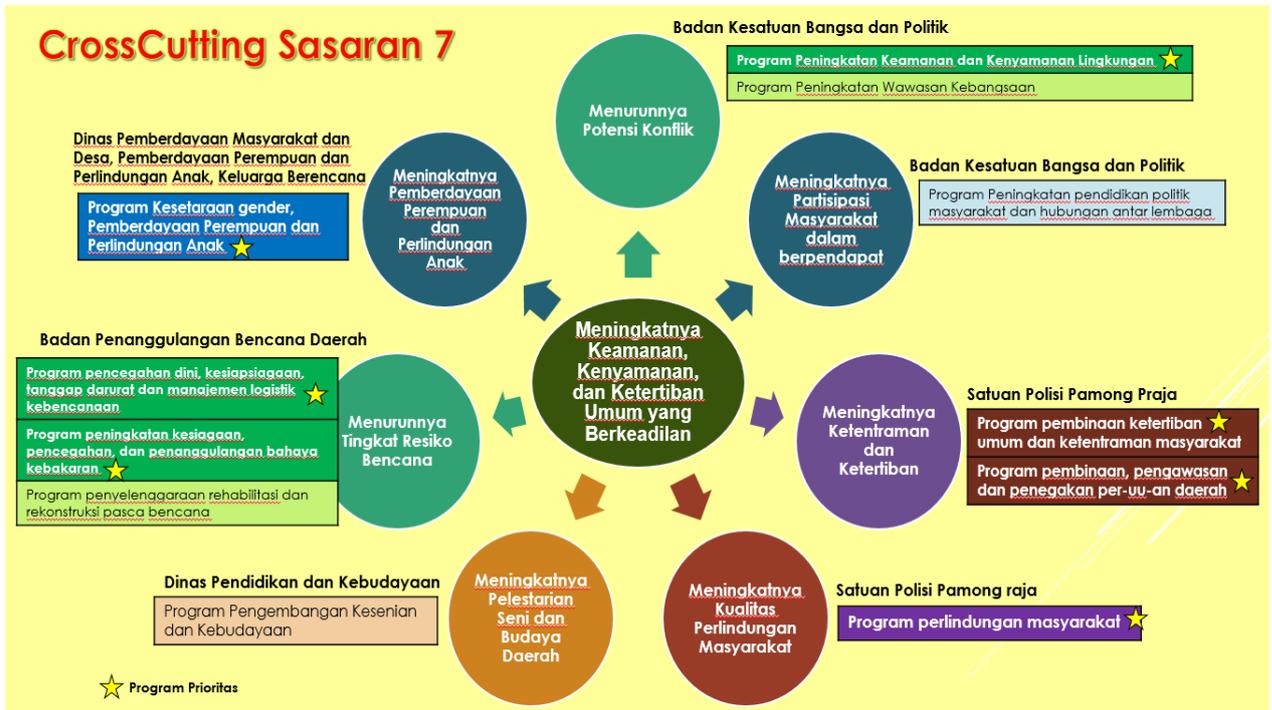


CrossCutting Sasaran 6 :

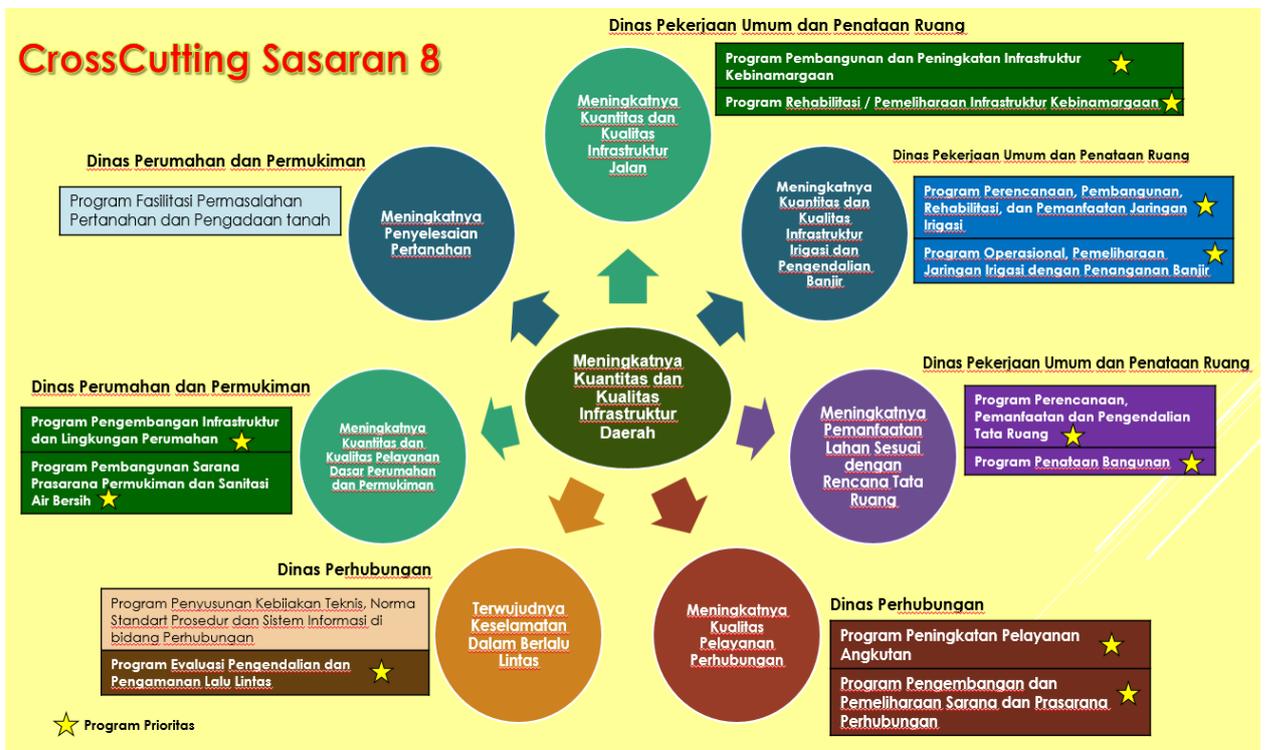
CrossCutting Sasaran 6



CrossCutting Sasaran 7 :



CrossCutting Sasaran 8 :



CrossCutting Sasaran 9 :

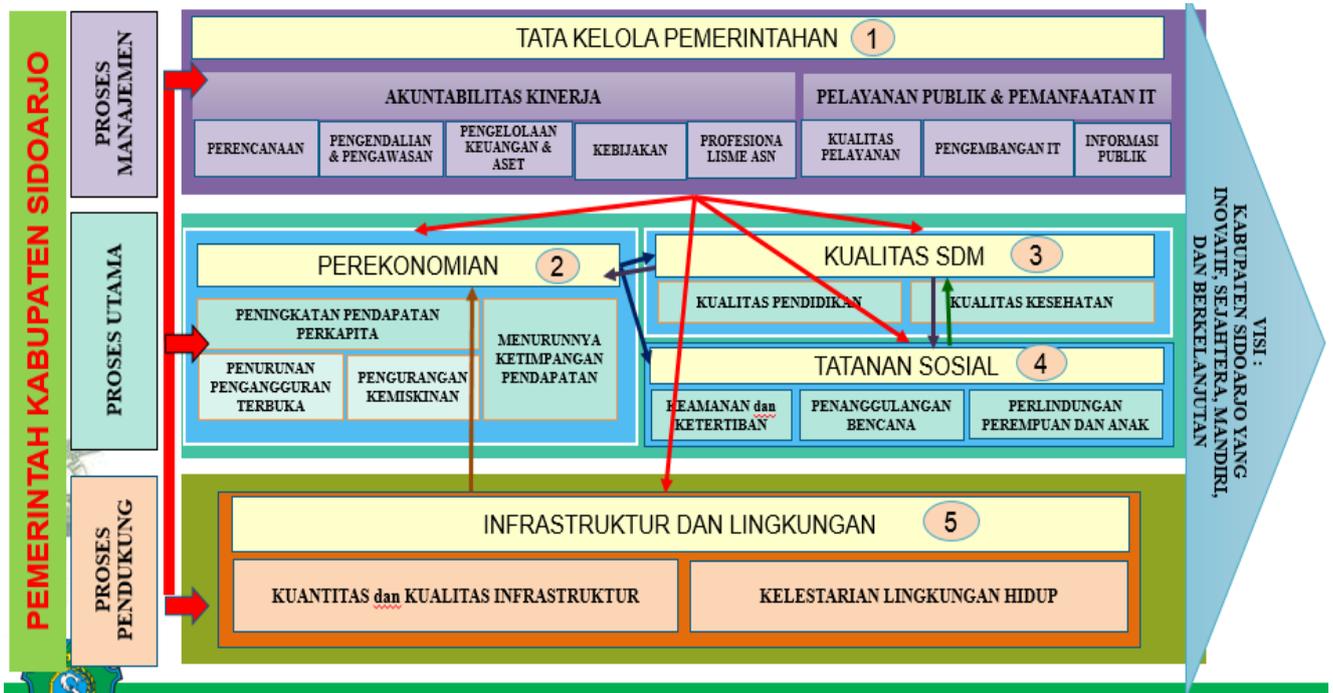


D.	PETA PROSES BISNIS
-----------	---------------------------

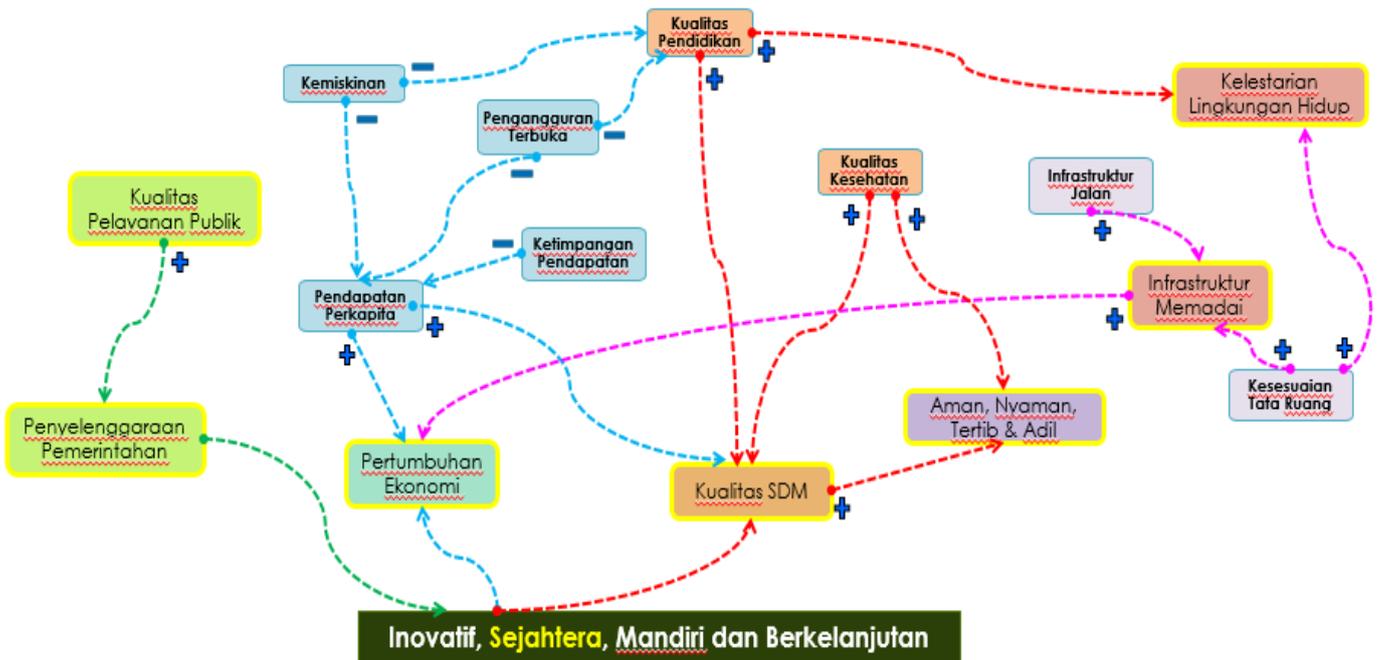
Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dengan adanya peta proses bisnis maka akan mudah dalam melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, dan memiliki standart pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut diagram alir dari peta proses bisnis Kabupaten Sidoarjo baik BPMN (Bisnis Proses Model dan Notasi) maupun diagram level / tingkatannya :

Bisnis Proses Model dan Notasi :



Kausalitas Loop Diagram Pencapaian Visi Misi :



E.**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2019**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

F.**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel II.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019

NO.	MISI / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Misi 1 : "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan"		
	Tujuan 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif, dan Transparan	Indeks Good Governance	69.32
		Indeks Reformasi Birokrasi	B
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Opini Atas Audit BPK	WTP
		Nilai SAKIP Kabupaten	BB (Sangat Baik)
		Nilai Kinerja EKPPD	ST (Sangat Tinggi)
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3 / Terdefinisi
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	B (Baik)
		Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2.60
	Misi 2 : "Meningkatnya Perekonomian Daerah melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat"		
	Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	5.67%
		Indeks GINI	0.37
3.	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	PDRB Perkapita	82.741
4.	Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.56%
		Tingkat Kemiskinan	6.36%
		Persentase Desa Maju	27.33%
	Misi 3 : "Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan"		



	Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79.51
5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,35 tahun
		Rata - Rata Lama Sekolah (RTLs)	10,75 tahun
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,68 tahun
	Misi 4 : "Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlakul Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban"		
	Tujuan 4 : Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan	Indeks Kebahagiaan	79.83
7.	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan	Indeks Rasa Aman	73.57
		Indeks Resiko Bencana	105
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.55
	Misi 5 : "Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan"		
	Tujuan 5 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Infrastruktur	1.418
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52.01
8.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Persentase Jalan Kondisi Mantap	87%
		Persentase Luas Area Rawan Genangan Banjir	60%
9.	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	52.29
		Indeks Kualitas Udara	86.79
		Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	25.72

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Perubahan Kab. Sidoarjo Tahun 2019





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

A.	CAPAIAN DAN PENGUKURAN KINERJA
-----------	---------------------------------------

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selaku pengemban amanah masyarakat Sidoarjo melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dibuat

sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan



kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel III.1
Skala Pengukuran

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75 %	Kurang

Secara umum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, maka ukuran keberhasilan dalam



rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

- Misi 1 terdapat 1 tujuan, 2 indikator tujuan, 2 sasaran dan 6 indikator sasaran;
- Misi 2 terdapat 1 tujuan, 2 indikator tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator sasaran;
- Misi 3 terdapat 1 tujuan, 1 indikator tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator sasaran;
- Misi 4 terdapat 1 tujuan, 1 indikator tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator sasaran;
- Misi 5 terdapat 1 tujuan, 2 indikator tujuan, 2 sasaran dan 5 indikator sasaran.

B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA PER MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

MISI 1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan

Untuk mencapai misi tersebut diatas ditetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 indikator tujuan, 2 sasaran dan 6 indikator sasaran.

Hasil penilaian pencapaian tujuan dan sasaran misi ini pada tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Tujuan - Sasaran - Indikator	Tingkat keberhasilan
Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan		
1.	Indeks Good Governance	SANGAT BERHASIL
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	BERHASIL
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan		
1.	Opini Atas Audit BPK	BERHASIL
2.	Nilai SAKIP Kabupaten	BERHASIL
3.	Status Kinerja EKPPD	BERHASIL
4.	Tingkat Maturitas SPIP	BERHASIL
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi		
1.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	BERHASIL
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	BERHASIL





Uraian hasil dan analisa pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TUJUAN : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif, dan Transparan

1. Indeks Good Governance

Indikator Kinerja Tujuan	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks Good Governance	*)	63,35	65,35	66,31	63,96	67,33	69,19	69,32	74,24	69,55	70,76

Untuk memastikan berjalannya pemerintahan yang baik dan transparan sebagai prinsip pengelolaan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan menerapkan penilaian kinerja pemerintahan dengan mengukur indeks good governance. Tujuan menghitung indeks good governance adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang lebih akurat tentang kapasitas Pemda
2. Menjadi informasi bagi Pemda dalam mengukur daya saing dan keunggulan daerah
3. Menjadi salah satu bentuk dari pertanggung jawaban (akuntabilitas) Pemerintah Daerah terhadap stakeholders di daerah
4. Menjadi informasi bagi pihak swasta dalam membangun kerjasama dan atau kerjasama di daerah
5. Menjadi salah satu indikasi makro keberhasilan pembangunan yang dapat dikomparasi dengan daerah lainya

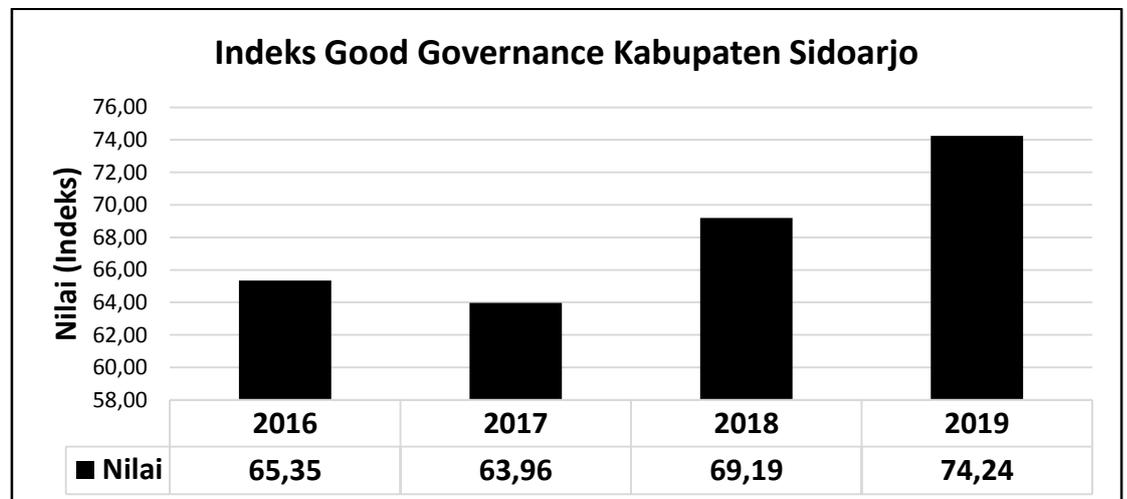
Pengukuran indikator indeks good governance yang diterapkan menggunakan indikator dari delapan prinsip good governance yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara, diantaranya :



1. Taat Hukum;
2. Partisipasi
3. Daya Tanggap
4. Transparansi
5. Akuntabilitas
6. Kesetaraan
7. Efektifitas dan Efisiensi
8. Visi Strategis

Berikut perkembangan Indeks Good Governance di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik III.A.1



Sumber Data : Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa Indeks Good Governance Kabupaten Sidoarjo meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa sistem manajemen pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo sudah lebih akuntabel. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 69.32 maka tercapai hingga 107.10%, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang senilai 69.19, maka kenaikan sebesar 7.30%.



Nilai Indeks Good Governance 74.24 menggambarkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori Baik. Berikut range / skala kategori dari Indeks Good Governance:

Nilai	Kategori
40.00 – 59.99	Buruk
60.00 – 79.99	Baik
80.00 – 100.00	Sangat Baik

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator Kinerja Tujuan	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks Reformasi Birokrasi	*)	C	C	B	B	B	B	B	B	B	B

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

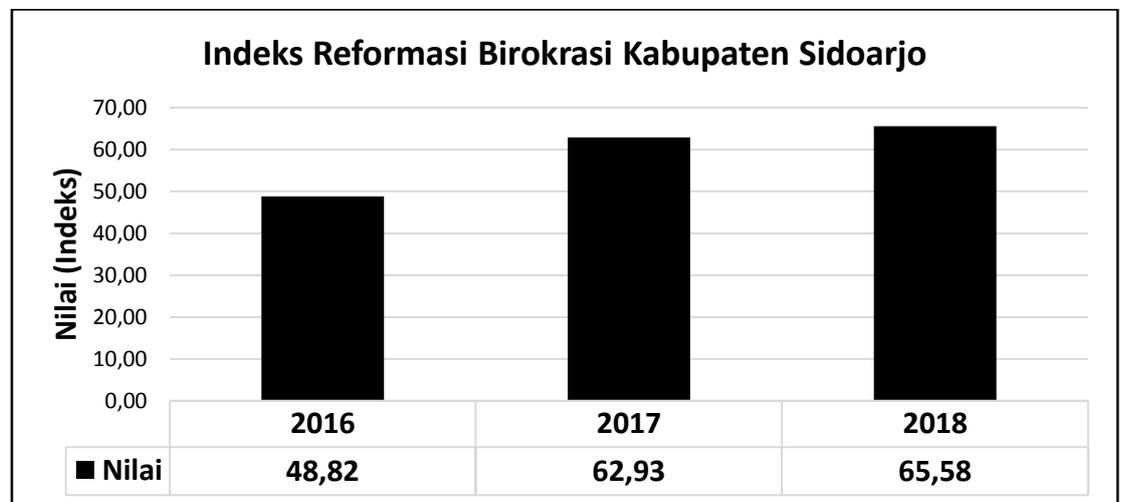


Terdapat delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi, yaitu :

1. Organisasi
2. Tata Laksana
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
4. Peraturan Perundang – Undangan
5. Pengawasan
6. Akuntabilitas
7. Pelayanan Publik
8. Budaya Kerja Aparatur

Berikut perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik III.A.2



Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo

Untuk penilaian Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2019 masih dalam tahap evaluasi, sehingga belum didapatkan hasilnya, namun seiring dengan meningkatnya hasil evaluasi akuntabilitas, pelayanan publik, integritas dan indeks profesionalitas, diharapkan mampu meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di Kabupaten Sidoarjo.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 dengan kategori B (Baik), maka capaian tahun 2018 dengan nilai indeks 65,58 sudah masuk pada kategori B (Baik). Kategori Reformasi Birokrasi tahun 2018 masih sama dengan tahun 2017, meskipun nilai indeks sudah meningkat dari 62.93 menjadi 65.58 atau naik 4,21%.

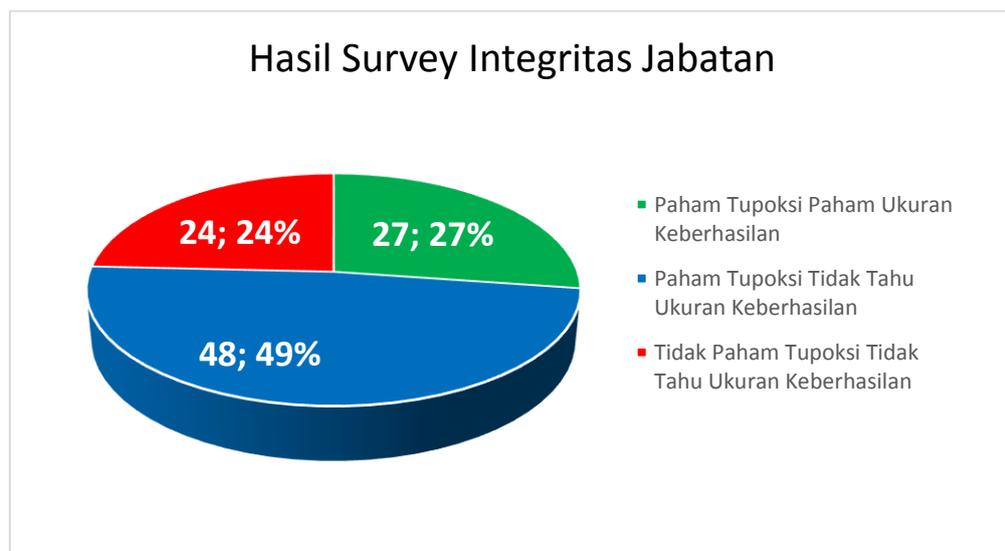
Adapun yang menjadi rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB untuk peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sidoarjo, antara lain :

1. Menyusun peta proses bisnis yang mengacu sepenuhnya pada kinerja yang akan diwujudkan
2. Menerapkan *performance based organization* atau organisasi berbasis kinerja
3. Pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kinerja yang akan diwujudkan.
4. Peraturan perundang – undangan belum dilakukan evaluasi atas efektivitas keberhasilan pelaksanaannya
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik agar mampu memenuhi harapan masyarakat
6. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan pengawasan sebagai upaya peningkatan integritas pegawai dan upaya pencegahan korupsi

Berdasarkan hasil suvey persepsi pelayanan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan indeks 3.31 dalam skala 4. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan belum cukup dirasakan langsung oleh masyarakat.

Hasil survey persepsi anti korupsi menunjukkan indeks 3.60 dalam skala 4 yang merupakan gambaran atas integritas dalam memberikan laanan masih perlu ditingkatkan, terutama pengelolaan gratifikasi, *whistle blowing system*, penanganan pengaduan dan kebijakan benturan kepentingan.

Sedangkan untuk hasil survei internal terhadap 99 orang responden ASN Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas integritas jabatan menunjukkan terdapat 24 orang pegawai atau 24.24% yang tidak memahami tugas fungsi dan ukuran keberhasilan kinerjanya. Sebanyak 48 pegawai atau 48.48% telah memahami tugas fungsi namun tidak tahu ukuran keberhasilan kinerjanya, serta 27 orang pegawai atau 27.27% yang telah memahami tugas fungsi dan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya.



Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi KEMENPAN & RB

Sedangkan untuk survei integritas organisasi menunjukkan indeks 3.37 dalam skala 0 – 4 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komponen	Indeks
1	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	3.22
2	Integritas terkait pengelolaan SDM	3.46
3	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3.40
4	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	3.38
Indeks Integritas Organisasi		3.37

SASARAN : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan**1. Opini Atas Audit BPK**

Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Opini Atas Audit BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	*)	WTP	WTP

Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah dengan menilai opini BPK atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.

Untuk memperoleh kinerja keuangan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya yaitu pemantapan terhadap penatausahaan keuangan dengan pembinaan terhadap pegawai yang bertugas dibidang keuangan, penyempurnaan atas sistem aplikasi keuangan SIKSDA menjadi terintegrasi dengan RDS (*Regional Development Sistem*), serta penerapan kebijakan transaksi non tunai dalam pengeluaran belanja daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan pembayaran non tunai dalam belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu pengelolaan aset daerah juga diupayakan perbaikan melalui upaya :

- a. Menyelaraskan persepsi dan pemahaman serta peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah;

- b. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo), dalam rangka proses pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta dalam rangka penelusuran dokumen kelengkapan pengurusan sertifikat tanah;
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sewa barang milik daerah;
- d. Penetapan/kode rekening pendapatan dan belanja secara tepat pada jenis pendapatan/belanja, obyek pendapatan/belanja, rincian obyek pendapatan dan belanja sehingga realisasi pendapatan maupun belanja secara substansi tepat.
- e. Optimalisasi tatakelola barang pakai habis berbasis akrual.

Dengan upaya tersebut diharapkan pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat terkelola dengan baik.

Perkembangan Opini BPK untuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III.A.1
Opini BPK Atas Laporan Keuangan

No	Tahun	Opini
1	2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	2019	(Masih dalam tahap penilaian)

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2013 sampai dengan 2015 laporan keuangan Kabupaten Sidoarjo dengan Opini BPK atas pemeriksaan LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraph penjelasan. Sedangkan pada tahun 2016

sampai dengan 2018 opini BPK atas pemeriksaan LKPD naik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni tanpa paragraph penjelasan, dan untuk tahun 2019 masih dalam proses penilaian.

Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK. Terlebih lagi BPK tidak hanya melakukan audit pada laporan keuangan saja, melainkan juga melakukan audit terhadap kinerja yang dimulai dari dokumen perencanaan, penganggaran, monev, hingga pelaporan.

2. Nilai SAKIP Kabupaten

Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Nilai SAKIP Kabupaten	B	B	B	B	BB	BB	A	BB	BB	A	A

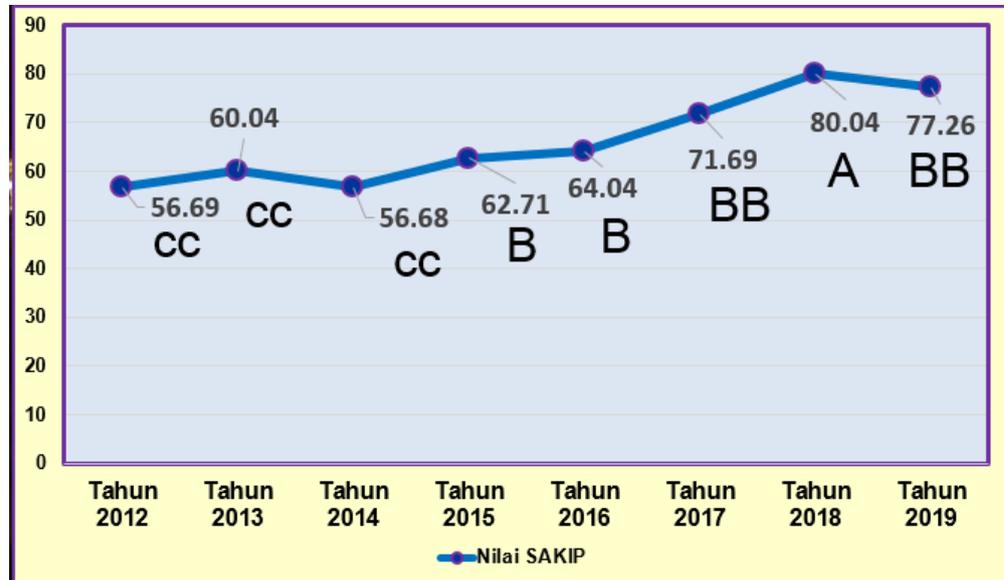
Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang berorientasi hasil, adalah dengan dilakukan suatu evaluasi terhadap implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2019 memperoleh kategori BB (Sangat Baik), hasil tersebut meskipun telah memenuhi target yang ditetapkan pada RPJMD yakni kategori BB (Sangat Baik), namun mengalami penurunan level dari tahun sebelumnya, dimana di tahun 2018 Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo kategori A (Memuaskan).

Perkembangan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2012, sebagaimana grafik :

Grafik III.A.3

Perkembangan Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : LHE SAKIP Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam penerapan SAKIP ini sehingga mampu mendorong penerapan budaya kinerja sejak proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

Hasil evaluasi SAKIP diberikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada tanggal 27 Januari 2020 di Inaya Putri Hotel, Badung, Provinsi Bali.

Nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan karena terdapat beberapa rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti, oleh sebab itu, untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di tahun 2020, maka dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

- Dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD mempertimbangkan fungsi – fungsi yang terkait, bukan OPD yang terkait, sehingga dapat dianalisa fungsi – fungsi yang kurang efektif.
- Mereviu kembali penyusunan peta proses bisnis dengan mempertimbangkan langkah strategis pencapaian kinerja mulai level Kabupaten, OPD, hingga level individu dengan mengadakan asistensi yang didampingi evaluator nasional
- Penguatan pemanfaatan aplikasi e-Kinerja sebagai media evaluasi akuntabilitas kinerja
- Penguatan pemanfaatan aplikasi e-Kinerja sebagai media evaluasi akuntabilitas kinerja, serta mereviu kembali aspek – aspek yang mempengaruhi tunjangan kinerja dengan mengacu pada kualitas manajemen kinerja OPD
- Menyusun Analisa Resiko seluruh Kegiatan OPD bersamaan dengan penyusunan KAK pada saat penyusunan Renja OPD
- Setiap Laporan Kinerja OPD, sebelum diupload pada aplikasi milik Kementerian PAN dan RB, terlebih dahulu direview oleh Tim APIP
- Pengembangan aplikasi e-monev yang tidak hanya mengevaluasi kinerja output, tetapi juga kinerja outcome
- Penguatan pemanfaatan aplikasi e-Kinerja sebagai media evaluasi akuntabilitas kinerja
- Pelaksanaan Evaluasi SAKIP ke seluruh OPD dengan menghadirkan Tim evaluator Nasional sebagai pengarah
- Penguatan pemanfaatan aplikasi e-Kinerja sebagai media evaluasi akuntabilitas kinerja



3. Nilai Kinerja EKPPD

Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Nilai Kinerja EKPPD	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	*)	ST	ST

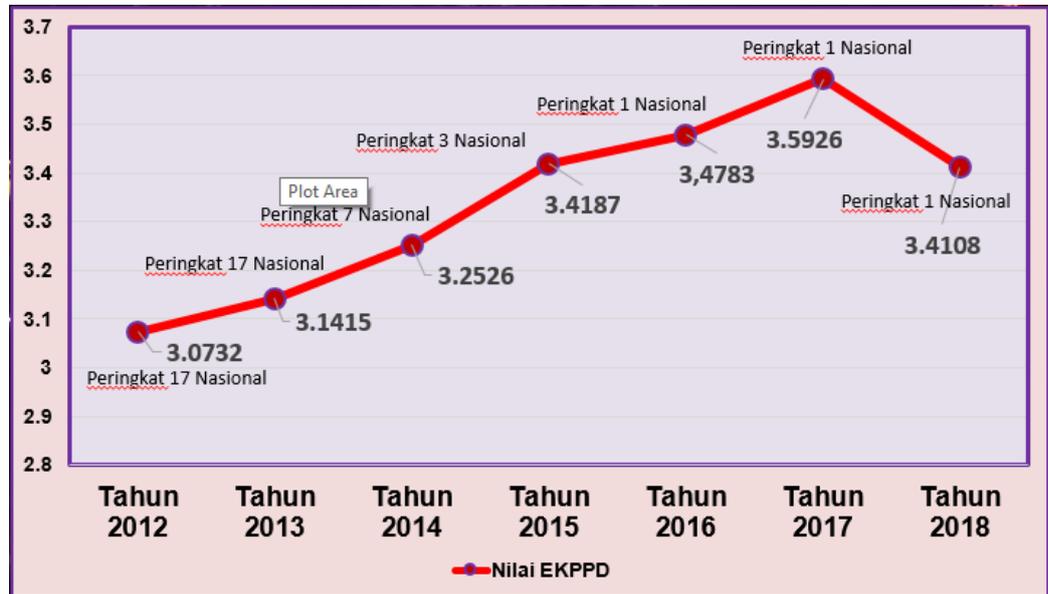
Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun.

Hasil EKPPD kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 memperoleh nilai (score) 3,4108 dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST) dan bertahan mendapat peringkat ke-1 (**pertama**) tingkat Nasional dan berhasil meraih predikat bintang 4 (empat) kinerja terbaik. Kabupaten Sidoarjo sudah pernah mendapatkan penghargaan Samkarya Nugraha Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan melalui Menteri Dalam Negeri pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXI tahun 2017 yang diselenggarakan di Alun – Alun Kabupaten Sidoarjo, serta Satya Lancana Karya Bhakti Praja Nugraha oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta pada tahun 2015. Sehubungan dengan telah berhasilnya Kabupaten Sidoarjo mendapatkan penghargaan tersebut, maka Kabupaten Sidoarjo harus tetap dapat mempertahankan prestasi kebanggannya.



Berikut Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana grafik :

Grafik III.A.4
Perkembangan Hasil EKPPD Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Hasil EKPPD Kementerian Dalam Negeri

Upaya yang dilakukan adalah membuat kebijakan satu OPD satu Inovasi, sehingga kinerja OPD menjadi sangat tinggi dan memiliki nilai lebih. Selain juga menjaga tren Pencapaian Kinerja dari setiap Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada LPPD Kabupaten Sidoarjo.

4. Tingkat Maturitas SPIP

Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Tingkat Maturitas SPIP	N/A	N/A	N/A	N/A	Level 2 (berkembang)	Level 3 (terdefinisi)					

Tingkat Kematangan (maturity level) SPIP menggambarkan tahapan proses yang lebih diyakini akan mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik. Tingkat Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

Sebagaimana dalam target RPJMN bahwa di tahun 2019 tingkat kematangan harus sudah menunjukkan level 3 (terdefinisi), berdasarkan laporan quality assurance (QA) atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 yang dikeluarkan oleh BPKP bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP level 3 (terdefinisi) dengan skor 3,09. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai serta telah diimplementasikan pada seluruh kegiatan dan sudah memenuhi target sebagaimana diamanatkan pada RPJMN.

Tabel III.A.2

Maturitas SPIP Kabupaten Sidoarjo

No	Tahun	Level Kematangan
1	2015	Level 2 (Berkembang)
2	2016	Level 2 (Berkembang)
3	2017	Level 3 (Terdefinisi)
4	2018	Level 3 (Terdefinisi)
5	2019	Level 3 (Terdefinisi)

Sumber Data : Inspektorat Kabupaten Sidoarjo

Upaya untuk meningkatkan kematangan dalam pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan :

1. Sosialisasi SPIP
2. Identifikasi Resiko
3. Analisa Resiko
4. Rencana Tindak Pengendalian

SASARAN : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks Pelayanan Publik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Pelayanan publik dapat diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara.

Tujuan dari dilaksanakannya Evaluasi Pelayanan Publik, adalah :

- Sebagai percontohan bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Instansi Pemerintah lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat

Metodologi evaluasi dan penilaian adalah sebagai berikut :

Indikator dan Range Nilai Evaluasi Pelayanan Publik dengan menggunakan Indeks Pelayanan Publik



Setiap tahunnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo diupayakan selalu meningkat, hal ini sesuai dengan kebijakan satu OPD satu Inovasi yang ditetapkan oleh Bapak Bupati Sidoarjo. Selain itu banyak pula inovasi di Kabupaten Sidoarjo yang pernah mendapatkan penghargaan SINOVIK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu SIPPADU Aplikasi Perijinan Terpadu, SIMANIES Aplikasi untuk mencegah kematian ibu melahirkan, SIPEKAT Aplikasi kenaikan

pangkat paperless, dan SIPANDU sistem untuk mendeteksi dini gangguan autis pada anak usia dini.

Melalui inovasi – inovasi yang berkembang, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2019 mendapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel III.A.3

No.	Unit Pelayanan Yang di Sampling	Nilai (Indeks)	Konversi
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	4,51	Pelayanan Prima
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,21	Sangat Baik (A-)
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3,76	Baik (B)
		4,16	Sangat Baik (A-)

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo

Pembangunan Mal Pelayanan Publik, Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta penerapan Kelompok Budaya Kerja (KBK) mendorong tercapainya kualitas pelayanan publik yang Sangat Baik. Diharapkan di tahun 2020 akan semakin banyak unit pelayanan yang mendapatkan sampling dan memiliki inovasi yang efektif, sehingga nilai Indeks Pelayanan Publik juga semakin meningkat.

Apabila dibandingkan dengan Indeks Pelayanan Publik di Tahun 2018 dengan nilai 3.80 maka terdapat peningkatan nilai sebesar 0.36 atau 9,47%. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas pelayanan dari 3 (tiga) lokus pelayanan, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah naik dari kategori Sangat Baik (A-) menjadi Pelayanan Prima, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu naik dari kategori Baik (B) menjadi Sangat Baik (A-). Sedangkan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga naik dari kategori (B-) menjadi kategori Baik (B).

Begitu pula jika dibandingkan dengan target RPJMD telah melampaui dari target kategori Baik (B) tercapai kategori Sangat Baik (A-).

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks SPBE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,55	2,55	2,6	3,13	2,65	2,7

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka perlu disusun pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE.

Pedoman Evaluasi SPBE disusun untuk memberikan petunjuk dalam rangka melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pedoman evaluasi ini mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil evaluasi SPBE. Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE, dan kebijakan SPBE

Tujuan Evaluasi SPBE :

1. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi pusat
2. Dan Pemerintah daerah;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE;
4. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Metodologi Evaluasi SPBE

- **Tingkat Kematangan SPBE**

Tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkatan kematangan mengarahkan pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses terdiri dari lima tingkat yaitu rintisan, terkelola, terstandardisasi, terintegrasi dan terukur, optimum. Sedangkan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis terdiri lima tingkat yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimalisasi. Setiap tingkat (level) memiliki karakteristik masing-masing yang dapat secara jelas membedakan antara tingkat satu dengan tingkat yang lain. Karakteristik pada tingkat (level) yang lebih tinggi mencakup karakteristik pada tingkat (level) yang lebih rendah.

- **Struktur Penilaian dalam SPBE**

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai;

3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai



• **Tingkat Kematangan Kapabilitas**

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses diterapkan pada domain tata kelola SPBE dan domain kebijakan internal SPBE. Berikut adalah karakteristik tingkat kematangan pada kapabilitas proses :

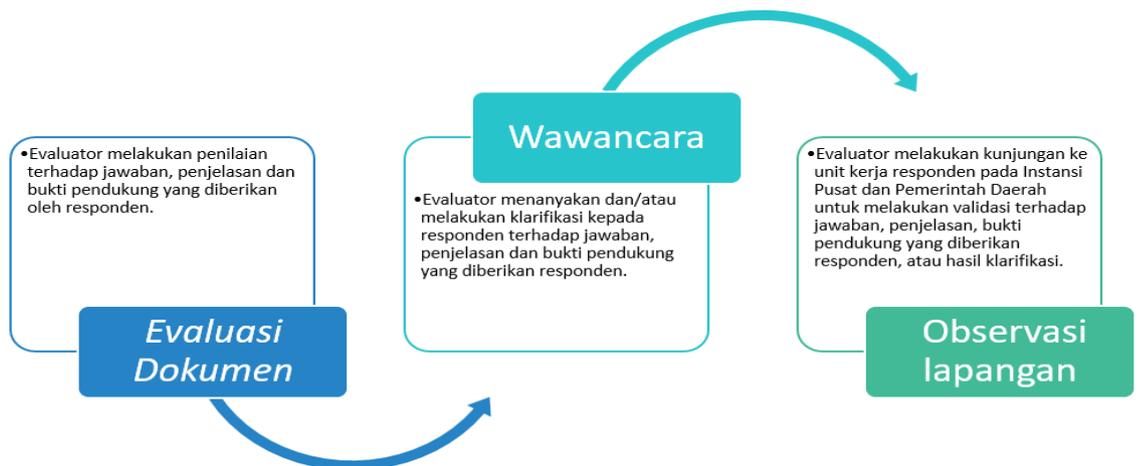
Rintisan	<ul style="list-style-type: none">• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan.• Proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i>.
Terkelola	<ul style="list-style-type: none">• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah• Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan.
Terstandardisasi	<ul style="list-style-type: none">• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah.• Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.
Terintegrasi dan Terukur	<ul style="list-style-type: none">• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah.• Proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.
Optimum	<ul style="list-style-type: none">• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.• Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.

- **Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi SPBE**

Tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi SPBE diterapkan pada domain layanan SPBE. Berikut adalah karakteristik tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi :

Informasi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
Interaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
Transaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
Kolaborasi	• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
Optimalisasi	• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

- **Metode Pelaksanaan Evaluasi SPBE**



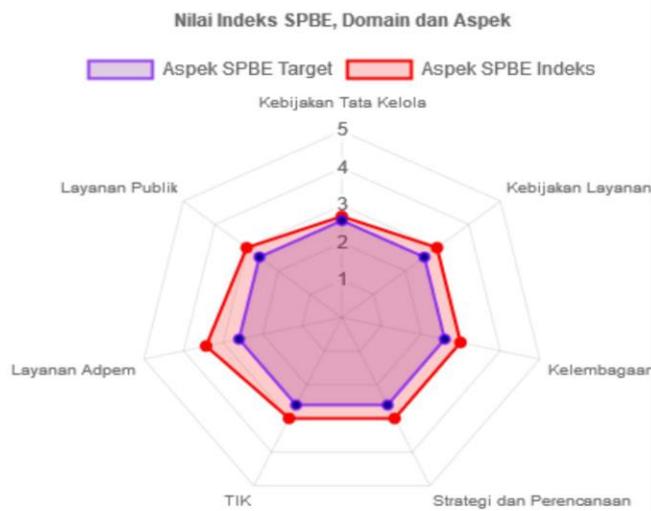
Grafik III.A.5
Nilai Indeks SPBE Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika

Hasil Capaian Indeks Smart City pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2018, hasil yang diraih yaitu **3,13** dengan predikat **Baik** hasil ini dinilai berdasarkan Evaluasi Mandiri yang dilakukan oleh Evaluator Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikut Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek :

NILAI INDEKS SPBE, DOMAIN DAN ASPEK



Nama Instansi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

K/L/D : Kabupaten

Daerah : Jawa Timur

Indeks SPBE : **3.13**

Predikat SPBE : Baik

Domain Kebijakan SPBE : **2.88**

➔ Kebijakan Tata Kelola SPBE : 2.71

➔ Kebijakan Layanan SPBE : 3.00

Domain Tata Kelola : **3.00**

➔ Kelembagaan : 3.00

➔ Strategi dan Perencanaan : 3.00

➔ TIK : 3.00

Domain Layanan SPBE : **3.27**

➔ Administrasi Pemerintahan : 3.43

➔ Pelayanan Publik : 3.00

Sumber: <http://spbe.go.id/moneval/>

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD 2.60, maka realisasi 3.13 tercapai 120,38% dari target. Sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 senilai 2.55 maka kenaikan cukup signifikan sebesar 22,75%.

MISI 2. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat

Untuk mencapai misi tersebut diatas ditetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 indikator tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator sasaran.

Hasil penilaian pencapaian tujuan dan sasaran misi ini pada tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Tujuan - Sasaran - Indikator	Tingkat keberhasilan
Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing		
1.	Pertumbuhan Ekonomi	SANGAT BERHASIL
2.	Indeks GINI	SANGAT BERHASIL
Sasaran : Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat		
1.	Pendapatan Perkapita	SANGAT BERHASIL
Sasaran : Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat		
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	SANGAT BERHASIL
2.	Tingkat Kemiskinan	SANGAT BERHASIL
3.	Persentase Desa Maju	SANGAT BERHASIL

Uraian hasil dan analisa pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TUJUAN : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing

1. Pertumbuhan Ekonomi

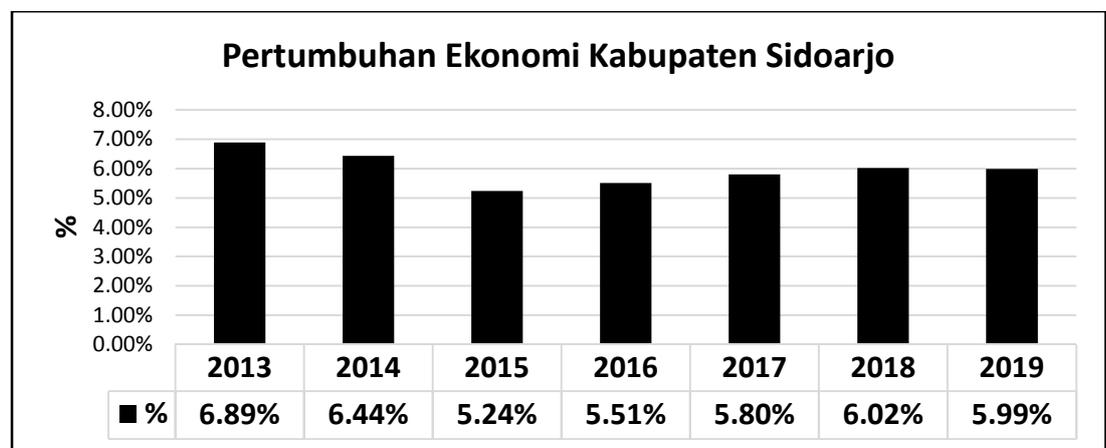
Indikator Kinerja Tujuan	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Pertumbuhan Ekonomi	5,24	5,51	5,51	5,63	5,80	5,65	6,05	5,67	5,99	5,75	5,85

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) suatu daerah. Perkembangan PDRB di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan ADHK 2010 mengalami fase peningkatan, dimana dipengaruhi terutama oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik III.B.1



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Sidoarjo cenderung stabil, dan diharapkan dapat bertahan sampai dengan akhir masa jabatan tahun 2021, dengan akselerasi sektor potensial daerah, terutama pada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan peningkatan usaha mikro melalui Program 1.000 WUB (Wira Usaha Baru). Untuk persentase pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 sampai dengan perhitungan sementara berada pada kisaran 5,99%, sehingga apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 5,67% maka capaian sementara di tahun 2019 sudah memenuhi target hingga 105,64%. walaupun terdapat penurunan dari tahun 2018 sebesar 0,5%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang mencapai 5,45% dan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 5,07%, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo masih berada diatas rata – rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

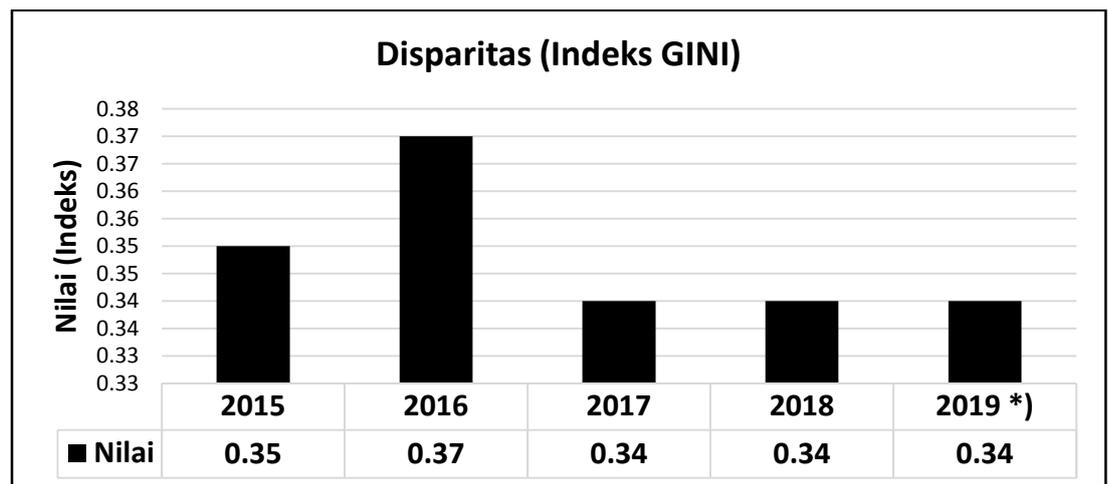
2. Indeks GINI

Indikator Kinerja Tujuan	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks GINI	0.35	0.37	0.37	0.37	0.34	0.37	0.34	0.37	0.34	0.37	0.37

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Berikut perkembangan Disparitas (Indeks GINI) di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik III.B.2



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1 (digunakan dalam bahasan ini), atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, tinggi jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, sedang jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,36.

Perkembangan Indeks GINI di Kabupaten Sidoarjo masih berada dalam kisaran rendah, dimana telah dilakukan upaya pemerataan pembangunan infrastruktur untuk Sidoarjo wilayah barat dan wilayah timur, salah satunya adalah infrastruktur kesehatan yaitu Rumah Sakit di wilayah barat. Selain itu juga pembangunan infrastruktur irigasi dan jalan penghubung, sehingga usaha ekonomi masyarakat di semua wilayah di Kabupaten Sidoarjo dapat terhubung dengan baik, untuk mengurangi angka kesenjangan.

Untuk capaian tahun 2019 berdasarkan angka sementara mencapai kisaran 0,34 sehingga apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 0.37 maka capaian di tahun 2019 sudah memenuhi target. Upaya peningkatan infrastruktur di daerah tertinggal dan terluar sudah diupayakan untuk pemerataan pendapatan.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan Indeks GINI Provinsi Jawa Timur yang bernilai 0.39, maka capaian Indeks GINI Kabupaten Sidoarjo terbilang masih dalam proporsi yang lebih baik.

SASARAN : Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat

1. PDRB Perkapita

Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
PDRB Perkapita	68.994	71.664	74.411	75.181	79.810	78.870	85.385	82.741	90.015	86.801	91.061

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu daerah tidak bisa secara langsung diartikan meningkat pula kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Dampak pertumbuhan ekonomi tersebut harus bisa dipastikan dinikmati oleh seluruh masyarakat daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan relatif kurang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat jika pertumbuhan jumlah penduduk juga tinggi. Salah satu indikator yang dianggap bisa lebih menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut adalah PDRB perkapita/Pendapatan perkapita.

Dengan definisi PDRB perkapita adalah total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dianggap bahwa tiap penduduk juga ikut merasakan peningkatan atau hasil pertumbuhan jika terjadi peningkatan PDRB perkapita di suatu daerah.

Dari data 5 tahun terakhir, terlihat bahwa peningkatan besaran PDRB masih selalu diikuti dengan kenaikan PDRB per kapita nya. Pada periode 5 tahun terakhir, PDRB Sidoarjo adalah 146,08 triliun rupiah (2015); 160,02 triliun rupiah (2016); 174,18 triliun rupiah (2017); 189,09 triliun rupiah (2018) dan 204,02 triliun rupiah (2019). Sedangkan PDRB perkapita nya mencapai 68.994 juta rupiah (2015); 74.411 juta rupiah (2016); 79.810 juta rupiah (2017); 85.385 juta rupiah (2018) dan 90.015 juta rupiah (2019) . Kenaikan besaran PDRB dan PDRB per kapita tiap tahun ini ternyata seiring dengan kenaikan Pendapatan Regional Perkapita.

Berikut tabel perbandingan PDRB dan PDRB Perkapita di Kabupaten Sidoarjo mulai dari tahun 2015 :

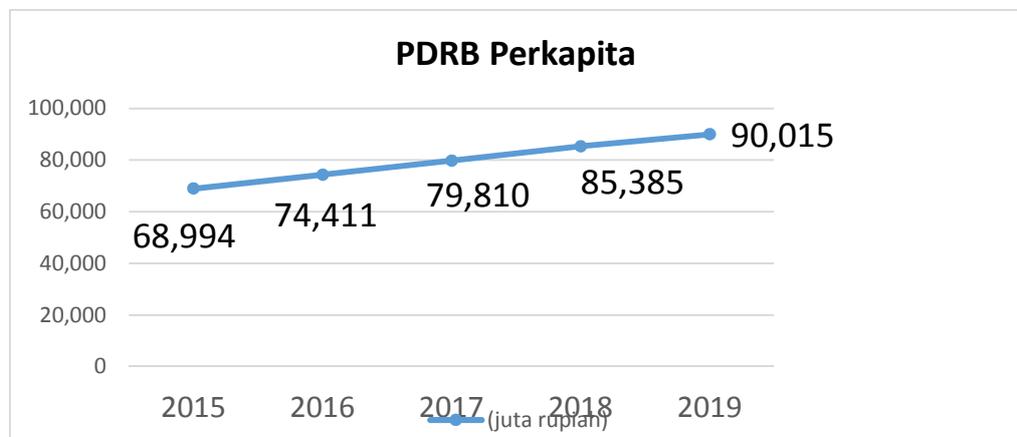
Tabel III.B.1
Perbandingan PDRB dan PDRB Perkapita (ADHB)

Tahun	PDRB ADHB (triliun rupiah)	PDRB Perkapita (juta rupiah)
2015	146.080.889,7	68.994
2016	160.020.653,4	74.411
2017	174.180.087,6	79.810
2018	189.093.191,5	85.385
2019	204.021.513,1	90.015

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Sedangkan grafik perkembangan PDRB perkapita mulai tahun 2015, adalah sebagai berikut :

Grafik III.B.3
PDRB Perkapita Kabupaten Sidoarjo



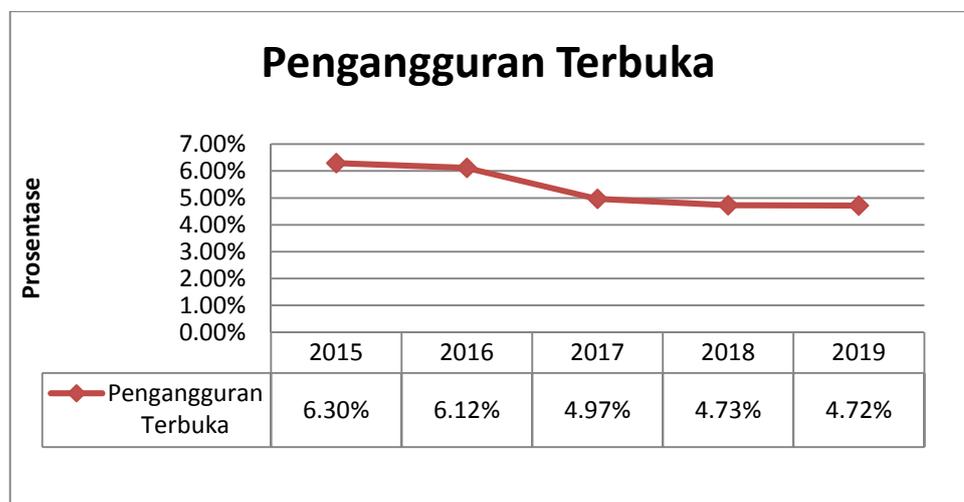
Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

SASARAN : Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat**1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,3	6,12	6,12	5,93	4,97	5,74	4,73	5,56	4,72	5,37	5,19

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya.

Berikut grafik perkembangan tingkat pengangguran tahun 2015 sampai dengan 2019.

Grafik III.B.4

Sumber Data : BPS dan Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kemnaker RI

Dari grafik di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dari 6,30 pada tahun 2015, mengalami penurunan menjadi 6,12% pada tahun 2016 dan penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,97%. Pada



tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan menjadi 4,73%. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,72%.

Hal ini disebabkan karena adanya Stabilitas perekonomian di Kabupaten Sidoarjo yang cukup mendukung dan komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mempermudah investasi.

Capain target tahun 2019 tersebut diatas sudah melebihi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 5,56%.

Dalam upaya mengurangi pengangguran, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada perencanaan tenaga kerja melalui Buku Rencana Tenaga Kerja 2017-2021 yang bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Upaya yang dilakukan untuk menekan angka pengangguran terbuka, antara lain :

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga keluaran hasil pelatihan tersertifikasi dan mampu bersaing pada dunia kerja.
2. Menyelenggarakan Bursa Kerja, baik Bursa Kerja Terbuka maupun Bursa Kerja Khusus.
3. Menjalin hubungan industrial yang kondusif guna mengurangi angka perselisihan hubungan industrial yang berdampak pada PHK.

2. Tingkat Kemiskinan

Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Tingkat Kemiskinan	6,44	6,39	6,39	6,38	6,23	6,37	5,69	6,36	5,32	6,35	6,34

Persentase kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan trend yang semakin menurun. Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 masih mencapai 6,72%, kemudian turun berturut-turut hingga menjadi 5,32% di tahun 2019.



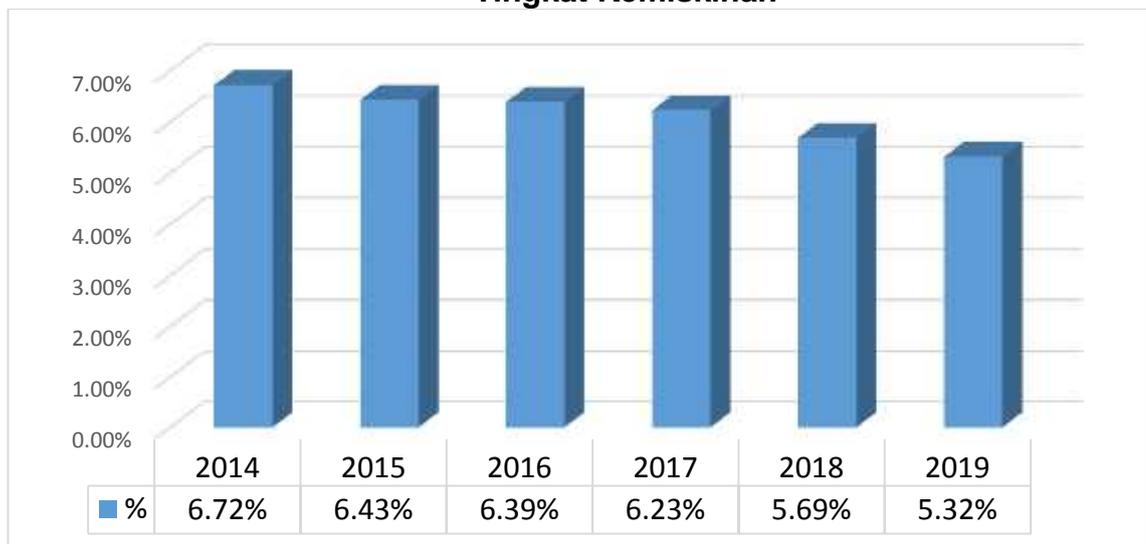
Selain memiliki trend menurun setiap tahunnya, persentase kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo juga masih di bawah persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Dari total penduduk Sidoarjo Tahun 2019 sebesar 2.266.533 jiwa, sebanyak 125,75 ribu jiwa atau 5,32 persen nya merupakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (miskin/ sangat miskin).

Untuk perhitungan P1 (Indeks Kedalaman) sebesar 1.03 dan perhitungan P2 (Indeks Keparahan) sebesar 0.31 dengan Garis Kemiskinan sebesar 437.899 rupiah / kapit / bulan.

Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo terlihat pada grafik sebagai berikut :

**Grafik III.B.5
Tingkat Kemiskinan**



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD sebesar 6,36% maka telah tercapai hingga 112,57% dan menurun sebesar 0,71% dari tahun 2018.

Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim Investasi, menjaga regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor potensial daerah, dan mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal.



3. Persentase Desa Maju

Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Persentase Desa Maju	17,4%	17,7%	17,7%	20,49%	20,49%	23,6%	12,73%	27,33%	32,92%	31,68%	36,65%

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diantaranya terdapat pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), yaitu Indek Komposit yang dibentuk dari Indek Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indek Ketahanan Lingkungan (IKL) untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Sangat Tertinggal dan peningkatan Desa Maju.

Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah :

- menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
- menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi :

- komponen Indeks Desa Membangun;
- status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
- penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.





Secara umum Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, masukan dalam perumusan targetting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Dalam RPJMD ditetapkan Status Desa Maju pada tahun 2019 sebesar 27,33% atau 88 Desa dengan capaian sebesar 106 desa atau 32,92% dari jumlah desa keseluruhan yaitu sebanyak 322 desa, Maka capaian kinerja Persentase Desa maju tahun 2019 sebesar 120,45%.

Apabila realisasi capaian kinerja tahun 2019 sebesar 32,92% dibandingkan dengan capaian tahun 2018 persentase desa maju sebesar 12,73% yaitu 41 desa, maka capaian kinerja tahun 2019 terdapat peningkatan sebanyak 65 desa atau 20,19%.

Jika realisasi capaian kinerja Desa Maju tahun 2019 sebesar 32,92% dibandingkan dengan target RPJMD diakhir periode (tahun 2021) yaitu 36,65% maka capaian kinerja Desa Maju tercapai sebesar 89,82%.



**Tabel III.B.2**

TREND STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA UPDATE IDM

No.	Status Desa	TAHUN 2019		TAHUN 2018		TAHUN 2017		TAHUN 2016	
		Jumlah Desa	%						
1.	Desa Mandiri	2 Desa	0,62%	0 desa	0%	0 desa	0%	0 desa	0%
2.	Desa Maju	106 Desa	32,92%	41 Desa	12,73%	66 desa	20,49%	57 desa	17,70%
3.	Desa Berkembang	211 Desa	65,53%	278 Desa	86,34%	207 desa	64,29%	189 desa	58,70%
4.	Desa Tertinggal	2 Desa	0,62%	1 Desa	0,31%	48 desa	14,91%	71 desa	22,05%
5.	Desa Sangat Tertinggal	1 Desa	0,31%	2 Desa	0,62%	1 desa	0,31%	5 desa	1,55%
	JUMLAH DESA	322 Desa		322 Desa		322 Desa		322 Desa	

Sumber Data : Dinas PMD Kab. Sidoarjo

Grafik III.B.5

Realisasi capaian Kinerja Persentase Desa Maju



Sumber Data : Dinas PMD Kab. Sidoarjo





MISI 3. Meningkatkan Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Untuk mencapai misi tersebut diatas ditetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 indikator tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator sasaran.

Hasil penilaian pencapaian tujuan dan sasaran misi ini pada tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Tujuan - Sasaran - Indikator	Tingkat keberhasilan
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	SANGAT BERHASIL
Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		
1.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	SANGAT BERHASIL
2.	Rata – Rata Lama Sekolah (RTLs)	BERHASIL
Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		
1.	Angka Harapan Hidup	SANGAT BERHASIL

Uraian hasil dan analisa pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator Kinerja Tujuan	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks Pembangunan Manusia	77,43	78,17	78,17	78,61	78,80	78,84	79,50	79,51	80,05	79,96	80,57

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI)



merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

UNDP menggunakan IPM ini sejak tahun 1990. Sebagai alat ukur tunggal dan sederhana, IPM sangat cocok sebagai alat ukur kualitas hidup dan kinerja pembangunan, khususnya pembangunan manusia yang dilakukan di suatu wilayah pada waktu tertentu atau secara lebih spesifik IPM merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup :

1. Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and healthy life*)

Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age*)

2. Pengetahuan (*knowledge*)

Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :

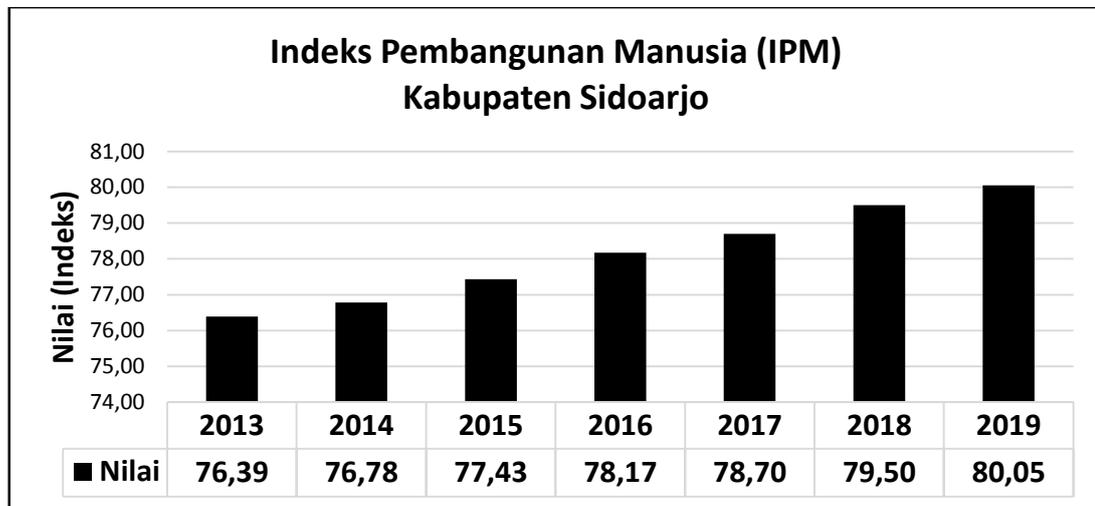
- a. Harapan Lama Sekolah (HLS)
- b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

3. Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

Dimensi ini dicerminkan oleh PDB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik III.C.1



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Angka IPM di kabupaten Sidoarjo mengalami kenaikan dari 76.39 tahun 2013 menjadi 80,05 tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 79.51, maka capaian tahun 2019 mencapai 100,68% dari target, serta meningkat 0,69% dari capaian tahun 2018 yang mencapai angka 79,50%.

Komponen – komponen yang mempengaruhi perhitungan IPM di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Tabel III.C.1

Indikator IPM Kabupaten Sidoarjo

INDIKATOR	SKOR
- Angka Harapan Hidup (tahun)	73,98
- Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,91
- Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,25
- Pengeluaran perkapita riil disesuaikan (Rp.000)	14.609

Sumber : BPS Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo menempati ranking 4 skor IPM se-Jawa Timur sekaligus mengungguli capaian IPM Provinsi Jawa Timur yang memiliki skor 71.50.

SASARAN : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat**1. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	13,69 tahun	14 tahun	14,13 tahun	14,25 tahun	14,34 tahun	14,25 tahun	14,25 tahun	14,35 tahun	14,91 tahun	14,45 tahun	14,55 tahun

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021 target untuk angka harapan

lama sekolah sampai dengan di tahun 2021 sebesar 14,55 tahun. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 14,75 tahun dengan angka ketercapaian sebesar 101,37%. Dibandingkan pada tahun 2018 realisasi untuk rata-rata lama sekolah sebesar 14,34 tahun. Hal tersebut bisa dikategorikan ada kenaikan sebesar 0,41 tahun.

Dengan realisasi angka 14,75 tahun tersebut dapat diartikan bahwa peserta didik lulusan SD sekarang di Kabupaten Sidoarjo punya potensi untuk bisa melanjutkan pada tingkat pendidikan Diploma II (DII).

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2019 sebagai berikut :



Sumber Data: Neraca Pendidikan Daerah (npd.data.kemdikbud.go.id)

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan angka harapan lama sekolah, antara lain:

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara umum dan secara khusus kepada pemangku kepentingan pendidikan termasuk kepada lembaga sekolah, madrasah dan lembaga-lembaga kursus yang



menyelenggarakan pendidikan (pendidikan informal) untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan.

- Memberikan aksesibilitas yang seluas-luasnya tentang layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat tentang pembiayaan sekolah gratis setingkat Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun.

2. Rata – Rata Lama Sekolah (RTLS)

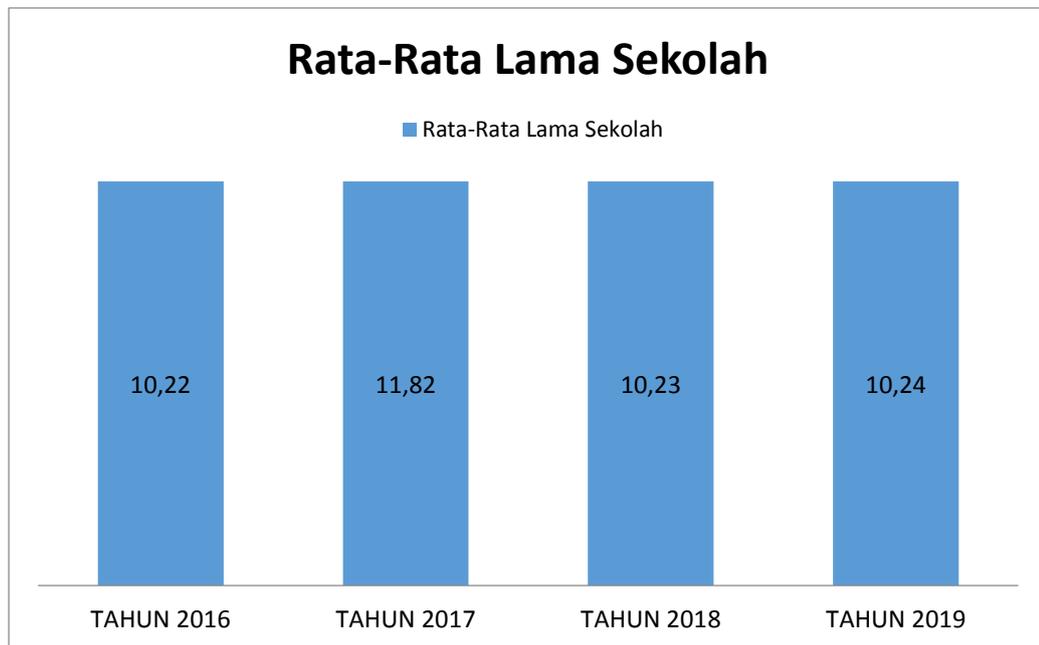
Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Rata – Rata Lama Sekolah (RTLS)	10,1 tahun	10,5 tahun	10,22 tahun	10,7 tahun	10,23 tahun	10,75 tahun	10,75 tahun	10,75 tahun	10,25 tahun	10,8 tahun	10,8 tahun

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan kombinasi angka partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Sedangkan definisi Lama Sekolah adalah banyaknya tahun seorang menjalankan pendidikan formal hingga saat dilakukan survey, baik yang sedang dijalani saat ini (sedang bersekolah) atau pun pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021 target untuk rata-rata lama sekolah sampai dengan di tahun 2021 sebesar 14,55 tahun. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 10,24 tahun dengan angka ketercapaian sebesar 94,81%. Dibandingkan pada tahun 2018 realisasi untuk rata-rata lama sekolah sebesar 10,23 tahun.

Dengan realisasi angka 10,24 tahun tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo rata-rata sudah dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan secara angka perhitungan ketercapaian rata-rata lama sekolah sudah mendekati Wajar Pendidikan Menengah 12 Tahun, pemenuhannya sebesar 1,76 tahun akan



kita intervensi melalui program bersama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.



Sumber Data: Neraca Pendidikan Daerah (npd.data.kemdikbud.go.id)

SASARAN : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

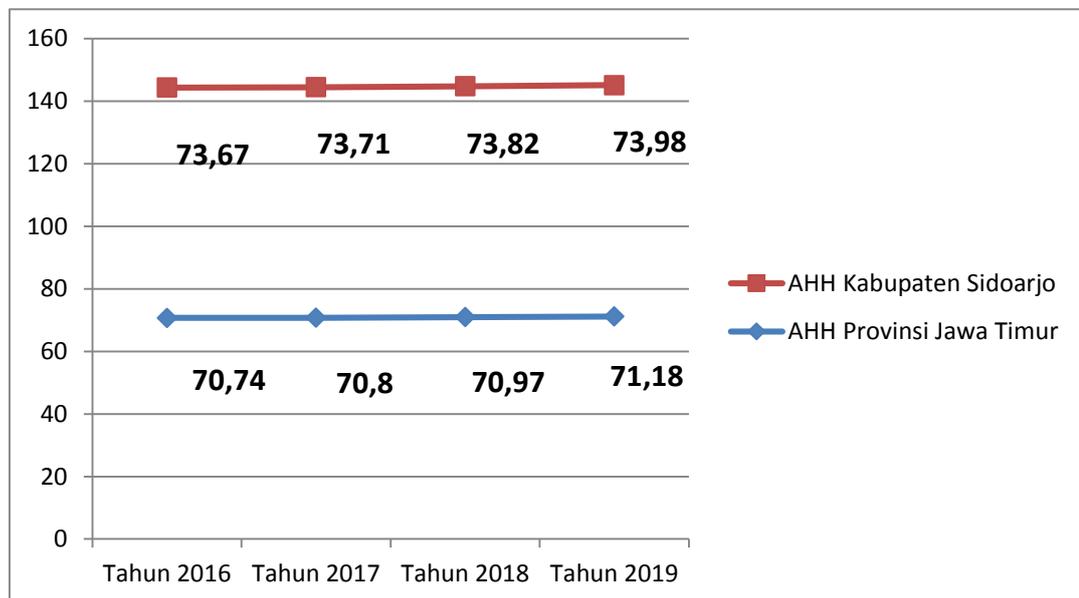
1. Angka Harapan Hidup

Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Angka Harapan Hidup	73,63 tahun	73,73 tahun	73,67 tahun	73,83 tahun	73,71 tahun	73,68 tahun	73,83 tahun	73,68 tahun	73,98 tahun	10,8 tahun	10,8 tahun

Angka harapan hidup waktu lahir (expectation of life at birth) yang biasanya dilambangkan dengan simbol e_0 dan sering disingkat dengan AHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

Tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), angka harapan hidup penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 mencapai 73,67. Levelnya terus naik menjadi 73,71 di tahun 2017; 73,82 di tahun 2018; dan 73,98 di tahun 2019

Grafik III.C.2
Angka Harapan Hidup Kabupaten Sidoarjo dan Propinsi Jawa Timur
Tahun 2016 - 2019



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada grafik diatas digambarkan bahwa dibanding dengan angka Propinsi Jawa Timur, Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Sidoarjo lebih baik. Hal ini seiring dengan semakin baiknya kecukupan gizi dan budaya ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi seluruh masyarakatnya.



Angka harapan hidup di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dari 73.67 pada tahun 2016 menjadi 73.98 pada tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2019 dengan umur 73,68 tahun, maka di tahun 2019 ini sudah mencapai 100,41% dan meningkat 0,22% dari capaian tahun 2018.





MISI 4. Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul Karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban

Untuk mencapai misi tersebut diatas ditetapkan sebanyak 1 tujuan, 1 indikator tujuan, 1 sasaran dan 3 indikator sasaran.

Hasil penilaian pencapaian tujuan dan sasaran misi ini pada tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Tujuan - Sasaran - Indikator	Tingkat keberhasilan
Tujuan : Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan		
1.	Indeks Kebahagiaan	SANGAT BERHASIL
Sasaran : Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan		
1.	Indeks Rasa Aman	SANGAT BERHASIL
2.	Indeks Resiko Bencana	CUKUP
3.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	BERHASIL

Uraian hasil dan analisa pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TUJUAN : Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan

1. Indeks Kebahagiaan

Indikator Kinerja Tujuan	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks Kebahagiaan	*)	77,11	77,11	77,65	78,58	78,23	79,37	79,83	80,28	80,47	81,14

Indeks kebahagiaan (IKH) merupakan rata-rata dari angka indeks yang dimiliki oleh setiap individu di Indonesia pada tahun 2014. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan yang semakin bahagia, demikian pula





sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka penduduk semakin tidak bahagia. Indeks kebahagiaan (IKH) merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap :

- 1) kesehatan,
- 2) pendidikan,
- 3) pekerjaan,
- 4) pendapatan rumah tangga,
- 5) keharmonisan keluarga,
- 6) ketersediaan waktu luang,
- 7) hubungan sosial,
- 8) kondisi rumah dan aset,
- 9) keadaan lingkungan, dan
- 10) kondisi keamanan.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo dituangkan program untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo dengan mengukur kebahagiaan dengan menggunakan formulasi perhitungan Indeks Kebahagiaan (IKH). Pengukuran indeks kebahagiaan (IKH) ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

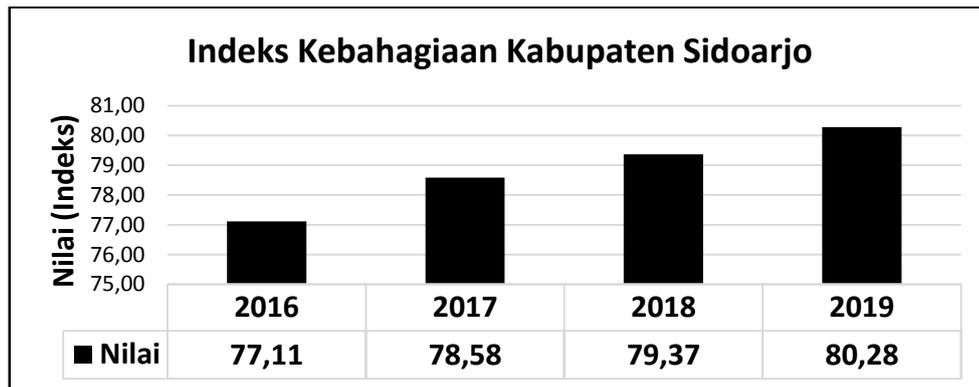
1. Menginformasikan tafsiran indeks kebahagiaan (IKH) penduduk Kabupaten Sidoarjo baik secara umum maupun indeks kebahagiaan menurut kondisi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan keharmonisan keluarga.
2. Menginformasikan tafsiran indeks kebahagiaan (IKH) penduduk Kabupaten Sidoarjo menurut variabel hubungan sosial, lingkungan, ketersediaan waktu luang, kondisi rumah dan aset, serta kondisi keamanan.



3. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan indeks kebahagiaan penduduk Kabupaten Sidoarjo

Berikut perkembangan Indeks Kebahagiaan di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik III.D.1



Sumber Data : Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Indeks kebahagiaan Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 adalah 80.28, indeks tersebut naik setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan peningkatan pada aspek keamanan, ketertiban, dan jaminan keadilan di Kabupaten Sidoarjo, sehingga penduduk merasa nyaman berada di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 79,83 maka telah tercapai sebesar 100,56%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun – tahun sebelumnya maka Indeks Kebahagiaa selalu meningkat, untuk tahun 2019 meningkat hingga 1,15% dari capaian tahun 2018.



SASARAN : Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan

1. Indeks Rasa Aman

Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks Rasa Aman	N/A	N/A	N/A	72,44	72,44	73,89	73,77	75,37	76,01	76,87	76,87

Indeks Rasa Aman digunakan untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Target yang ditetapkan di tahun 2019 dalam RPJMD untuk indeks rasa aman adalah 75,37% , sedangkan capaian tahun 2019 adalah 76,01%, sehingga tercapai 100,8%.

Keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis atau bisa juga keadaan aman dan tentram. Kenyamanan/rasa nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia salah satunya yaitu kebutuhan akan ketentraman.

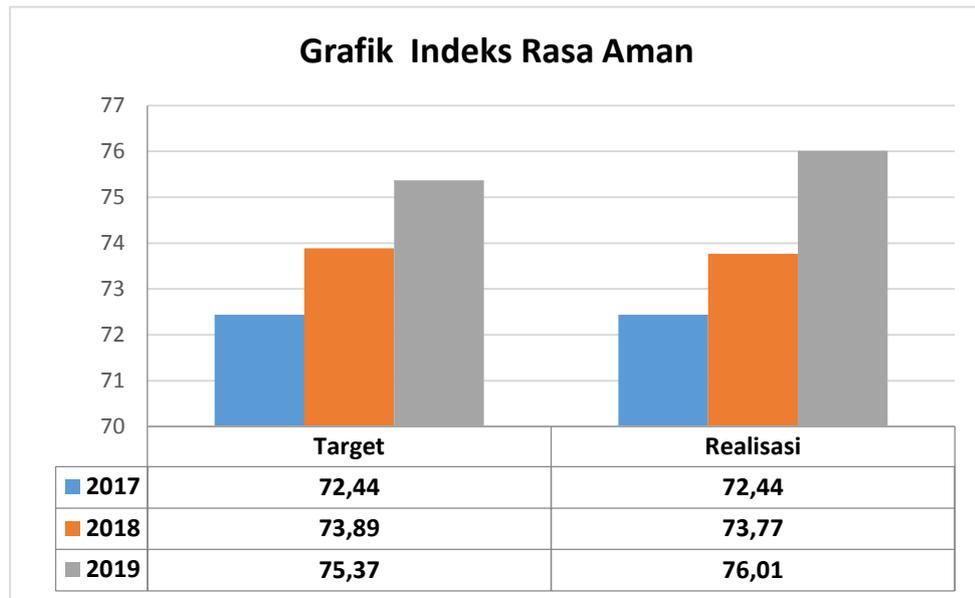
Mendasari definisi rasa aman diatas, indeks rasa aman dalam hal ini dapat diartikan sebagai petunjuk angka sebagai tolak ukur untuk mengukur dan mengetahui sejauhmana tingkat rasa aman/nyaman/ketentraman yang dirasakan warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari.

Pada tahun 2019 telah dilakukan survey/pengukuran indeks rasa aman di Kabupaten Sidoarjo, dengan responden 150 orang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan memperoleh hasil Nilai Indeks Rasa Aman 76,01 % dengan kategori Rasa Aman Tinggi.



Berikut perkembangan Indeks Rasa Aman di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2017 dan tahun 2018 :

Grafik III.D.2
Indeks Rasa Aman di Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Dengan capaian tersebut masih dapat dikatakan bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah yang aman dari konflik. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 75,37 maka tercapai 100,85%.

Indeks rasa aman di Kabupaten Sidoarjo apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2018) mengalami peningkatan hingga 3,04%, dan masih berada pada range kategori rasa aman tinggi (60.00 s.d 80.00).

2. Indeks Resiko Bencana

Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks Resiko Bencana	N/A	N/A	N/A	140,6	126,75	131,65	128,6	105	117,95	85	75

Pada Tahun 2014, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meluncurkan Index Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, yang merupakan potret resiko bencana di daerah.

IRBI 2013 ini berkontribusi dalam penyusunan RPJMN 2015 – 2019 bidang penanggulangan bencana.



Sumber : Peta Indeks Resiko Bencana BNPB 2013

Merujuk pada grafik diatas, pada hakikatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat pusat dan daerah, jika berpedoman pada dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana 2015-2019 adalah menurunkan indeks resiko bencana. Penurunan indeks resiko tersebut

sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya yaitu komponen **bahaya/ancaman**, komponen **kerentanan** dan komponen **kapasitas**.

$\text{Disaster Risk} = \frac{\text{Hazard (H) x Vulnerable (V)}}{\text{Capacity (C)}}$	Hazard / Ancaman : Ancaman / Potensi Bencana yang Terjadi di Sebuah Daerah (UU 24/2007 = 13 Jenis Ancaman Bencana).
$\text{Risiko Bencana} = \frac{\text{Ancaman x Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$	Vulnerable/Kerentanan : Kondisi atau keadaan yang dapat menimbulkan bahaya / ancaman bahkan bencana yang terdiri dari Kerentanan Fisik, Sosial, Ekonomi, Lingkungan dan Politik.
	Capacity / Kapasitas : Intensitas Kemampuan Komunitas / Masyarakat dalam Menghadapi Ancaman dan atau Bencana yang berwujud KETANGGUHAN .

Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, maka indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui **peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas)**. Pengaruh masing-masing komponen (bobot) dalam penentuan indeks risiko bencana adalah komponen bahaya 40%, komponen kerentanan 30% dan komponen kapasitas 30%. Jadi berdasarkan pengaruh dari ketiga komponen penyusun indeks risiko bencana, maka komponen kerentanan berupa coping capacities dan kapasitas merupakan komponen yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk menurunkan indeks risiko bencana. Berdasarkan uraian pengaruh masing-masing komponen dalam penurunan indeks risiko bencana, maka target utama dalam penurunan indeks risiko bencana adalah **komponen coping capacities dan kapasitas sebesar 30% selama 5 tahun**.

Pengkajian resiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Dalam pelaksanaannya, pengkajian resiko menggunakan rumus umum sebagai berikut :

$$R_{isk} = H_{azard} \frac{V_{ulnerability}}{C_{apacity}}$$

Dalam melakukan kajian risiko bencana, pendekatan fungsi dari tiga parameter pembentuk risiko bencana, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas terkait bencana.

Target penurunan indeks risiko bencana sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya yaitu komponen bahaya, komponen kerentanan dan komponen kapasitas. Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, maka indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Pengaruh masing-masing komponen (bobot) dalam penentuan indeks risiko bencana adalah komponen bahaya 40%, komponen kerentanan 30% dan komponen kapasitas 30%.

Jadi berdasarkan pengaruh dari ketiga komponen penyusun indeks risiko bencana, maka komponen kerentanan berupa coping capacities dan kapasitas merupakan komponen yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk menurunkan indeks risiko bencana. Berdasarkan uraian pengaruh masing-masing komponen dalam penurunan indeks risiko bencana, maka target utama dalam penurunan indeks risiko bencana adalah komponen coping capacities dan kapasitas sebesar 30% selama 5 tahun (2015-2019). Sehingga strategi penurunan indeks risiko bencana adalah dengan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana.



Perhitungan IRB Tahun 2019 pada Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), dengan berbagai pihak terkait yang berkompeten dengan kegiatan perhitungan Indeks Risiko Bencana, baik dengan kelompok pakar (perguruan tinggi/NGO), kelompok dinas/instansi pemerintah, dan pihak swasta / masyarakat lainnya (2 kali pelaksanaan).

Perhitungan untuk skor Indeks Risiko Bencana tahun 2019 didasarkan atas kalkulasi Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang terdiri dari 7 (tujuh) fokus prioritas dan 16 (enam belas) sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Dari pencapaian 71 indikator tersebut, diperoleh nilai ketahanan daerah dengan rentang nilai ketahanan antara 1 s/d 5, dimana nilai 1 (satu) paling rendah, 5 (lima) paling tinggi.

Adapun makna nilai ketahanan adalah sebagai berikut :

1. Level 1, belum ada inisiatif untuk menyelenggarakan / menghasilkannya;
2. Level 2, hasil / penyelenggaraan telah dimulai namun belum selesai atau belum dengan kualitas standard;
3. Level 3, tersedia / terselenggarakan namun manfaatnya belum terasa menyeluruh;
4. Level 4, telah dirasakan manfaatnya secara optimal, dan
5. Level 5, manfaat dari hasil / penyelenggaraan mewujudkan perubahan jangka panjang

Berdasarkan hasil perhitungan IKD tahun 2019, maka dapat diperoleh skor Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 yakni dengan skor sebesar 117.95, seperti yang terlihat pada histogram dibawah ini :



Grafik III.D.3

Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Diolah dari hasil perhitungan IKD 2019

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa nilai IRB Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar **117,95** atau turun **31,65 poin** dari baseline 149,6. Apabila dibandingkan dengan target 105 poin maka tercapai sebesar 89,02%. Sedangkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 12,95 poin atau 10,98%.

3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

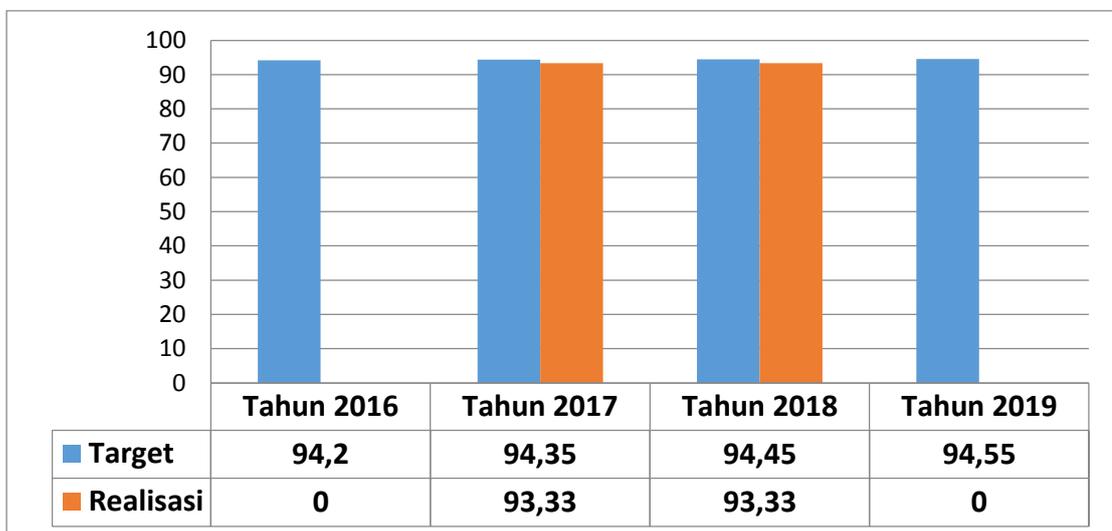
Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,28	94,2	N/A	94,35	93,33	94,45	93,33	94,55	93,33	94,65	94,75

Gender Development Indeks (GDI) atau Indeks Pembangunan Jender (IPG) digunakan untuk mengetahui adanya ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan disparitas jender. Komponen pendukung IPG sama dengan komponen pendukung IPM yaitu meliputi dimensi Kesehatan yang digambarkan dari Angka Harapan Hidup, Pengetahuan yang digambarkan dari Harapan Lama Sekolah dan Rata – rata lama Sekolah serta Ekonomi yang digambarkan dengan Pengeluaran Perkapita. Perbedaannya adalah bahwa dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) komponen pendukungnya disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dengan nilai minimum dan maksimum

Perkembangan IPG adalah sebagai berikut :

Grafik III.D.4

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sidoarjo



Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo



Dari hasil penghitungan komponen pendukung Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat dilihat bahwa pencapaian Indeks Pembangunan Gender tahun 2018 sebesar 93,33% atau tercapai 98,71% dari target IPG tahun 2019 sebesar 94,55%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 93,33%, maka capaian masih sama atau cenderung stabil.

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sidoarjo berdasarkan data BPS untuk tahun 2019 belum dapat dikeluarkan dikarenakan masih dalam proses perhitungan oleh BPS, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2018.





MISI 5. Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

Untuk mencapai misi tersebut diatas ditetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 indikator tujuan, 2 sasaran dan 5 indikator sasaran.

Hasil penilaian pencapaian tujuan dan sasaran misi ini pada tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Tujuan - Sasaran - Indikator	Tingkat keberhasilan
Tujuan : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup		
1.	Indeks Infrastruktur	BERHASIL
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	SANGAT BERHASIL
Sasaran : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah		
1.	Persentase Jalan Kondisi Mantap	SANGAT BERHASIL
2.	Persentase Penurunan Luas Area Rawan Genang Banjir	CUKUP
Sasaran : Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup		
1.	Indeks Kualitas Air	BERHASIL
2.	Indeks Kualitas Udara	BERHASIL
3.	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	SANGAT BERHASIL

Uraian hasil dan analisa pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TUJUAN : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup

1. Indeks Infrastruktur

Indikator Kinerja Tujuan	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks Infrastruktur	1,402	1,406	1,406	1,41	1,41	1,414	1,419	1,418	1,417	1,422	1,426

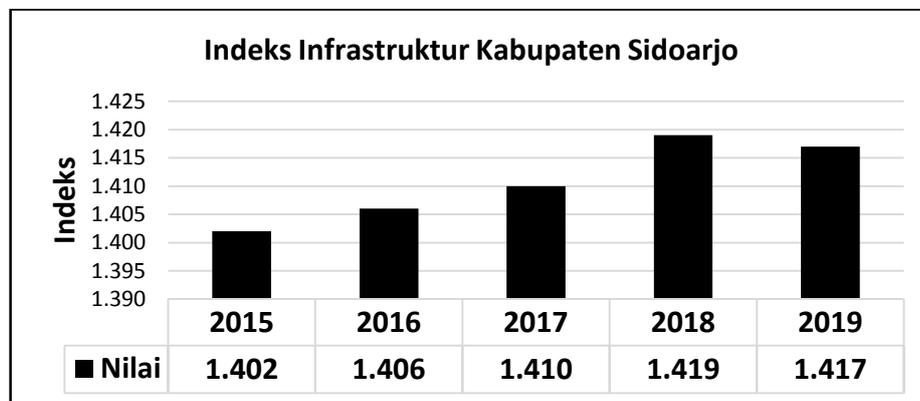


Indeks pengukuran infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, bendungan, pasar, rusunawa dan jalan kereta api.

Manfaat dari pengukuran indeks infrastruktur ini adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan, kelayakan, dan pelayanan dari pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Berikut perkembangan Indeks Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo :

Grafik III.E.1



Sumber Data : Bappeda Kabupaten Sidoarjo

Peningkatan indeks infrastruktur dikarenakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam peningkatan pembangunan infrastruktur, yang meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pengelolaan sampah, transportasi, perhubungan, telekomunikasi dan informatika, jalan, jembatan, pengendalian banjir, rusunawa, dan gedung terpadu pemerintahan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 1.418, maka telah tercapai 99,93%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun tahun 2018 maka mengalami penurunan sebesar 0,14%.



2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Kinerja Tujuan	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	49,47	49,26	49,26	50,01	48,79	51,01	55,10	52,01	61,03	53,01	54,26

Target yang ditetapkan di tahun 2019 dalam RPJMD untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 52,01 sedangkan realisasi Tahun 2019 sebesar 61,03 dimana nilai tersebut termasuk dalam rentang **kategori IKLH Kurang** walaupun capaian kinerja di Tahun 2019 sebesar 117 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 55,10 maka realisasi di Tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan salah satu komponen Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan/ Vegetasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018. Hasil Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan dihitung melalui metode analisis citra satelit dengan skala yang lebih tinggi dibanding tahun 2018 sehingga luas tutupan lahan di Kabupaten Sidoarjo dapat terinventarisasi dengan baik dan menyeluruh. Terhadap Nilai / Skor IKLH dalam kategori Kurang seyogyanya masih dalam posisi yang cukup aman karena Target IKLH Nasional Tahun 2019 pun hanya sebesar 66,5 - 68,5 (kategori cukup) berada pada 1 (satu) tingkat kategori di atas Kabupaten Sidoarjo. Nilai / Skor IKLH dalam kategori Kurang disebabkan:

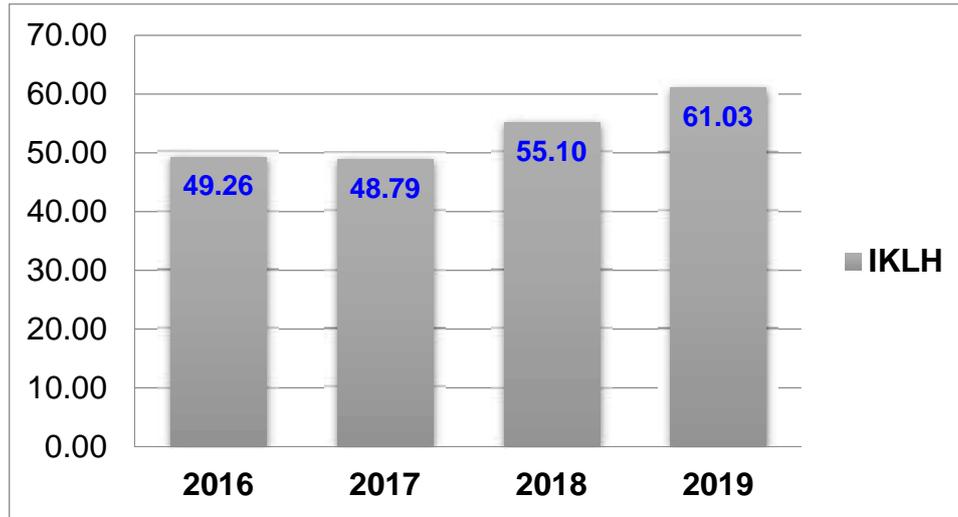
- 1) Baseline IKLH Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 dengan nilai/skor 49,26 (kategori waspada) sehingga sulit untuk meningkatkan nilai/skor IKLH ke kategori baik;





- 2) Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas menyebabkan tingkat pencemaran air sungai di Kabupaten Sidoarjo cukup tinggi sehingga sulit untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) secara signifikan;

Adapun perkembangan nilai/skor IKLH tiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber Data : DLHK Kabupaten Sidoarjo

SASARAN : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah

1. Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap

Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	95,15%	82%	95,3%	84%	95,9%	85%	93,06%	87%	91,48%	90%	95%





Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menyediakan jalan dan jembatan bagi masyarakat. Panjang jalan kabupaten sampai dengan tahun 2019 sepanjang 1012,08 km. Adapun Jalan Mantap itu sendiri adalah jalan dengan kondisi konstruksi yang mana untuk penanganannya hanya membutuhkan kegiatan pemeliharaan. Jalan mantap konstruksi ditetapkan menurut Standar Pelayanan Minimal adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang, dengan besar IRI < 6 m/km (*Parameter kerataan jalan atau International Roughness Index*). Sedangkan Jalan Tak Mantap Konstruksi adalah jalan dengan kondisi di luar koridor mantap yang mana untuk penanganan minimumnya adalah pemeliharaan berkala dan maksimum peningkatan jalan dengan tujuan untuk menambah nilai struktur konstruksi. Berikut kondisi seluruh jalan kabupaten baik mantap maupun tak mantap sebagai berikut :

No	Kondisi	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
1	Baik	849,446	84,6	887,153	87,9	826,68	81,68	683,037	67,49
2	Sedang	107,5	10,7	80,581	8,0	115,15	11,38	242,808	23,99
Jalan Mantap		956,946	95,3	967,734	95,9	941,83	93,06	925,845	91,48
3	Rusak	47,006	4,7	41,946	4,1	70,25	6,94	86,217	8,52%
Jumlah		1003,95	100	1009,68	100	1012,08	100	1012,08	100%

Meskipun pada pembangunan jalan nilai realisasinya rendah dikarenakan masih ada Pembangunan Jalan Frontage Road Waru-Buduran belum dapat direalisasikan. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi kondisi jalan mantap yang ada di kabupaten Sidoarjo, karena sebagian besar Jalan yang ada sudah masuk kategori Jalan Mantap.

Untuk tahun 2019 kondisi jalan mantap mengalami penurunan dan kondisi jalan rusak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini disebabkan karena :

1. Anggaran dialihkan kedalam kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan kontruksi Jalan beton dengan maksud untuk memperpanjang



- umur teknis jalan, sehingga anggaran penanganan jalan rusak melalui swakelola dan pemeliharaan rutin jalan banyak terserap di kegiatan atas.
2. Harga satuan untuk pembangunan jalan beton lebih tinggi dari jalan aspal, sehingga pembangunan yang diperoleh juga tidak sepanjang menggunakan harga satuan jalan aspal.
 3. Adanya penetapan PAPBD yang terlambat, sehingga penyerapan anggaran tidak optimal.
 4. Terdapat kegiatan Peningkatan Jalan yang gagal lelang dan peningkatan jembatan yang mengalami putus kontrak dikarenakan penyedia wanprestasi.

Grafik III.E.2



Sumber Data : Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo

Meskipun begitu target tahun 2019 kondisi jalan kabupaten dalam kondisi mantap 87% dapat terealisasi menjadi 91,48%, sehingga capaian atas target tersebut sebesar 105,14 %.



Adapun pada tahun 2019 upaya yang dilakukan untuk meningkatkan panjang jalan dalam kondisi mantap, antara lain :

1. Kegiatan Pembangunan Jalan sepanjang 1.458 meter dengan biaya Rp.25.800.216.166,00;
2. Kegiatan Peningkatan Jalan sepanjang 20.350 meter dengan biaya Rp.86.151.303.979,00;
3. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan sepanjang 133.543 meter dengan biaya Rp.37.958.455.427,72.

2. Persentase Penurunan Luas Wilayah Rawan Genangan Banjir

Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Persentase Penurunan Luas Wilayah Rawan Genangan Banjir	0%	30%	40%	50%	42%	55%	50%	60%	53,3%	65%	70%

Adapun target tahun 2019 adalah sebesar 65%, sedangkan tahun 2019 kondisi genangan di Kabupaten Sidoarjo adalah 523,4 Ha, jadi realisasi hanya 53,3% yang diperoleh dari 523,4 Ha / 982 Ha. Sehingga capaian atas realisasi dibagi target adalah 85%.

Target	Realisasi	Capaian
65%	53,3%	82%

Untuk mengendalikan genangan / banjir di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan daerah delta telah dilakukan pengendalian/ penanganan secara koordinatif antar dinas terkait.



Upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Ketepatan dalam manajemen pengelolaan air
2. Normalisasi saluran dan afvoer
3. Operasional dan pemeliharaan pintu – pintu air pada Dam / bending
4. Operasional rumah pompa / busem
5. Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuang yang menuju afvoer utama

Rincian lebih lanjut lokasi genangan yang terjadi sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Lokasi Genangan

	Lokasi	2016 (Ha)	2017 (Ha)	2018 (Ha)	2019 (Ha)
1	Pertanian	509	490	405	471,4
2	Permukiman	90	82	68	52
	Jumlah	599	572	503	523,4

Adapun Grafiknya adalah sebagai berikut :

Grafik III.E.3



Sumber Data : Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo



Penurunan luas genangan baik di pertanian dan pemukiman juga dikarenakan koordinasi antar *stakeholder*. Selain itu upaya penurunan genangan diantaranya adalah adanya peran serta pengembang untuk menyediakan lahan resapan/buzem serta peran masyarakat tidak membuang sampah di saluran, sehingga air yang tergenang dapat mengalir pada saluran yang tersedia.

SASARAN : Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Air

Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks Kualitas Air	46,97	49,54	49,54	50,29	49,77	51,29	49,59	52,29	49,05	53,29	54,54

Indeks Kualitas Air merupakan hasil dari penjumlahan nilai status mutu air. Jumlah pemantauan kualitas air dilakukan sebanyak 42 pemantauan. Pemantauan kualitas air dilakukan di 3 sungai antara lain Saluran Buntung, Saluran Kedunguling dan Saluran Pucang. Pemantauan dilakukan masing-masing Saluran / kali terdapat 7 lokasi dengan intensitas 2 kali pemantauan di Bulan Maret dan Bulan Agustus. Metodologi perhitungan Indeks Kualitas Air berpedoman pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. **Target yang ditetapkan di tahun 2019 dalam RPJMD sebesar 52,29** sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 49,05 sehingga capaian kinerja di Tahun 2019 sebesar 94%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 49,59 maka realisasi di Tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh :

- a. Posisi Kabupaten Sidoarjo yang berada di hilir Sungai Brantas akan menambah kontribusi pencemaran yang signifikan karena pencemaran air badan air sudah terjadi mulai dari hulu;





- b. Adanya peningkatan jumlah penduduk dimana Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah yang strategis sebagai penyanggah Ibukota Provinsi Jawa Timur akan menambah kontribusi pencemaran limbah domestik ke sungai dan semakin diperparah oleh aktivitas sumber pencemar yang beragam di sepanjang sungai;
- c. Adanya sumber pencemar yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi (*non-point sources*), misal: kegiatan rumah tangga atau permukiman yang tidak dilengkapi dengan IPAL Komunal, kegiatan pertanian dan peternakan sehingga menyebabkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) berfluktuatif tiap tahunnya;
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga di sungai.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air antara lain :

- a. Menyusun sistem informasi yang lengkap terkait kondisi kualitas sungai dalam mendukung kebijakan pengendalian pencemaran air dan dapat diakses oleh setiap orang.
 - 1) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (DLHK) telah menyusun suatu sistem informasi “Geo Lingkungan” yang menggambarkan berbagai sumber pencemar air sungai di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar, hasil uji kualitas air sungai, foto kondisi sungai, foto kegiatan pengambilan sampel air sungai. Sistem informasi tersebut dapat diakses secara online oleh publik yang akan terus diupdate sesuai sungai-sungai hasil Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar tiap tahunnya.
 - 2) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (DLHK) bekerja sama dengan KLHK memasang alat pemantauan kualitas air secara online (Onlimo) dengan hasil berupa status mutu air Saluran Pelayaran (yang merupakan intake PDAM, Tawangsari, Taman) dalam kondisi





memenuhi, tercemar ringan, tercemar sedang atau tercemar berat. Hasil tersebut ditampilkan pada media televisi yang terpasang di Kantor DLHK.

- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air bagi UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Kabupaten Sidoarjo;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran, berupa sosialisasi bagi masyarakat di sepanjang sungai, sosialisasi bagi pelaku usaha yang berpotensi menghasilkan air limbah;
- d. Menggalakkan pengolahan sampah secara terpadu dan pengolahan sampah secara 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) atau tuntas di tempat (berbasis “Zero Waste”), melalui SBH, Zero Waste Academy, pembinaan sekolah Adiwiyata, pembinaan Desa Berseri;
- e. Pembuatan taman di sempadan sungai;
Untuk kawasan konservasi pada bantaran sungai, dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau secara maksimal, yang berfungsi menahan erosi, resapan air, dan taman kota / hutan kota. Di Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa taman pada sempadan sungai yaitu Taman Prahu, Hutan Kota “Delta Putri”, Taman Belokan Pagerwojo, dan Taman Berbek Waru Sidoarjo.
- f. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan industri dan kegiatan/usaha lainnya dalam pengendalian pencemaran air dan kesadaran terhadap pemenuhan Izin pembuangan Air Limbah;



- g. Melakukan kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air yang ditindaklanjuti dengan kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup bagi ekosistem air sungai;
- h. Penegakan hukum terhadap pengendalian pencemaran air sesuai peraturan yang berlaku, seperti melakukan verifikasi lapang terkait pengaduan pencemaran air;



- i. Melakukan kegiatan patroli air;
Kegiatan patroli air yang dilakukan bertujuan untuk dapat menemukan dan menindak tegas oknum-oknum atau masyarakat yang melakukan pencemaran air dikarenakan sampai saat ini, di Kabupaten Sidoarjo masih marak pencemaran air limbah industri. Saat ini tim daerah masih mengikuti kegiatan Patroli air bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Perum Jasa Tirta;



- j. Menggalakkan aksi bersih-bersih sungai yang melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat;

Aksi bersih sungai ini adalah kegiatan kerja bakti mengambil sampah di sungai dan di area sepanjang sungai. Aksi ini mendapat antusias yang tinggi karena diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, antara lain: Bupati Sidoarjo dan jajarannya, seluruh OPD di Kabupaten Sidoarjo, TNI, Polisi, pelajar dan warga.



k. Melakukan monitoring kualitas air secara berkala;

Kegiatan pemantauan air badan air merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui trend analisis kualitas air sungai secara time series guna dalam penentuan program kegiatan serta kebijakan di tahun berikutnya.



l. Memasang papan peringatan untuk tidak membuang sampah ke sungai. Kegiatan tersebut telah dianggarkan dan akan dilaksanakan pada tahun 2020 yang mana papan peringatan akan dipasang di titik pantau sungai prioritas IKLH.

2. Indeks Kualitas Udara

Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks Kualitas Udara	87,51	84,04	84,04	84,79	82,05	85,79	85,04	86,79	86,26	87,79	89,04



Indeks Kualitas Udara merupakan hasil rerata IEU SO₂ dan IEU NO₂ yang selanjutnya dikonversi melalui persamaan Indeks Kualitas Udara. Indeks Kualitas Udara diperoleh dari data passive sampler di 4 Kawasan yaitu Transportasi, Industri / Agro Industri, Pemukiman dan Perkantoran / Komersial dilakukan sebanyak 2 kali pemantauan di Semester 1 dan 2. Metodologi perhitungan indeks kualitas udara mengadopsi Program European Union melalui European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project, yaitu “Common Information to European Air” (Citeair II) dengan judul CAQI Air Quality Index: *Comparing Urban Air Quality across Borders – 2012*. **Target yang ditetapkan di tahun 2019 dalam RPJMD sebesar 86,79** Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 86,26 sehingga capaian kinerja di Tahun 2019 sebesar 99%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 85,04 maka realisasi di Tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh :

- a. Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Sidoarjo semakin peduli terhadap pengendalian pencemaran udara;
- b. Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Sidoarjo semakin peduli terhadap penggunaan energi yang dulunya menggunakan bahan bakar minyak beralih menjadi bahan bakar gas;
- c. Masyarakat semakin peduli dalam penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang ramah lingkungan;
- d. Pengguna kendaraan bermotor semakin peduli dalam melakukan perawatan terhadap kendaraannya.



Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Udara antara lain :

- a. Menyusun sistem informasi yang lengkap terkait kondisi kualitas udara ambien dalam mendukung kebijakan pengendalian pencemaran udara; Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (DLHK) bekerja sama dengan BMKG memasang alat pemantau kualitas udara Air Quality System (AQS) di area Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan hasil pengujian real time yang dapat dikonversikan ke Indeks standart Pencemar Udara (ISPU) untuk menentukan kualitas udara dalam kondisi sehat atau tidak. Hasil tersebut dapat ditampilkan dalam videotron yang terpasang di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pemantauan kualitas udara bagi UPTD Laboratorium Lingkungan DLHK Kabupaten Sidoarjo;
- c. Melakukan monitoring kualitas udara ambien berkala; Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di 4 (empat) kawasan yaitu kawasan perumahan, transportasi, industri dan kawasan perdagangan.



- d. Meningkatkan pembinaan/pelatihan pengendalian pencemaran udara kepada masyarakat, seperti: Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim;



- e. Melakukan pemantauan kualitas udara pada saat Car Free Day;
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien pada saat Car Free Day di 6 (enam) titik lokasi pemantauan, yaitu Alun-Alun depan Monumen Jayandaru, Alun-Alun depan Masjid Agung, Depan Pemkab Sidoarjo, Depan Pendopo Sidoarjo, Depan Bank Delta Artha, Pertigaan Jl. Yos Sudarso.



- f. Melakukan kegiatan pengujian emisi kendaraan bermotor secara berkala yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, laboratorium, dan berbagai pihak swasta; Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kualitas udara emisi gas buang kendaraan bermotor dan mensosialisasikan pentingnya menjaga emisi kendaraan agar tidak melebihi ambang batas baku mutu yang telah ditetapkan.



- g. Melakukan kegiatan penghijauan; Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan penghijauan pada median dan pedestrian jalan, utamanya tanaman penyerap polutan.



- h. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan industri dan kegiatan/usaha lainnya dalam pengendalian pencemaran udara;



- i. Penanganan perlakuan industri dan usaha/kegiatan lainnya terhadap perlakuan emisi cerobongnya, yaitu dengan memasang penyaring udara pada cerobong asap;



- j. Penegakan hukum terhadap pengendalian pencemaran udara sesuai peraturan yang berlaku, seperti melakukan verifikasi lapang terkait pengaduan pencemaran udara.



3. Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi

Indikator Kinerja Sasaran	Baseline Tahun 2015	Target Tahun 2016	Realisasi Tahun 2016	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	22,81	22,97	22,97	23,72	23,11	24,72	36,77	25,72	51,09	26,72	27,97

Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi merupakan hasil pembagian luas tutupan lahan di Sidoarjo dan luas Wilayah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya dikonversi melalui persamaan Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi. **Target yang ditetapkan di tahun 2019 dalam RPJMD sebesar 25,72** sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar 51,09 sehingga capaian kinerja di Tahun 2019 sebesar 199%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar 36,77 maka realisasi di Tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh pada Tahun 2019 hasil Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan dihitung melalui metode analisis citra satelit dengan skala yang lebih tinggi dibanding tahun 2018 sehingga luas tutupan lahan di Kabupaten Sidoarjo dapat terinventarisasi dengan baik dan menyeluruh. Namun demikian, kedepannya masih akan dilakukan peningkatan luas tutupan vegetasi melalui penambahan Ruang Terbuka Hijau.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi antara lain:

- a. Melakukan inventarisasi tutupan lahan/ vegetasi secara periodik;
Pada tahun 2018, DLHK menyusun Dokumen Inventarisasi tutupan vegetasi dan dilanjutkan pada tahun 2019 namun terlingkup pada kegiatan penyusunan Dokumen IKLH.





Inventarisasi Vegetasi di Median Jalan



Inventarisasi Vegetasi Tanaman Bakau



Inventarisasi Vegetasi di Sempadan Sungai



Inventarisasi Vegetasi di Taman Perumahan

- b. Monitoring dan evaluasi kualitas tanah untuk mengetahui tingkat kerusakan tanah di lahan kering;



c. Melakukan penghijauan;

Kegiatan penghijauan merupakan kegiatan penanaman pada lahan kosong terutama pada tanah milik rakyat dengan tanaman keras, misalnya jenis-jenis pohon hutan, pohon buah, tanaman perkebunan, tanaman penguat teras, tanaman pupuk hijau, dan rumput pakan ternak. Tujuan penanaman agar lahan tersebut dapat dipulihkan, dipertahankan, dan ditingkatkan kembali kesuburannya.

d. Meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat tentang upaya penghijauan, seperti: melalui kegiatan pelatihan hidroponik, adiwiyata sekolah, desa berseri, Sidoarjo Bersih dan Hijau (SBH), dan lain-lain;

e. Meningkatkan kualitas tutupan lahan di Kawasan Lapindo sebagai Area Terdampak bencana lumpur lapindo.

Kawasan mangrove pesisir lebih tepatnya di Kecamatan Jabon merupakan hutan mangrove yang terbentuk akibat endapan lumpur Sidoarjo sehingga dikenal dengan PULAU LUSI (Pulau Lumpur Sidoarjo).



**C. AKUNTABILITAS KEUANGAN****1. Pendapatan Daerah**

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.708.311.077.856,00	1.689.953.713.262,69	98,93
1.2.	DANA PERIMBANGAN	1.807.667.515.000,00	1.779.140.856.326,00	98,42
1.3.	LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH	878.927.886.040,00	975.532.277.036,00	110,99
	JUMLAH PENDAPATAN	4.394.906.478.896,00	4.444.626.846.624,69	101,13

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK dan cut off per tanggal 12 Maret 2020

Realisasi seluruh pendapatan daerah pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.444.626.846.624,69 atau 101,13% dari target / anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 4.394.906.478.896,00.

Realisasi pendapatan daerah tahun 2019 secara umum tercapai, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019 sebesar Rp.1.689.953.713.262,69 atau tercapai sebesar 98,93% dari seluruh target PAD sebesar Rp.1.708.311.077.856,00.





Rincian realisasi dan target PAD tahun 2019 adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN ASLI DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1.1.	Pajak Daerah	1.009.946.880.000,00	1.032.160.117.012,09	102,20
1.1.2.	Retribusi Daerah	65.940.720.750,00	72.709.215.824,40	110,26
1.1.3.	Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	35.080.939.322,50	37.034.170.234,50	105,57
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	597.342.537.783,50	548.050.210.191,70	91,75
	JUMLAH	1.708.311.077.856,00	1.689.953.713.262,69	98,93

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK dan cut off per tanggal 12 Maret 2020

b. Pajak Daerah

Pajak daerah tahun 2019 realisasinya tercapai sebesar Rp.1.032.160.117.012,09 atau 102,20% dari seluruh target penerimaan pajak daerah.

JENIS / OBYEK PAJAK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Pajak Daerah	1.009.946.880.000,00	1.032.160.117.012,09	102,20
Pajak Hotel	16.500.000.000,00	19.160.663.229,22	116,13
Pajak Restoran	84.500.000.000,00	89.374.707.617,70	105,77
Pajak Hiburan	8.000.000.000,00	8.744.464.694,49	109,31
Pajak Reklame	13.500.000.000,00	13.802.744.150,00	102,24
Pajak Penerangan Jalan	329.000.000.000,00	305.381.298.528,68	92,82
Pajak Parkir	23.500.000.000,00	22.088.671.963,00	93,99
Pajak Air Tanah	1.946.880.000,00	2.142.995.182,00	110,07
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	227.000.000.000,00	237.461.681.071,00	104,61
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	306.000.000.000,00	334.002.890.576,00	109,15

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK dan cut off per tanggal 12 Maret 2020



**c. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.72.709.215.824,40 atau tercapai 110,26% dari seluruh target retribusi daerah yang ditetapkan.

Seluruh jenis retribusi realisasinya terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK RETRIBUSI	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Retribusi Daerah	65.940.720.750,00	72.709.215.824,40	110,26
Retribusi Jasa Umum	24.075.667.500,00	26.813.435.336,00	111,37
Retribusi Jasa Usaha	7.792.944.500,00	17.496.374.780,00	224,52
Retribusi Perizinan Tertentu	34.072.108.750,00	28.399.405.708,40	83,35

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK dan cut off per tanggal 12 Maret 2020

d. Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pendapatan hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.35.080.939.322,50 dan terealisasi sebesar Rp.37.034.170.234,50 atau tercapai sebesar 105,57%.

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD			
Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta"	12.000.000.000,00	13.953.230.912,00	116,28
PD Aneka Usaha "Delta Grafika"	341.332.790,00	341.332.790,00	100,00
BPR "Delta Artha"	5.856.798.214,00	5.856.798.214,00	100,00
Bank Jatim	16.882.808.318,50	16.882.808.318,50	100,00
JUMLAH	35.080.939.322,50	37.034.170.234,50	105,57

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK dan cut off per tanggal 12 Maret 2020

e. Penerimaan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan lain – lain PAD tahun 2019 sebesar Rp.548.050.210.191,70 atau tercapai 91,75%, dari target yang ditetapkan sebesar Rp.597.342.537.783,50.





JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Secara Tunai atau Angsuran Cicilan	223.625.000,00	455.583.783,00	203,73
Penerimaan Jasa Giro	6.632.843.598,00	7.121.262.200,77	107,36
Pendapatan Bunga Deposito	57.381.643.868,00	61.348.653.592,86	106,91
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	38.029.600,00	55.323.600,00	145,48
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	323.088.414,76	1.449.534.620,31	448,65
Pendapatan Denda Pajak	2.828.637.629,00	6.709.014.276,00	237,18
Pendapatan Denda Retribusi	168.957.106,00	359.919.461,00	213,02
Pendapatan Dari Pengembalian	5.940.700.296,74	7.088.268.505,74	119,32
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	470.000.000,00	366.372.641,00	77,95
Pendapatan Dari Sewa Aset Pemda (Rumah/Gedung/Tanah/Lahan)	22.868.034.500,00	23.145.479.829,00	101,21
Pendapatan Dari Kesepakatan dan Kerjasama	728.000.000,00	1.010.419.317,00	138,79
Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	499.392.674.290,00	438.373.961.360,16	87,78
Pendapatan Dari Penjualan Hasil Pasar Murah	203.580.000,00	203.580.000,00	100,00
Pendapatan dari Penerimaan Lain-lain	142.723.481,00	362.837.004,86	254,22
JUMLAH	597.342.537.783,50	548.050.210.191,70	91,75

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK dan cut off per tanggal 12 Maret 2020

f. Pendapatan Dana Perimbangan

Pendapatan dana perimbangan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.1.779.140.856.326,00 atau 98,42% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.807.667.515.000,00. Rincian target dan realisasi pendapatan dana perimbangan adalah sebagai berikut :





JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Dana Perimbangan			
Bagi Hasil Pajak	108.133.662.000,00	106.152.634.261,00	98,17
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	66.563.666.000,00	78.935.493.725,00	118,59
Dana Alokasi Umum	1.265.567.253.000,00	1.265.114.331.000,00	99,96
Dana Alokasi Khusus	39.893.499.000,00	30.495.476.083,00	76,44
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	327.509.435.000,00	298.442.921.257,00	91,12
JUMLAH	1.807.667.515.000,00	1.779.140.856.326,00	98,42

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK dan cut off per tanggal 12 Maret 2020

g. Lain – Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi atas Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terinci sebagai berikut :

JENIS / OBYEK	ANGGARAN	REALISASI	%
	(Rp)	(Rp)	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	878.927.886.040,00	975.532.277.036,00	110,99
Pendapatan Hibah	153.009.000.000,00	148.319.960.000,00	96,94
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur	153.009.000.000,00	148.319.960.000,00	96,94
Pendapatan Hibah BOS Satuan Pendidikan Negeri	153.009.000.000,00	148.319.960.000,00	96,94
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	353.192.994.540,00	489.288.344.479,00	138,53
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	353.192.994.540,00	487.070.050.849,00	137,90
Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	110.342.519.737,00	171.903.068.609,00	155,79
Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	83.902.789.474,00	117.807.528.712,00	140,41
Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	107.177.654.166,00	140.631.554.571,00	131,21
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	948.026.316,00	1.237.175.236,00	130,50
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	50.822.004.847,00	55.490.723.721,00	109,19
Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota	0,00	2.218.293.630,00	#DIV/0!
Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota Surabaya	0,00	2.218.293.630,00	#DIV/0!
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	359.343.126.000,00	324.541.207.057,00	90,32
Dana Penyesuaian	359.343.126.000,00	324.541.207.057,00	90,32





Dana Insentif Daerah	63.444.058.000,00	31.722.029.000,00	50,00
Dana Desa	295.899.068.000,00	292.819.178.057,00	98,96
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	13.382.765.500,00	13.382.765.500,00	100,00
<i>Bantuan Keuangan Dari Provinsi</i>	13.382.765.500,00	13.382.765.500,00	100,00
Penunjang Biaya Operasional Program TMMD	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
Bantuan Keuangan Pendidikan	9.410.000.000,00	9.410.000.000,00	100,00
Bantuan Keuangan Kesehatan	3.697.765.500,00	3.697.765.500,00	100,00
Bantuan Keuangan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Bantuan Keuangan Jalin Matra	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK dan cut off per tanggal 12 Maret 2020

2. Belanja Daerah

Target belanja daerah untuk tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp.5.423.124.488.516,28, dari target tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp.4.344.722.393.986,67 atau tercapai sebesar 80,11%, dengan rincian sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA DAERAH			
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.391.171.337.231,27	2.105.446.327.097,40	88,05
2.2.	BELANJA LANGSUNG	3.031.953.151.285,01	2.239.276.066.889,27	73,86
	JUMLAH BELANJA DAERAH	5.423.124.488.516,28	4.344.722.393.986,67	80,11

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK dan cut off per tanggal 12 Maret 2020

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.2.105.446.327.097,40 atau 88,05% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.2.391.171.337.231,27.





Rincian realisasi belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
2.1.	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai	1.490.510.538.315,44	1.309.546.679.104,40	87,86
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah	211.249.617.000,00	175.282.849.800,00	82,97
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	82.385.083.100,35	68.719.995.000,00	83,41
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	115.582.620.588,30	115.268.598.214,00	99,73
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	447.815.126.494,18	436.554.980.979,00	97,49
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	43.628.351.733,00	73.224.000,00	0,17
	JUMLAH	2.391.171.337.231,27	2.105.446.327.097,40	88,05

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK dan cut off per tanggal 12 Maret 2020

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.2.624.486.819.956,30 atau 73,86% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.3.031.953.151.285,01.

Rincian realisasi belanja langsung adalah sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
2.2.	BELANJA LANGSUNG			
2.2.1.	Belanja Pegawai	261.870.839.986,80	204.719.755.131,44	78,18
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.464.886.041.614,54	1.230.594.387.495,27	84,01
2.2.3.	Belanja Modal	1.305.196.269.683,67	803.961.924.262,56	61,60
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2.624.486.819.956,30	3.031.953.151.285,01	73,86

Sumber Data : BPKAD Unaudited BPK dan cut off per tanggal 12 Maret 2020



**D. EFISIENSI PENGGUNAN SUMBER DAYA**

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Efisiensi
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	100,00%	75,62%	24,38%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	110,19%	89,77%	20,42%
Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	108,79%	82,60%	26,19%
Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	116,94%	91,33%	25,61%
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	99,63%	88,71%	10,92%
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	100,41%	84,34%	16,07%
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan	96,19%	85,40%	10,80%
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	96,99%	58,28%	38,71%
Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	130,61%	75,23%	55,38%

Efisiensi yang dihasilkan merupakan langkah strategis untuk percepatan pencapaian kinerja. Berdasarkan data tersebut angka efisiensi menunjukkan 25,39% atau Rp.765.054.519.509,26. Langkah efektivitas dan efisiensi diwujudkan dalam bentuk inovasi baik yang menggunakan sistem elektronik melalui peningkatan implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) maupun yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.



BAB IV PENUTUP DAN KESIMPULAN

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran - sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator tujuan terhadap 5 (lima) tujuan dengan 8 (delapan) indikator kinerja, diketahui bahwa 6 indikator tujuan atau 75% Sangat Berhasil, dan 2 indikator tujuan atau 25% Berhasil. Rata - rata realisasi capaian kinerja tujuan mencapai 105,01% atau bermakna Sangat Berhasil. Sedangkan hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 9 (sembilan) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja, diketahui bahwa 10 indikator sasaran atau 47,62% Sangat Berhasil, 9 indikator sasaran atau 42,86% Berhasil, dan 2 indikator sasaran atau 9,52% Cukup. Rata - rata realisasi capaian kinerja sasaran mencapai 105,40% atau bermakna Sangat Berhasil. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 termasuk kategori SANGAT BERHASIL. Capaian kinerja tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018.

Namun demikian, ada 2 indikator kinerja yang belum optimal pencapaiannya, antara lain :

1. Indeks Resiko Bencana; dan
2. Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan banjir;

Solusi :

- Untuk meningkatkan Indeks Resiko Bencana
 - Dukungan anggaran / pendanaan untuk efektifitas penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bencana dan Kebakaran;



- Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD Kabupaten Sidoarjo;
- Optimalisasi Fungsi Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana;
- Pembentukan dan atau Penguatan Forum PRB;
- Penguatan Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Legislatif dalam Pengurangan Risiko Bencana di Daerah;
- Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah;
- Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah;
- Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Komunikasi bencana dan kebakaran lintas lembaga;
- Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana;
- Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
- Untuk meningkatkan pengendalian banjir
 - Ketepatan dalam manajemen pengelolaan air
 - Normalisasi saluran dan afvoer
 - Operasional dan pemeliharaan pintu – pintu air pada Dam / bending
 - Operasional rumah pompa / busem
 - Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuang yang menuju afvoer utama.



BAB V

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan baik skala Nasional maupun Regional. Prestasi dan penghargaan yang diperoleh antara lain, sebagai berikut :

- 1) Tanggal 1 Februari 2019: Penghargaan Pembina Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) dari Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Sidoarjo atas Zero Accident (nihil Kecelakaan), Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan Program Pencegahan dan penanggulangan HIV – AIDS (P2 HIV – AIDS) di tempat kerja kepada perusahaan periode Tahun 2018 Provinsi Jawa Timur diserahkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Ir. Heru Tjahjono, MM di Gedung Negara Graha di – Surabaya
- 2) Tanggal 6 Februari 2019: Predikat nilai A hasil Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SAKIP pada RPJMD tahun 2018. Laporan SAKIP diserahkan langsung oleh Menpan RB, Syafruddin, kepada Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, pada acara Apresiasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2018 Wilayah II di Banjarmasin - Kalimantan Selatan
- 3) Tanggal 28 Maret 2019: Juara ke 2 Lomba Kerapihan dan Ketertiban Pasukan Satpol PP pada peringatan HUT Damkar ke 100, HUT Satpol PP ke 69 serta HUT Satlinmas ke 57 tahun 2019 se Jawa Timur yang digelar di Madiun. Penghargaan diberikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifa Indar Parawansa kepada Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin
- 4) Tanggal 25 April 2019: Penghargaan “Satya Lencana Karyabhakti Praja Nugraha” penghargaan daerah terbaik Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tertinggi nomor 1 nasional dengan predikat (Sangat Tinggi). Penghargaan diberikan

Kementerian Dalam Negeri dalam acara peringatan Hari Otoda ke-23 di Banyuwangi

- 5) Tanggal 29 April 2019: Top Pembina BUMD 2019 dianugerahkan kepada Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Top BUMD 2019 diberikan kepada BPR Delta Artha dan PDAM Delta Tirta dan Top CEO BUMD 2019 diberikan kepada Dirut BPR Delta Artha, Sofia Nurkrisnajati Atmaja. Penyelenggara Majalah Top Business di Jakarta
- 6) Tanggal 23 Mei 2019: Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemkab Sidoarjo. Opini WTP yang keenam kalinya ini diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018
- 7) Tanggal 23 Juli 2019: Kota Layak Anak (KLA) 2019 dengan peningkatan predikat dari kategori Madya ke kategori Nindya. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise dalam acara Malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak di Hotel Four Points Makassar, Sulawesi Selatan bertepatan dengan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2019 di Makassar
- 8) Tanggal 8 Agustus 2019: Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo raih penghargaan Public Services of The Year Jawa Timur 2019, pada acara Indonesia Marketeers Festival 2019, di Ballroom Shangri-la Hotel Surabaya, Kamis, (8/8). Tiga OPD tersebut antara lain RSUD Sidoarjo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sidoarjo dan BPR Delta Artha Sidoarjo. Penghargaan tahunan yang diselenggarakan MarkPlus Inc tersebut diberikan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak
- 9) Tanggal 17 Agustus 2019: Medali 9 Windu Kejuangan Kemerdekaan R.I ke 74 dari Dewan Harian Nasional 45 kepada Bupati Sidoarjo. Piagam dan medali ini diberikan sebagai wujud komitmen Bupati dalam melestarikan nilai kejuangan bangsa



- 10) Tanggal 2 Oktober 2019: Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI. Predikat WTP ini adalah ke-6 kali untuk Kab Sidoarjo sejak tahun 2013.
- 11) Tanggal 12 Oktober 2019: Pemkab Sidoarjo diwakili Kelompok Asuhan Mandiri Desa Jemundo mendapatkan Penghargaan Desa Pengembangan Tanaman TOGA terbaik se-Jawa Timur. Penghargaan diserahkan Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Sidoarjo saat Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur di Grahadi
- 12) Tanggal 28 Oktober 2019: Penghargaan Kota Layak Pemuda Kategori Utama Tahun 2019 dari Kemenpora R.I. Penghargaan diserahkan Menpora Zainudin Amali kepada Bupati Sidoarjo saat puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 di Jakarta.
- 13) Tanggal 19 November 2019: Meraih Penghargaan Katagori Kepala Daerah Komitmen Tinggi Peduli Ketahanan Pangan dari Gubernur Jawa Timur, di Surabaya
- 14) Tanggal 22 November 2019 : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kembali memberikan penghargaan kepada dua instansi milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dua instansi tersebut yakni Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan RSUD Sidoarjo menjadi role model pelayanan public nasional. DPMPTSP masuk dalam kategori pelayanan publik Sangat Baik (A-), sedangkan RSUD Sidoarjo masuk dalam kategori Pelayanan Prima (A).
- 15) Tanggal 10 Desember 2019 : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Sidoarjo, mendapatkan penghargaan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri PANRB RI, Tjahjo Kumolo





- 16) Tanggal 17 Desember 2019 : Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, BPR Delta Artha kembali meraih penghargaan kategori BPR BUMD Kabupaten/Kota Terbaik Pertama Se-Jawa Timur. Penghargaan





**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. NUR AHMAD SYAIFUDDIN, SH.**
Jabatan : **WAKIL BUPATI SIDOARJO**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sidoarjo, Oktober 2019

WAKIL BUPATI SIDOARJO

H. NUR AHMAD SYAIFUDDIN, SH.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

NO.	MISI / TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Misi 1 : "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan"		
	Tujuan 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif, dan	Indeks Good Governance (IGG)	69.32
		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	B
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Opini Atas Audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)	WTP
		Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten	BB
		Status Kinerja LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	ST
		Tingkat Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah)	Terdefinisi
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	B (Baik)
		Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	2.60
	Misi 2 : "Meningkatnya Perekonomian Daerah melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat"		
	Tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	5.67
		Indeks GINI	0.37
3.	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	PDRB Perkapita	82.741
4.	Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.56
		Tingkat Kemiskinan	6.36
		Persentase Desa Maju	27.33%
	Misi 3 : "Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan"		
	Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79.51
5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	14.35
		Rata - Rata Lama Sekolah (RTLS)	10.75
6.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73.68
	Misi 4 : "Meningkatnya Tataan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban"		
	Tujuan 4 : Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan	Indeks Kebahagiaan	79.83
7.	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan	Indeks Rasa Aman	75.37
		Indeks Resiko Bencana	105
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.55
	Misi 5 : "Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan"		
	Tujuan 5 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Infrastruktur	1.418
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	52.01
8.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	87%
		Persentase penurunan Luas wilayah rawan Genangan	60%
9.	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	52.29
		Indeks Kualitas Udara	86.79
		Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	25.72

Sidoarjo, Oktober 2019

WAKIL BUPATI SIDOARJO

H. NUR AHMAD SYAIFUDDIN, SH.

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	KETERANGAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	52,803,743,099.50	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	15,013,304,236.50	APBD
	Program Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Perekonomian, Pertanian dan BUMD	1,351,895,480.00	APBD
	Program Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	1,985,078,280.00	APBD
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum	2,013,643,010.00	APBD
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama	4,840,447,000.00	APBD
	Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan	1,348,907,570.00	APBD
	Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	8,858,253,248.00	APBD
	Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	4,637,505,785.00	APBD
	Program pelayanan administrasi kegiatan, keprotokolan dan rumah tangga pimpinan daerah.	12,754,708,490.00	APBD
2	SEKRETARIAT DPRD	73,612,011,013.52	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	10,822,995,463.52	APBD
	Program Penganggaran dan Pengawasan	35,886,928,600.00	APBD
	Program Fasilitasi Persidangan dan Perundang - Undangan	19,159,647,950.00	APBD
	Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	7,742,439,000.00	APBD
3	INSPEKTORAT	4,378,668,512.00	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1,505,991,000.00	APBD
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,872,677,512.00	APBD
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	418,380,535,280.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	11,573,961,853.00	APBD
	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	130,109,271,790.00	APBD
	Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan	1,944,963,300.00	APBD
	Program perluasan dan aksesibilitas pendidikan	94,041,565,605.00	APBD
	Program Pendidikan Sekolah Dasar	14,982,953,652.00	APBN dan DAK
	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	15,396,892,545.00	APBN dan DAK
	Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	1,768,080,175.00	APBD
	Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	3,022,806,362.00	APBD
	Program Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Regional (BOSREG)	145,540,039,998.00	APBN dan DAK
5	DINAS KESEHATAN	250,980,109,705.99	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	8,582,610,488.00	APBD
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	28,304,828,061.00	APBD dan DAK
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4,776,022,996.00	APBD dan DBHCHT
	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	59,983,489,672.00	APBD dan DAK
	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	30,211,401,769.68	APBD
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas	119,121,756,719.31	APBD dan BLUD

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	KETERANGAN
6	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	642,624,248,757.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	8,025,661,609.00	APBD
	Program Penyusunan Perencanaan Teknis dan Pengelolaan Data ke-PU-an	11,343,325,215.00	APBD
	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan	510,033,637,631.00	APBD dan DAK
	Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Pematusan dan Pengendalian Banjir	113,221,624,302.00	APBD dan DAK
7	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	417,607,119,065.07	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,896,817,735.00	APBD
	Program Penataan Bangunan	322,126,859,139.07	APBD
	Program Pengawasan Bangunan	1,485,988,460.00	APBD
	Program Pembangunan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman	75,364,191,458.00	APBD dan DAK
	Program Penataan Ruang, Pengadaan Tanah, dan Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	14,733,262,273.00	APBD
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	15,380,245,545.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	8,664,475,960.00	APBD
	Program Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	5,609,871,240.00	APBD
	Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	605,072,120.00	APBD
	Program Perlindungan Masyarakat	500,826,225.00	APBD
9	DINAS SOSIAL	10,033,022,583.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,445,197,178.00	APBD
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5,142,234,065.00	APBD
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2,132,624,590.00	APBD
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	312,966,750.00	APBD
10	DINAS TENAGA KERJA	6,623,763,285.50	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,649,593,323.00	APBD
	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2,145,372,940.00	APBD
	Program Pengembangan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	264,267,870.00	APBD
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Penyelenggaraan Transmigrasi	1,564,529,152.50	APBD
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA	14,039,684,129.50	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,317,210,624.00	APBD
	Program Kesetaraan gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,787,325,956.50	APBD dan DBHCHT
	Program Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	9,372,015,549.00	APBD
	Program Pengendalian Kependudukan	563,132,000.00	APBD
12	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	26,863,651,623.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	7,537,414,500.00	APBD
	Program Peningkatan Hasil Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	753,543,560.00	APBD dan DAK
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	1,713,227,799.00	APBD dan DAK
	Program Peningkatan Produksi Peternakan dan Hasil Hewan	2,216,002,345.00	APBD dan DAK

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	KETERANGAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan dan Pemberdayaan Penyuluhan	2,607,815,290.00	APBD dan DAK
	Program Peningkatan Kualitas Produksi Peternakan	12,035,648,129.00	APBD dan DAK
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	161,353,639,724.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,528,645,863.00	APBD
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	32,563,474,525.00	APBD
	Program Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	3,298,588,500.00	APBD dan DBHCHT
	Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran	2,591,973,525.00	APBD dan DBHCHT
	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penerangan jalan dan lingkungan	118,370,957,311.00	APBD
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11,266,021,758.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,102,010,218.00	APBD
	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1,323,200,040.00	APBD
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2,154,181,000.00	APBD
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3,023,340,950.00	APBD
	Program pelayanan pencatatan sipil	663,289,550.00	APBD
15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6,026,300,610.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,393,765,820.00	APBD
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1,522,819,500.00	APBD
	Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	727,627,190.00	APBD dan DBHCHT
	Program Pembinaan Pemerintahan Desa	999,863,600.00	APBD
	Program Pembinaan Keuangan, Aset dan Kekayaan Desa	382,224,500.00	APBD
16	DINAS PERHUBUNGAN	62,603,076,576.36	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,969,686,350.00	APBD
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	4,958,022,360.00	APBD
	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	26,974,506,100.00	APBD dan DAK
	Program Evaluasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	26,594,107,336.36	APBD
	Program Penyusunan Kebijakan Teknis, Norma, Standart Prosedur dan Sistem Informasi di bidang Perhubungan	1,106,754,430.00	APBD
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	27,593,802,619.61	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,852,604,443.21	APBD
	Program peningkatan kualitas layanan data teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	20,290,225,628.40	APBD
	Program pengelolaan, fasilitasi dan implementasi teknologi informatika	1,166,964,040.00	APBD
	Program pelayanan informasi, pemberitaan dan pengelolaan pengaduan masyarakat	2,677,987,850.00	APBD
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	606,020,658.00	APBD
18	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	10,190,932,565.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,564,477,960.00	APBD
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	856,401,285.00	APBD

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	KETERANGAN
	Pemberdayaan dan Pengembangan, Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	6,345,589,500.00	APBD
	Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	424,463,820.00	APBD
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10,488,849,180.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	7,861,350,050.00	APBD
	Program Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	377,041,100.00	APBD
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	363,584,820.00	APBD
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1,886,873,210.00	APBD
20	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA	16,717,910,529.50	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,032,452,410.00	APBD
	Program peningkatan peran serta kepemudaan	3,624,546,531.00	APBD
	Program Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Keolahragaan	577,448,500.00	APBD
	Program Pengembangan Objek, Promosi dan Usaha Pariwisata	2,594,624,188.50	APBD
	Peningkatan peran serta dan pemberdayaan keolahragaan	6,888,838,900.00	APBD
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11,400,717,830.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	5,475,599,531.00	APBD
	Program Pengembangan Koleksi dan Pelayanan Perpustakaan	4,212,415,254.50	APBD
	Program Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca	993,008,542.00	APBD
	Program Pengelolaan, Pelayanan dan Dokumentasi Kearsipan	719,694,502.50	APBD
22	DINAS PERIKANAN	20,942,683,069.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,421,142,913.00	APBD
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Garam	587,774,780.00	APBD dan DAK
	Program Peningkatan produksi perikanan Budidaya	16,364,007,276.00	APBD dan DAK
	Program Pembinaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1,569,758,100.00	APBD dan DAK
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	38,130,790,831.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	6,671,659,050.00	APBD
	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan kerjasama dan pengembangan perdagangan serta pembinaan pedagang informal	4,601,253,630.00	APBD dan DBHCHT
	Program Pengembangan, Penyediaan Sarana Prasarana dan Peningkatan Pelayanan infrastruktur melalui kemitraan serta pendapatan pasar rakyat	16,011,667,811.00	APBD dan DBHCHT
	Program Penumbuhan dan Pengembangan IKM	10,846,210,340.00	APBD dan DBHCHT
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	16,841,446,305.00	
	Program Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	1,585,713,060.00	APBD
	Program Perencanaan Bidang Ekonomi	1,238,337,730.00	APBD
	Program Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah	3,480,416,880.00	APBD
	Program Penelitian, Pengembangan dan Penyusunan Data Pembangunan Daerah	1,425,384,625.00	APBD

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	KETERANGAN
	Program perencanaan pembangunan daerah	3,324,850,080.00	APBD
	Program Pelayanan Kesekretariatan	5,786,743,930.00	APBD
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	13,144,691,281.04	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,844,523,733.04	APBD
	Program Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	3,916,682,748.00	APBD
	Program Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	1,691,775,100.00	APBD
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	2,691,709,700.00	APBD
26	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	14,260,661,045.00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,828,229,475.00	APBD
	Program Pendataan, Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah.	6,134,743,820.00	APBD
	Program Penetapan Pajak Daerah.	2,854,443,120.00	APBD
	Program Pengendalian Pajak Daerah	1,443,244,630.00	APBD
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	17,622,076,220.50	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,854,513,046.00	APBD
	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1,565,533,305.00	APBD
	Program Pengembangan ASN	2,937,458,735.00	APBD
	Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	1,446,474,087.50	APBD
	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	7,818,097,047.00	APBD
28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9,852,692,150.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	4,266,068,890.00	APBD
	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2,637,862,650.00	APBD
	Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	1,629,577,975.00	APBD
	Program Peningkatan pendidikan politik masyarakat dan hubungan antar lembaga	1,319,182,635.00	APBD
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12,548,412,875.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,823,373,280.00	APBD
	Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	6,558,818,330.00	APBD
	Program Pencegahan Dini, Kesiapsiagaan, Tanggap Darurat dan Manajemen Logistik Kebencanaan	1,450,516,470.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	715,704,795.00	APBD
30	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	541,271,456,631.42	
	Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah	541,271,456,631.42	BLUD dan APBD
31	KECAMATAN SIDOARJO	19,238,024,034.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,075,208,432.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	194,737,100.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	1,077,046,070.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	15,891,032,432.00	APBD
32	KECAMATAN CANDI	1,914,306,027.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,141,276,367.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	736,429,660.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan umum	36,600,000.00	APBD

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	KETERANGAN
33	KECAMATAN BUDURAN	2,358,371,820.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,265,243,620.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	845,513,400.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan umum	247,614,800.00	APBD
34	KECAMATAN GEDANGAN	2,148,962,862.50	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,298,229,682.50	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	850,733,180.00	APBD
35	KECAMATAN SEDATI	2,531,330,272.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,478,207,312.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	972,988,860.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	80,134,100.00	APBD
36	KECAMATAN WARU	2,195,812,826.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,141,708,936.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	1,054,103,890.00	APBD
37	KECAMATAN TAMAN	12,452,312,266.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	2,093,497,607.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	286,409,450.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	917,665,700.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	9,154,739,509.00	APBD
38	KECAMATAN SUKODONO	2,872,629,788.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,584,314,340.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	1,071,655,198.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	216,660,250.00	APBD
39	KECAMATAN WONOAYU	2,154,751,084.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,247,355,045.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	863,644,500.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	43,751,539.00	APBD
40	KECAMATAN KRAN	7,593,427,104.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	3,094,023,110.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	96,515,660.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	1,011,273,020.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	3,391,615,314.00	APBD

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	KETERANGAN
41	KECAMATAN BALONGBENDO	2,254,872,380.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,521,198,810.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	645,511,870.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	88,161,700.00	APBD
42	KECAMATAN TARIK	2,173,621,284.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,424,671,164.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	748,950,120.00	APBD
43	KECAMATAN TULANGAN	1,797,818,140.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	916,297,290.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	853,016,850.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	28,504,000.00	APBD
44	KECAMATAN PRAMBON	2,092,684,082.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,348,838,772.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	743,845,310.00	APBD
45	KECAMATAN KREMBUNG	1,928,101,860.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,100,638,760.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	780,607,900.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	46,855,200.00	APBD
46	KECAMATAN TANGGULANGIN	2,399,701,782.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,681,512,842.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	668,188,940.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	50,000,000.00	APBD
47	KECAMATAN JABON	2,310,602,770.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,591,610,570.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	696,104,050.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	22,888,150.00	APBD

NO.	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	KETERANGAN
48	KECAMATAN PORONG	7,211,676,504.00	
	Program Pelayanan Kesekretariatan	1,264,890,130.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	4,957,241,484.00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum	127,368,000.00	APBD
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan, pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan	862,176,890.00	APBD
	J U M L A H	3,013,211,971,285.01	

Sidoarjo, Oktober 2019

WAKIL BUPATI SIDOARJO

H. NUR AHMAD SYAIFUDDIN, SH.

**PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2019**

VISI : Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian	Tingkat Keberhasilan
	MISI 1	:	Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.					
	TUJUAN 1	:	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan					
	Indikator Tujuan	1	Indeks Good Governance	Indeks	69.32	74.24	107.10%	Sangat Berhasil
		2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	B	100.00%	Berhasil
	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1	Opini Atas Audit BPK	Opini	WTP	WTP	100.00%	Berhasil
		2	Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)	100.00%	Berhasil
		3	Status Kinerja EKPPD	Kategori	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	100.00%	Berhasil
		4	Tingkat Maturitas SPIP	Level	level 3	level 3	100.00%	Berhasil
		Tingkat Pencapaian Sasaran						100.00%
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kategori	Baik	Baik	100.00%	Berhasil
		2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2.60	3.13	120.38%	Sangat Berhasil
		Tingkat Pencapaian Sasaran						110.19%

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian	Tingkat Keberhasilan
	MISI 2	:	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat					
	TUJUAN 2	:	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing					
	Indikator Tujuan	1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.67%	5.99%	105.64%	Sangat Berhasil
		2	Indeks GINI	Indeks	0.37	0.34	108.82%	Sangat Berhasil
	<i>Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat</i>	1	PDRB perkapita	Rupiah (juta/tahun)	82,741	90,015	108.79%	Sangat Berhasil
		Tingkat Pencapaian Sasaran					108.79%	Sangat Berhasil
	<i>Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat</i>	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5.56%	4.72%	117.80%	Sangat Berhasil
		2	Tingkat Kemiskinan	%	6.36%	5.32%	119.55%	Sangat Berhasil
		3	Persentase Desa Maju	%	27.33%	32.92%	120.45%	Sangat Berhasil
		Tingkat Pencapaian Sasaran					119.27%	Sangat Berhasil
	MISI 3	:	Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan					
	TUJUAN 3	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia					
	Indikator Tujuan	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	79.51	80.05	100.68%	Sangat Berhasil

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian	Tingkat Keberhasilan
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,35 tahun	14,91 tahun	103.90%	Sangat Berhasil
		2	Rata - Rata Lama Sekolah (RTLs)	Tahun	10,75 tahun	10,25 tahun	95.35%	Berhasil
		Tingkat Pencapaian Sasaran						99.63%
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	73.68 tahun	73.98 tahun	100.41%	Sangat Berhasil
		Tingkat Pencapaian Sasaran						100.41%
	MISI 4	:	Meningkatnya Tataan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlakul Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban					
	TUJUAN 4	:	Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun,					
	Indikator Tujuan	1	Indeks Kebahagiaan	Indeks	79.83	80.28	100.56%	Sangat Berhasil
	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan	1	Indeks Rasa Aman	Indeks	75.37	76.01	100.85%	Sangat Berhasil
		2	Indeks Resiko Bencana	Indeks	105.00	117.95	89.02%	Cukup
		3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94.55	93.33	98.71%	Berhasil
		Tingkat Pencapaian Sasaran						96.19%
	MISI 5	:	Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan					

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian	Tingkat Keberhasilan
	TUJUAN 5	:	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup					
	Indikator Tujuan	1	Indeks Infrastruktur	Indeks	1.418	1.417	99.93%	Berhasil
		2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	52.01	61.03	117.34%	Sangat Berhasil
	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	1	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	87.00%	91.48%	105.15%	Sangat Berhasil
		2	Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan banjir	%	60.00%	53.30%	88.83%	Cukup
		Tingkat Pencapaian Sasaran						96.99%
	Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Air	Indeks	52.29	49.05	93.80%	Berhasil
		2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86.79	86.26	99.39%	Berhasil
		3	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Indeks	25.72	51.09	198.64%	Sangat Berhasil
		Tingkat Pencapaian Sasaran						130.61%

**ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2019**

VISI : Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	ANGGARAN	
				Alokasi 2019	% Anggaran
	MISI 1	:	Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.		
	TUJUAN 1	:	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan		
	<i>Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	1	Opini Atas Audit BPK	Rp 178,402,636,431.56	5.92%
		2	Nilai SAKIP Kabupaten		
		3	Status Kinerja EKPPD		
		4	Tingkat Maturitas SPIP		
	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi</i>	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Rp 51,554,433,909.11	1.71%
		2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		

	MISI 2	:	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat		
	TUJUAN 2	:	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing		
	<i>Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat</i>	1	Pendapatan perkapita	Rp 131,029,099,968.00	4.35%
	<i>Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat</i>	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Rp 98,745,893,415.00	3.28%
		2	Tingkat Kemiskinan		
		3	Persentase Desa Maju		
	MISI 3	:	Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan		
	TUJUAN 3	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia		
	<i>Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat</i>	1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rp 440,152,392,538.50	14.61%
		2	Rata - Rata Lama Sekolah (RTL)		

	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup	Rp	801,623,581,886.41	26.60%
	MISI 4	:	Meningkatnya Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlakul Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban			
	TUJUAN 4	:	Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman,			
	Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan	1	Indeks Rasa Aman	Rp	42,449,019,150.50	1.41%
		2	Indeks Resiko Bencana			
		3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
	MISI 5	:	Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan			
	TUJUAN 5	:	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup			
	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	1	Persentase Jalan Kondisi Mantap	Rp	1,122,834,444,398.43	37.26%

	2	Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan banjir		
<i>Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup</i>	1	Indeks Kualitas Air	Rp	161,353,639,724.00
	2	Indeks Kualitas Udara		
	3	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi		
				5.35%

**PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2019**

VISI : Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	KINERJA			ANGGARAN			
				Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian	Alokasi 2019	Realisasi 2019	% Capaian	
	MISI 1	: Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.								
	TUJUAN 1	: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan								
	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1	Opini Atas Audit BPK	WTP	WTP	100.00%	100.00%	Rp 178,402,636,431.56	Rp 134,905,611,142.86	75.62%
2		Nilai SAKIP Kabupaten	BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)	100.00%	100.00%				
3		Status Kinerja EKPPD	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	100.00%	100.00%				
4		Tingkat Maturitas SPIP	level 3	level 3	100.00%	100.00%				
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kategori	Baik	Baik	100.00%	Rp 51,554,433,909.11	Rp 46,280,991,073.00	89.77%
2		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2.60	3.13	120.38%				
	MISI 2	: Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat								
	TUJUAN 2	: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing								
	Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat	1	PDRB perkapita	Rupiah (juta/tahun)	82,741	90,015	108.79%	Rp 131,029,099,968.00	Rp 108,233,922,352.69	82.60%
	Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5.56%	4.72%	117.80%	Rp 98,745,893,415.00	Rp 90,187,195,127.56	91.33%
2		Tingkat Kemiskinan	%	6.36%	5.65%	112.57%				
3		Persentase Desa Maju	%	27.33%	32.92%	120.45%				
	MISI 3	: Meningkatkan Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan								
	TUJUAN 3	: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia								
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,35 tahun	14,91 tahun	103.90%	Rp 440,152,392,538.50	Rp 390,440,910,288.00	88.71%

	2	Rata - Rata Lama Sekolah (RTLs)	Tahun	10,75 tahun	10,25 tahun	95.35%			
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup	Tahun	73.68 tahun	73.98 tahun	100.41%	Rp 801,623,581,886.41	Rp 676,065,005,214.51	84.34%
MISI 4	: Meningkatkan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlakul Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban								
TUJUAN 4	: Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan								
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan	1	Indeks Rasa Aman	Indeks	75.37	76.01	100.85%	Rp 42,449,019,150.50	Rp 36,250,573,415.16	85.40%
	2	Indeks Resiko Bencana	Indeks	105.00	117.95	89.02%			
	3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94.55	93.33	98.71%			
MISI 5	: Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan								
TUJUAN 5	: Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup								
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah	1	Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	87.00%	91.48%	105.15%	Rp 1,122,834,444,398.43	Rp 654,389,741,657.59	58.28%
	2	Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan banjir	%	60.00%	53.30%	88.83%			
Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Air	Indeks	52.29	49.05	93.80%	Rp 161,353,639,724.00	Rp 121,393,778,765.90	75.23%
	2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86.79	86.26	99.39%			
	3	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	Indeks	25.72	51.09	198.64%			

**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2019**

VISI : Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
	MISI 1	:	Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.			
	TUJUAN 1	:	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan transparan			
	<i>Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan</i>	1	Opini Atas Audit BPK	100.00%	75.62%	24.38%
		2	Nilai SAKIP Kabupaten	100.00%		
		3	Status Kinerja EKPPD	100.00%		
		4	Tingkat Maturitas SPIP	100.00%		
	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi</i>	1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	100.00%	89.77%	20.42%
		2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	120.38%		
	MISI 2	:	Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat			
	TUJUAN 2	:	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing			

	<i>Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat</i>	1	Pendapatan perkapita	108.79%	82.60%	26.19%
	<i>Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat</i>	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	117.80%	91.33%	25.61%
		2	Tingkat Kemiskinan	112.57%		
		3	Persentase Desa Maju	120.45%		
	MISI 3	:	Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan			
	TUJUAN 3	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
	<i>Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat</i>	1	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	103.90%	88.71%	10.92%
		2	Rata - Rata Lama Sekolah (RTLS)	95.35%		
	<i>Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</i>	1	Angka Harapan Hidup	100.41%	84.34%	16.07%
	MISI 4	:	Meningkatnya Tataan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlakul Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban			
	TUJUAN 4	:	Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun,			

<i>Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum yang berkeadilan</i>	1	Indeks Rasa Aman	100.85%	85.40%	10.80%
	2	Indeks Resiko Bencana	89.02%		
	3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98.71%		
MISI 5	:	Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan			
TUJUAN 5	:	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta kelestarian lingkungan hidup			
<i>Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah</i>	1	Persentase Jalan Kondisi Mantap	105.15%	58.28%	38.71%
	2	Persentase penurunan luas wilayah rawan genangan banjir	88.83%		
<i>Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup</i>	1	Indeks Kualitas Air	93.80%	75.23%	55.38%
	2	Indeks Kualitas Udara	99.39%		
	3	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	198.64%		

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjiP) PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Sidoarjo, Maret 2020

**INSPEKTUR
KABUPATEN SIDOARJO**



ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700926 199003 1 005